

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENELANTARAN ANAK

(Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BIRGITA VENI ANDRIANI

115010101111008



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK
(Studi di Kepolisian Resort Kabupaten
Bojonegoro)**

Identitas Penulis

a. Nama : **Birgita Veni Andriani**

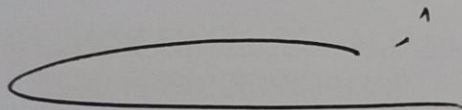
b. NIM : **115010101111008**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **6 Bulan**

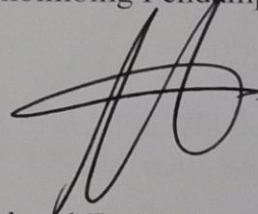
Disetujui pada tanggal : **28 Juni 2018**

Pembimbing Utama



Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum
NIP. 195901261987011002

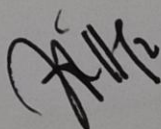
Pembimbing Pendamping



Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H
NIP. 198408162015042002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yuliati, S.H., LL.M
NIP. 196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

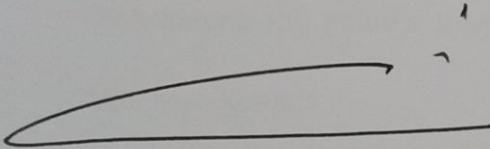
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK
(Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro)**

BIRGITA VENI ANDRIANI

NIM: 115010101111008

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,



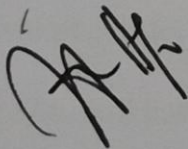
Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum
NIP. 195901261987011002

Pembimbing Pendamping,



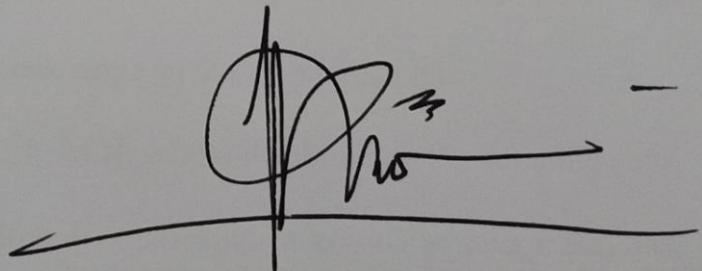
Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H
NIP. 198408162015042002

Ketua Bagian
Hukum Pidana,



Dr. Yuliati, S.H., LL.M
NIP. 196607101992032003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, yang telah melimpahkan berkah dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro)”** ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata I studi Ilmu Hukum.

Doa senantiasa saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu menuntunku dalam menyelesaikan Skripsi ini, tak lupa kepada keluarga dan sahabat. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LLM, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah bersabar memberikan ilmu dan masukannya kepada penulis mulai dari awal penulisan hingga terselesaikannya laporan penelitian ini.
4. Ibu Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersabar memberikan ilmu dan masukannya kepada penulis mulai dari awal penulisan hingga terselesaikannya laporan penelitian ini.

5. Bapak Aiptu Kasdi, SH, selaku Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Bripka Sunarsih selaku anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Bojonegoro, yang telah berkenan membantu penulis dalam memberikan keterangan dan informasi guna penelitian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Dwi Hariningsih, selaku Kepala Bidang Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu penulis untuk memberikan data dan informasi mengenai penulisan skripsi ini.
7. Ibu Mamsuhah, S.Sos, dan Bapak Doni selaku pegawai Sie Pendataan, Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.
8. Ibu Dra. Mahfudhoh Suyoto, M.Si, selaku Ketua Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro yang telah membantu penulis untuk memberikan data dan informasi mengenai penulisan skripsi ini.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Alm. Bapak Ambrosius Sutarto dan Ibu Veronica Sriyani, yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi, terlebih doa restu kepada penulis, serta kasih sayangnya yang tulus dan ikhlas.
10. Kakak-kakak tersayang, Andreas Ferry Erianto dan Antonius Dedy Andrianto, yang telah memberikan doa, motivasi dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Nenek tersayang, Lucia Maria Sarti yang senantiasa membantu mengirimkan doa-doanya kepada penulis selama proses menyelesaikan Skripsi ini.

12. Sahabat penulis, Ellen, yang selalu setiap saat memberikan masukan, motivasi, doa, serta penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah memberi dukungan hingga terselesaikannya penelitian ini. Serta Ivon Rista Veranda, Nabila Rosyidah, Maria Constantia Kono dan sahabat-sahabat lainnya yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, masukan, serta kebersamaan dari awal masuk kuliah hingga kini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa, perhatian, dan bantuannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut diatas.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik.dan saran membangun selalu terbuka lebar untuk penyempurnaan laporan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pengerjaan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima Kasih.

Malang, 25 Juni 2018

Birgita Veni Andriani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Anak.....	16
1. Pengertian Anak.....	16
2. Hak-hak Anak.....	18
3. Kewajiban Anak.....	25
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Definisi Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
3. Subyek Tindak Pidana.....	30
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	31
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	33
1. Pengertian Penelantaran Anak.....	33
2. Jenis-jenis Penelantaran Anak.....	36
3. Ciri-ciri Penelantaran Anak.....	41

4. Dampak Penelantaran Anak.....	44
D. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum.....	46
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	46
2. Teori Penegakan Hukum.....	48
3. Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	51

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Memperoleh Data.....	58
F. Populasi, Sampel dan Responden.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	63
H. Definisi Operasional.....	63

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Realita Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro.....	65
1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro.....	65
2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro.....	71
3. Realita Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro.....	74
B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	80
C. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	138

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	154

DAFTAR PUSTAKA.....	156
----------------------------	------------

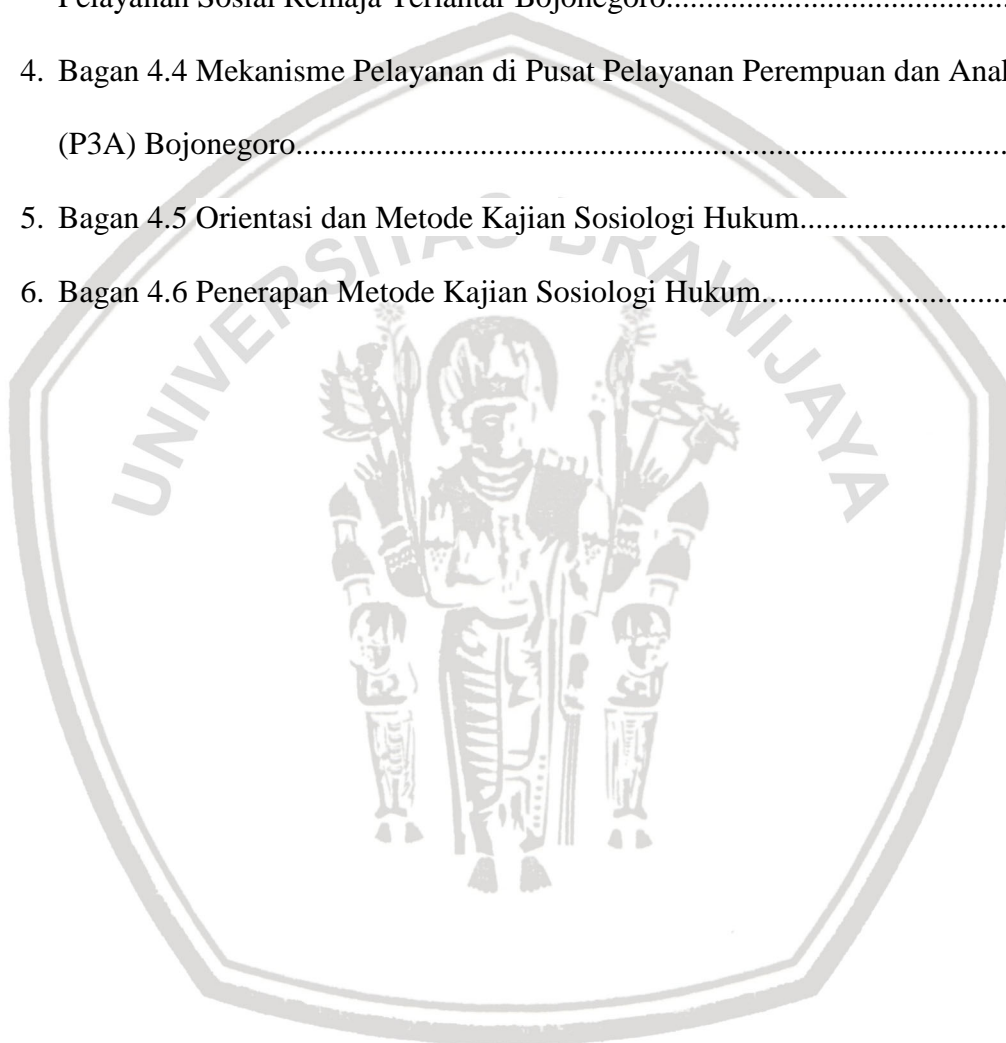
LAMPIRAN.....	160
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data Kasus Penelantaran Anak di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tahun 2012 s/d 2017.....	4
2. Tabel 1.2 Orisinalitas Hasil Skripsi.....	10
3. Tabel 3.1 Data Kasus Penelantaran Anak pada tahun 2012 s/d 2017 di Kabupaten Bojonegoro.....	56
4. Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Bojonegoro.....	68
5. Tabel 4.2 Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT, dan RW Per Kecamatan di Kab. Bojonegoro.....	70
6. Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur di Kabupaten Bojonegoro.....	74
7. Tabel 4.4 Persentase Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 s/d 2017.....	76
8. Tabel 4.5 Data Kasus Penelantaran Anak yang sudah ditangani Dinas Sosial Kab. Bojonegoro tahun 2012 s/d 2017.....	76
9. Tabel 4.6 Data Kasus Penelantaran Anak di Dinas Sosial Kab. Bojonegoro menurut Kecamatan pada tahun 2012 s/d 2017.....	77
10. Tabel 4.7 Mata Pencarian Penduduk menurut Kecamatan yang memiliki Kasus Penelantaran Anak tertinggi di Kab. Bojonegoro.....	79
11. Tabel 4.8 Banyaknya Panti Asuhan, Penghuni dan Pengasuh di Kabupaten Bojonegoro.....	92
12. Tabel 4.12 Jumlah Kasus Penelantaran Anak di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro tahun 2011 s/d 2017.....	104
13. Tabel 4.13 Data Jumlah Kejahatan Terhadap Anak pada tahun 2013-2017 di Polres Bojonegoro.....	105

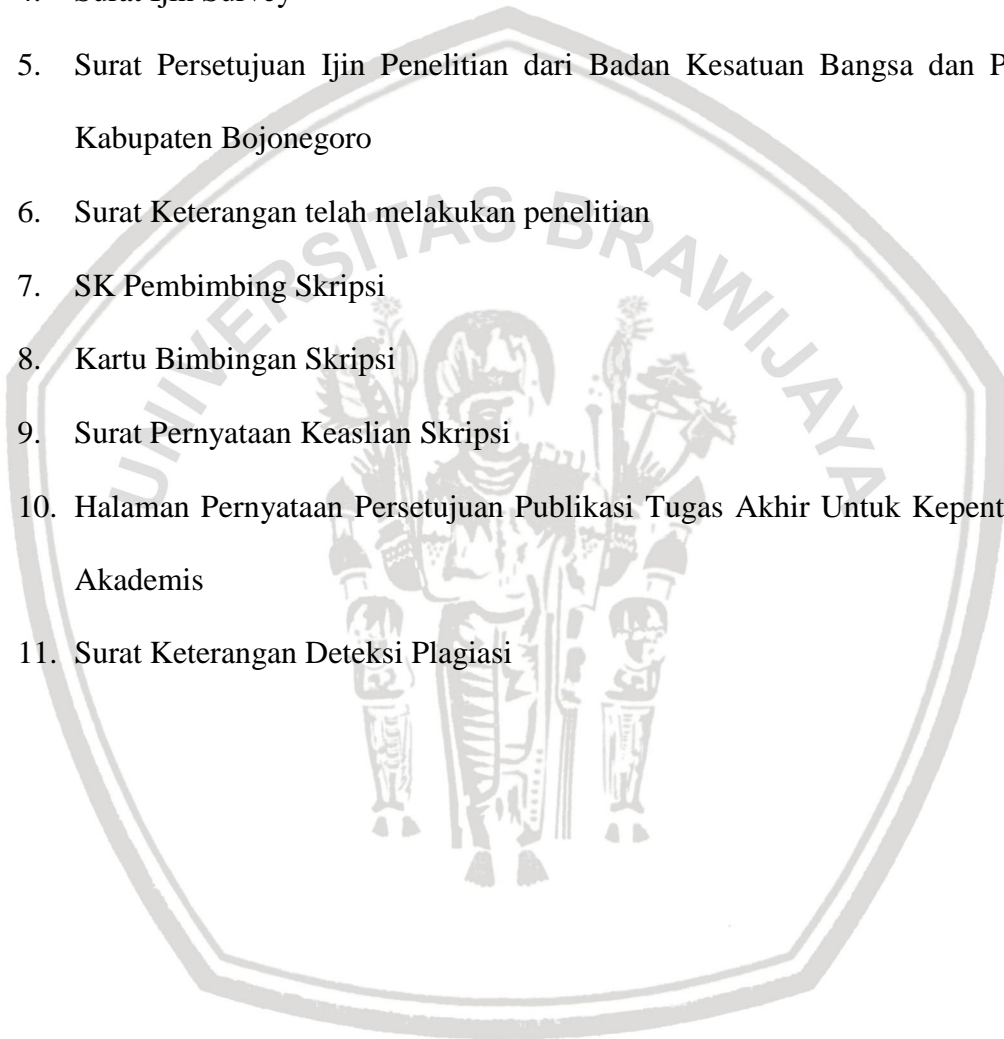
DAFTAR BAGAN

1. Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kasat Reskrim Polres Bojonegoro.....	72
2. Bagan 4.2 Proses Pelayanan Sosial di UPT PSRT Bojonegoro.....	97
3. Bagan 4.3 Proses Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah Terlantar UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Bojonegoro.....	98
4. Bagan 4.4 Mekanisme Pelayanan di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro.....	102
5. Bagan 4.5 Orientasi dan Metode Kajian Sosiologi Hukum.....	129
6. Bagan 4.6 Penerapan Metode Kajian Sosiologi Hukum.....	130



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Data tahun 2013-2017 dari Polres Bojonegoro
4. Surat Ijin Survey
5. Surat Persetujuan Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bojonegoro
6. Surat Keterangan telah melakukan penelitian
7. SK Pembimbing Skripsi
8. Kartu Bimbingan Skripsi
9. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
10. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan
Akademis
11. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi



RINGKASAN

Birgita Veni Andriani, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK** (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro), Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

Di dalam skripsi ini, penulis meneliti mengenai permasalahan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak. Permasalahan tersebut dilatar belakangi oleh ditemukannya banyak kasus Penelantaran Anak di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang datanya penulis peroleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2017 Bojonegoro dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak, dari hal tersebut penulis ingin meneliti sejauh mana kasus Penelantaran Anak di Bojonegoro diperhatikan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana upaya dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis kriminologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh hasil penelitian yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dapat dilihat dari faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum meliputi faktor substansi hukum, yang terdapat kelemahan pada Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor struktur hukum yaitu kurangnya pengetahuan Penyidik tentang hukum perlindungan anak, tidak adanya koordinasi antara Polres Bojonegoro dengan Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro. Faktor budaya hukum yaitu kurangnya keaktifan Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak, rendahnya kesadaran hukum orang tua tentang hukum perlindungan anak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang hukum perlindungan anak. Faktor non hukum meliputi faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah pembaharuan hukum, meningkatkan pengetahuan penyidik tentang hukum perlindungan anak, meningkatkan kerjasama antara Polres, Dinas Sosial, dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak Bojonegoro, meningkatkan kesadaran hukum orang tua dan masyarakat tentang hukum perlindungan anak, meningkatkan kualitas ekonomi orang tua dan masyarakat yang rendah.

SUMMARY

Birgita Veni Andriani, Criminal of Law, Faculty of law Universitas Brawijaya, June 2018, LAW ENFORCEMENT TO AGAINTS CRIMINAL ACT OF CHILDREN'S NEGLECTED (Studi in Bojonegoro Police Resort), Dr. Abdul Madjid, S.H.,M.Hum, Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H.

In this Thesis, The author examines the problem of Law Enforcement against criminal acts of children's neglected. The point of view in this thesis had found, there were many case of children's neglected in Bojonegoro and the center of service woman and children in bojonegoro district. In 2017 Bojonegoro had got reward as decent children district, of that the author want to examine as far as concern there were case of children neglected in bojonegoro resolved. Because of this the author do research about law enforcement to against criminal act of children neglected.

Based on the above, this thesis raises the problem such as : (1) how is law enforcement against criminal act of Children's Neglected at resort police bojonegoro district ? (2) how is the effort to enforce law against criminal act of children neglected in bojonegoro?

The Writing of this thesis, using empirical juridical method with sociological juridical and criminological juridical approach. Primary and secondary data has obtained by author will be analyzed using descriptive analysis technique.

By using the above method, the author was obtained the result of research contains law enforcement against criminal act of children neglected seen on the legal factor and non legal factor. Legal factor's involve legal substance factor, there are weakness on regulation of Child Protection Act and regulation of the elimination violence domestic act. Structure law factor is lack of knowledge investigators about protection children act, there is not coordination between Bojonegoro resort police and Bojonegoro social service and the centre of service woman and children in bojonegoro. Culture law factor is lack activeness of police do against criminal act of children neglected, low awareness about the law by parents on protection children act. Non legal factor include economic factor, family factor, and environmental factor. The effort of resolve is legal renewal, increasing the knowledge of investigations about protection children act, enhancing cooperation between police resort of bojonegoro, bojonegoro social service and the centre of service woman and children in bojonegoro. Raising awareness of law againsts parent, citizen about protection law act, enhancing economic quality to parents and poor economic citizen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum dan bukan *machtsstate* atau negara kekuasaan (*absolute state*), menandakan Indonesia mengedepankan hukum bukan absolutism dalam menjalankan roda pemerintahan.¹ Paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.²

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I (ayat 4) UUD 1945, yang menentukan bahwa : “perlindungan, pemajuan,

¹Jimly Assiddiqie, **Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi**, BIP, Jakarta, 2008, hlm 297.

²Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2009, hlm 37.

penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.”³

Salah satu hak asasi yang harus diakui dan dijamin perlindungannya oleh negara ialah hak asasi dalam bidang perlindungan hukum terhadap anak. Sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak semua pasal di rubah, namun hanya beberapa pasal yang dilakukan perubahan khususnya mengenai dengan pemberatan sanksi pidana dan denda, serta ditambahkan beberapa ayat-ayat baru yang mengatur lebih spesifik dalam perlindungan terhadap anak pada berbagai aspeknya.

Dalam konsideran Undang-undang Perlindungan Anak, dinyatakan: “anak merupakan amanah oleh karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu haruslah kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki

³Netty Endrawati, **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Universitas Islam, Kediri, 2012, hlm 271.

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa : “Anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.”⁵ Dan yang diartikan dengan “Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan guna menjamin serta melindungi Anak dan hak-haknya sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memiliki perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶

Prinsip perlindungan anak tersebut terdapat di dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak yang diciptakan oleh pemerintah agar hak-hak anak mampu diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah

⁴Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm 1.

⁵Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-undang Perlindungan Anak sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak belum terpenuhi seutuhnya. Hal ini dapat dilihat dari survey yang telah dilakukan di wilayah Bojonegoro.

Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan Luas Wilayah 2.307,06 km² dan terdiri atas 28 Kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 430 Desa dan 11 Kelurahan. Bojonegoro memiliki penduduk yang berjumlah 1.450.889 jiwa.⁷ Berdasarkan data dari Dinas Sosial Bojonegoro pada tahun 2017 jumlah penelantaran anak sebanyak 39 anak dari 283.753 anak yang ada di Bojonegoro atau 0,013% penelantaran anak.⁸

Tabel 1.1

Data Kasus Penelantaran Anak di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tahun 2012 s/d 2017

No.	Tahun	Penelantaran Anak	Jumlah Penduduk Usia 6-18 tahun	Persentase
1.	2012	5.653	276.739	2,042%
2.	2013	3.158	274.611	1,149%
3.	2014	2.260	274.242	0,824%
4.	2015	685	283.753	0,241%
5.	2016	633	283.753	0,223%
6.	2017	39	283.753	0,013%

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018

⁷Badan Pusat Statistik Bojonegoro.

⁸Hasil Pra Survey dari data rekapitulasi PMKS Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 11 Desember 2017.

Beberapa data dari Dinas Sosial di daerah lainnya, pada tahun 2016 di Kota Malang 0% (tidak ada) penelantaran anak.⁹ Sedangkan di Kota Surabaya pada tahun 2016 terdapat 1.059 penelantaran anak, jumlah penduduk usia 6-18 tahun di Kota Surabaya pada tahun 2016 berjumlah 435.775 anak, maka diketahui bahwa terjadi 0,243% kasus penelantaran anak di Kota Surabaya.¹⁰ Melihat dari data-data pembandingan antar daerah tersebut dapat kita ketahui, bahwa di daerah Bojonegoro rentan memiliki lebih banyak persentase kasus penelantaran anak dan hingga saat ini belum semua terselesaikan.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani permasalahan anak belum optimal, melihat masih ditemukan kasus penelantaran anak sehingga menjadi tidak dapat terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Sementara itu, penelantaran terhadap anak sebagai salah satu bentuk perlakuan salah yang terjadi pada anak, terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar. Masalah keterlantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial.

Anak-anak tersebut diantaranya ada yang dieksploitasi secara ekonomi menjadi anak jalanan, dieksploitasi secara seksual di tempat-tempat pelacuran, diperdagangkan, mengalami kekerasan, hingga anak-anak terlantar

⁹Badan Pusat Statistik Malang.

¹⁰Badan Pusat Statistik Surabaya

tersebut berhadapan dengan hukum, hal tersebut terjadi dikarenakan mereka tidak mendapatkan perhatian layaknya anak-anak seusia mereka. Fakta lain menunjukkan bahwa hak-hak anak terlantar secara umum tidak terpenuhi, yaitu hak pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya yang wajib mereka dapatkan sebagai layaknya seorang anak. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, Negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 34 ayat (1) UUD 1945 telah diartikan bahwa :

”Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Banyak yang diperlukan untuk mengubah lingkungan pemerintahan. Selain mengubah pikiran para sumber daya manusia yang berbeda pada setiap organisasi, perangkat hukum atau standar-standar kerja juga sebagai cara mendorong perubahan pola pikir yang meliputi standar-standar perencanaan, standar-standar pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.¹¹

“Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.¹² Dalam penanganan masalah anak terlantar negara juga mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah suatu hasil hubungan dari

¹¹M. Yusuf, **Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintah Daerah**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 135.

¹²Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

adanya interelasi antara fakta yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mengetahui timbulnya suatu perlindungan anak dimana baik atau yang buruk, maka kita harus memperhatikan fakta mana saja yang secara relevan, mempunyai peran sangat penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Dalam Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”¹³

Berdasarkan Pasal 77B Undang-undang Perlindungan Anak, sanksi yang bisa dikenakan bagi orang yang melanggar suatu ketentuan Pasal 76B yaitu sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁴ Perlakuan penelantaran dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Perlindungan Anak yaitu contoh tindakan ataupun perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban guna memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.¹⁵

Kemudian di dalam Pasal 5 Huruf (d) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur pula mengenai hal penelantaran, yang berbunyi sebagai berikut :

¹³Pasal 76B Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴Pasal 77B Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”¹⁶

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”¹⁷

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi yang bisa dikenakan bagi seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sanksi berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹⁸

Pengkajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak menjadi sangat penting, sebab keterlantaran anak mendorong terjadinya perlakuan salah yakni berupa eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, perdagangan anak, dan lain-lain.¹⁹ Seorang anak yang diterlantarkan, maka anak tersebut menjadi rawan akan mengalami hal-hal negatif diantaranya dieksploitasi secara ekonomi yaitu menjadi anak jalanan, dieksploitasi secara seksual yaitu diperdagangkan menjadi pekerja seks

¹⁶Pasal 5 Huruf (d) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁷Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸Pasal 49 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁹Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI, **Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan Social Work Reform**, makalah disajikan dalam Seminar Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan *Social Work Reform*, FISIP Universitas Indonesia, Depok, 27 September 2010, hlm 5.

dibawah umur, mengalami tindak kekerasan, diskriminasi, dan hal-hal negatif lainnya yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak seperti yang telah diamanatkan oleh Negara.

Sebenarnya anak-anak yang menjadi anak jalanan, pengemis, gelandangan, korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak dimana berhadapan dengan hukum serta anak yang dieksploitasi menjadi pekerja seks di tempat-tempat pelacuran adalah anak-anak akibat dari tindakan penelantaran. Dikarenakan penelantaran anak ini adalah akar dari hal-hal negatif lain yang terjadi pada anak, maka masalah penelantaran anak ini harus diperhatikan dan ditindaklanjuti agar tidak semakin banyak ditemukan anak yang menjadi korban perlakuan salah.

Mengingat pentingnya pengkajian mengenai penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak sebab keterlantaran anak mendorong terjadinya perlakuan salah, maka diperlukan upaya untuk menangani permasalahan tersebut.

Tabel 1.2

Orisinalitas Hasil Skripsi

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2017	Putu Sarasita Kismadewi (Fakultas Hukum Universitas Udayana)	Pertanggungjawaban pidana orang tua yang menelantarkan anaknya ditinjau dari Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	1. Bagaimana perlindungan hukum anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari Hukum Pidana? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya?	Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua pelaku penelantaran anak.
2.	2016	Ayu Nadia Maryandani (Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia	1. Bagaimanakah perlindungan hukum anak yang menjadi korban penelantaran oleh Orang Tua berdasarkan hukum pidana Indonesia? 2. Apa sajakah faktor penghambat perlindungan hukum anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya berdasarkan hukum pidana Indonesia?	Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum anak korban penelantaran orang tua dan apa faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung, Lembaga Perlindungan Anak Lampung
3.	2017	Sunandar.N. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar)	Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 2. Hal- hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak?	Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban orang tua yang melakukan penelantaran anak dan apa penyebab terjadinya penelantaran anak.

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018

Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro, serta bagaimana upaya dalam menangani kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro, guna menunjang hasil penelitian mengenai kasus Penelantaran Anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan ini lebih menyempurnakan penelitian terdahulu ditempat yang berbeda. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana upaya dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, ialah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak yang dilakukan Polres Kabupaten Bojonegoro, serta upaya Polres Kabupaten

Bojonegoro dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro.

b. Bagi Pemerintah :

Memberikan tambahan informasi dan salah satu solusi bagi pemerintah dalam tujuannya bahwa tidak mudah dalam menangani permasalahan perlindungan anak di Negara ini, melihat masih banyak di daerah-daerah khususnya daerah Kabupaten Bojonegoro yang setiap tahunnya selalu ditemukan kasus penelantaran terhadap anak hingga menyebabkan hilangnya hak-hak anak, tentunya Polres Kabupaten Bojonegoro mengalami suatu kendala atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran anak tersebut.

c. Bagi Masyarakat :

Memberikan pengetahuan umum dan informasi kepada masyarakat mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Bojonegoro dan diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perlindungan anak. Terkhusus kepada orang tua diharapkan dapat lebih sadar dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana kewajiban orang tua.

d. Bagi Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro :

Memberikan tambahan panduan serta bahan masukan, kritik, dan saran supaya dapat lebih aktif dan tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di wilayah kabupaten

Bojonegoro. Serta memberikan saran supaya lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak instansi/ dinas-dinas terkait khususnya Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban penelantaran.

- e. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro :

Diharapkan dapat memberikan masukan supaya lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan perlindungan anak korban penelantaran, serta diharapkan program-program kinerja yang dibentuk untuk ditingkatkan sehingga dapat membantu meminimalisir terjadinya kasus penelantaran anak di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan dari penulisan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teori-teori ilmiah yaitu sub bab pertama berisi Kajian Umum tentang Anak yang meliputi : Pengertian Anak, Hak-hak Anak, dan Kewajiban Anak. Sub bab kedua berisi Kajian Umum tentang Tindak Pidana yang meliputi : Definisi Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana,

Subyek Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana. Sub bab ketiga berisi Kajian Umum tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak yang meliputi : Pengertian Penelantaran Anak, Jenis-jenis Penelantaran Anak, Ciri-ciri Penelantaran Anak, Dampak Penelantaran Anak. Sub bab keempat berisi Kajian Umum tentang Penegakan Hukum yang meliputi : Pengertian Penegakan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Faktor-faktor Penegakan Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai delapan sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisikan laporan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya yang terdiri dari tiga sub bab yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Realita Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak, serta upaya dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam konsideran Undang-undang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa : “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.²⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-

²⁰Konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm 1.

undang Perlindungan Anak, jaminan hak anak dilindungi, bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka akan memperoleh berbagai macam batasan usia anak mengingat banyaknya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang, misal :

1. UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4/ 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.²¹

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

²¹Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 41.

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak, definisi anak yaitu: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-undang Perlindungan Anak memberikan definisi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²²

2. Hak-hak Anak

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri khas pada masing-masing anak. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak sendiri, tetapi lingkungan sekitar juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Oleh sebab itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, atau orang dewasa sangat dibutuhkan oleh anak bagi perkembangannya.²³

Pasal 16 ayat 3 Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.²⁴ DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk

²²*Ibid*, hlm 42.

²³Di dalam Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM)

semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 45 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”.²⁵ Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam konstitusi, maka dapat diartikan kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal²⁶ yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-

²⁵Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

²⁶UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam Pasal 52-66.

hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Undang-undang Perlindungan Anak merupakan suatu bentuk konkretisasi dari pelaksanaan konvensi hak-hak anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan peratifikasian konvensi hak-hak anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak/KHA), maka sejak saat itu Indonesia telah terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang tertulis dalam konvensi hak-hak anak.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak yang secara umum dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :²⁷

a) Hak kelangsungan hidup (*The Right to Survival*), yakni hak-hak melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) serta hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa :

- 1) Hak anak demi mendapatkan nama serta kewarganegaraan sejak dilahirkan;
- 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
- 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);

²⁷Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, loc.cit. hlm 35.

- 4) Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;
- 5) Hak anak untuk menikmati kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab orang tua, kewajiban negara untuk memenuhi hak anak tersebut;
- 6) Hak anak atas pendidikan serta kewajiban negara guna menjamin agar pendidikan dasar diperoleh secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- 9) Kewajiban Negara untuk melakukan segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), yaitu hak-hak didalam konvensi hak anak dimana meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, suatu tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terbagi atas 3 (tiga) kategori, yakni :

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala

bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari ketertiban dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), yakni hak-hak anak didalam Konvensi Hak-hak Anak dimana meliputi semua bentuk pendidikan (formal dan nonformal) serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu :

- 1) Hak guna memperoleh informasi (*the rights to information*);
- 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
- 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*);
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
- 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);

9) Hak untuk di dengar pendapatnya (*the rights to be heard*);

10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).

d) Hak guna berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak dimana meliputi suatu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal dimana mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak guna berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain :

“Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi; Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung; Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.”

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia sendiri secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :²⁸

- 1) Setiap anak berhak guna dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta juga mempunyai perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

²⁸Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4-Pasal 18.

- 5) Semua anak berhak mendapat suatu pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan juga sosial.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Bagi anak yang dalam penyandang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan mendapatkan informasi sesuai tingkat kecerdasan serta usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 12) Setiap anak berhak guna diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang secara sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kepentingan terbaik bagi anak dan juga merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Setiap anak berhak memiliki perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, ataupun penjatuan hukuman yang tidak secara manusiawi.
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 16) Penangkapan, penahanan, ataupun tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku serta hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 17) Semua anak dimana dirampas kebebasannya berhak guna : memperoleh perlakuan secara manusiawi serta penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum ataupun bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela

diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk secara umum.

- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.²⁹ Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak berpredikat “anak yang baik”.³⁰ Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara:³¹

- a) menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena Ayah dan Ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.³² Kewajiban anak

²⁹Kewajiban berasal dari kata “wajib” mendapat awalan “ke” dan akhiran “-an”, yang artinya mesti diamalkan (dilakukan), perlu atau tak boleh tidak, harus, ataupun sudah sepatutnya harus dilakukan. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 1359.

³⁰Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 26.

³¹Pasal 19 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menghormati guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup bersama senasib sepenanggungan. Hal-hal ini menurut Setya Wahyudi yang menjadikan semua untuk wajib mencintai tanah air, bangsa dan negara.³² Anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.

³²Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm 26.

³³Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm 27.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.³⁴

B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Sebelum membahas tindak pidana, terlebih dahulu dirumuskan definisi dari pidana itu sendiri. Beberapa ahli mengemukakan definisi dari pidana, diantaranya :

1. Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang tertentu yang melakukan suatu perbuatan dimana yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Roeslan Saleh, pidana merupakan sebuah reaksi atas delik, serta ini berwujud suatu nestapa yang diperoleh secara sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.

³⁴M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 24.

3. Masruchin Ruba'i, pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan oleh Negara kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

Selanjutnya, definisi hukum pidana menurut Meszger adalah sebagai aturan hukum, yang mengkaitkan kepada suatu perbuatan dimana yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, yakni :

- a) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; dan
- b) Pidana.

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang memungkinkan dijatuhi pidana. Perbuatan tersebut secara singkat disebut “perbuatan yang bisa dipidana”. Untuk penjatuhan pidana diperlukan adanya perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan larangan itu.³⁵ Jadi, tindak pidana adalah suatu perbuatan dimana dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*” yang memiliki arti suatu tindakan atau perbuatan dimana diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Ada banyak istilah lain untuk tindak pidana yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, antara lain :

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;

³⁵Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001, hlm.1.

3. Pelanggaran pidana; dan
4. Perbuatan yang dapat dihukum.³⁶

Dari uraian di atas dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan istilah “tindak pidana”. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman ancaman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.³⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Asas legalitas sampai saat ini tetap dipertahankan sebagai asas dimana sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi serta pengembangan.³⁸ Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya tersebut tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana itu membawa konsekuensi terhadap dakwaan atas tindak pidana tersebut adalah tidak terbukti.

Unsur-unsur Subjektif³⁹ dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.

³⁶Masruchin Ruba'i, **Op Cit**, hlm. 21.

³⁷Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

³⁸Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 88.

³⁹Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya yakni terdapat didalam kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁴⁰

Unsur- unsur Objektif⁴¹ dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku, contohnya “keadaan seorang dimana sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan yang menggunakan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus ataupun komisaris dari sebuah perseroan terbatas” di dalam kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu suatu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai hasil penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴²

3. Subyek Tindak Pidana

Subyek tindak pidana pada kasus perkosaan yakni manusia (*natuurlijke personen*). Wirjono Prodjodikoro menyebutkan

⁴⁰P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193.

⁴¹Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

⁴²P.A.F. Lamintang, **Op Cit**, hlm. 194.

bahwa,⁴³ dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum pidana terbagi atas beberapa delik, diantaranya :

a. Penggolongan jenis-jenis delik didalam KUHP, terdiri dari kejahatan (*misdrifven*) serta pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan untuk kejahatan disusun didalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun didalam Buku III KUHP.⁴⁴

b. Perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan dimana dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya.

c. Delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*)

Delik komisi merupakan delik dimana berupa pelanggaran terhadap larangan, yakni berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan, Delik omisi merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yakni tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan.

d. Tindak pidana yang dibedakan terdiri atas tindak pidana kesengajaan serta tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*);

⁴³Wirjono Prodjodikoro, **Op Cit**, hlm. 60.

⁴⁴Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm 95.

- e. Perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda. Yang pertama adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali saja perbuatan tersebut. Yang kedua yakni delik yang untuk kualifikasinya terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatannya.
- f. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus dan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa tindakan yang terlarang itu secara berlangsung terus. Sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus.
- g. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak dimana terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa merupakan terjadinya suatu perbuatan dimana tidak perlu terdapat pengaduan, melainkan laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan.
- h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasi
- Delik biasa merupakan suatu bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok dimana ditambah dengan adanya suatu unsur pemberat, sehingga ancaman pidanya menjadi diperberat.⁴⁵

⁴⁵Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 101.

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak

1. Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran berasal dari kata *lantar* yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.⁴⁶ Pengertian penelantaran anak merupakan sikap dan juga perlakuan orang tua yang tidak mendapatkan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.⁴⁷ Di dalam Pemamparan Pasal 13 Ayat (1) pada Huruf c Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa :

“Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.”⁴⁸

Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, luka atau penyakit yang dibiarkan tidak diobati, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan serta perkembangan

⁴⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 564.

⁴⁷Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 55.

⁴⁸Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak. Serta anak-anak dimana tidak diasuh dan dirawat sebagaimana mestinya.⁴⁹

Penelantaran anak (*child neglect*) yang merupakan suatu bentuk dari penganiayaan (*maltreatment*) terhadap anak. Penelantaran anak ini memang jarang diketahui oleh orang lain dan kurang diketahui dari pada *child abuse*. Adapun yang membedakan antara *child abuse* dengan *child neglect* yakni perilaku *abusive* dapat meninggalkan luka atau memar, sedangkan dampak dari *child neglect* cenderung tidak tampak. Pengaruh buruk yang muncul akibat adanya penelantaran terhadap anak ini, yakni dapat mengganggu perkembangan otak anak.

Pengabaian (*neglect*) diartikan sebagai jenis penganiayaan dimana mengacu kepada kegagalan oleh pengasuh guna memberikan yang diperlukan, perawatan dimana sesuai dengan umur meski secara finansial dapat melakukannya ataupun ditawarkan berarti keuangan atau lainnya untuk melakukannya. Pengabaian adalah kegagalan oleh orang tua dalam memberikan kebutuhan yang sesuai oleh anak, contohnya tidak memberikan rumah yang aman, makanan, pakaian, pengobatan, dan meninggalkan anak sendirian ataupun dengan seseorang yang tidak dapat merawatnya. Pengabaian biasanya ditandai oleh pola berkelanjutan perawatan yang tidak memadai dan mudah diamati oleh individu dalam kontak dekat dengan anak. Dokter, perawat, hari perawatan personel, kerabat dan tetangga yang sering mencurigai dan melaporkan pengabaian pada bayi, balita dan anak-anak preschoolaged. Setelah anak-anak di

⁴⁹ Abu Huraerah, **Op.cit**, hlm 56.

sekolah, personil sekolah sering memperhatikan indikator mengabaikan anak seperti kebersihan yang buruk, berat badan yang buruk, perawatan medis yang tidak memadai atau sering absen dari sekolah.⁵⁰

Dari literatur Internasional, keterlantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Keterlantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. Keterlantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidaktahuan keluarga/ orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal.

Seorang anak dapat dikatakan terlantar bukan karena dirinya telah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhinya karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.

Dibandingkan anak yang dijadikan sebagai korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran kerap kali kurang mendapat perhatian oleh publik secara serius karena itu penderitaan yang dialami korban tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik, sebagaimana anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak

⁵⁰ *Ibid*, hlm 57.

yang dianiaya oleh orang tuanya hingga tewas, atau anak yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi, masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah intern keluarga per keluarga, hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah, tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian publik secara lebih serius tatkala korban-korban tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak, dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak.⁵¹

2. Jenis-jenis Penelantaran Anak

a. *Physical Neglect* (Penelantaran Fisik)

Penelantaran fisik pada umumnya melibatkan antara lain orang tua ataupun pengasuh dimana tidak memberikan suatu kebutuhan dasar terhadap anak (contohnya, makanan pakaian yang memadai serta tempat tinggal). Kegagalan ataupun penolakan guna menyediakan kebutuhan membahayakan kesehatan fisik anak, kesejahteraan, pertumbuhan psikologis serta perkembangan.

Penelantaran fisik sendiri termasuk meninggalkan anak sendiri, pengawasan tidak memadai, penolakan pada anak yang mengarah kepada pengusiran dari rumahnya serta kegagalan untuk secara memadai menyediakan keselamatan anak serta kebutuhan fisik dan emosional. Penelantaran fisik yang parah dapat timbul berdampak pada perkembangan anak dengan menyebabkan gagal tumbuh, gizi buruk, penyakit serius, kerusakan fisik berupa luka, memar, luka bakar atau

⁵¹ *Ibid*, hlm 58.

cedera lainnya karena kurangnya pengawasan, dan harga diri yang rendah.

b. *Educational Neglect* (Penelantaran Pendidikan)

Penelantaran pendidikan tersebut melibatkan kegagalan dari orang tua ataupun pengasuh guna mendaftarkan seorang anak usia sekolah wajiblah di sekolah ataupun menyediakan *home schooling* yang sesuai ataupun dibutuhkan pelatihan pendidikan khusus, sehingga mampu memungkinkan anak ataupun pemuda guna tidak terlibat dalam kebiasaan membolos. Penelantaran pendidikan dapat menyebabkan anak gagal untuk memperoleh keterampilan hidup dasar, putus sekolah ataupun terus menampilkan perilaku yang dianggap mengganggu. Penelantaran pendidikan mampu menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan anak, kesejahteraan emosional, fisik ataupun pertumbuhan psikologis normal serta perkembangan, terutama ketika anak memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang tidak terpenuhi.

c. *Psychological Neglect Emotional* (Penelantaran Psikologi Emosional)

Penelantaran psikologi serta emosional meliputi tindakan yakni terlibat dalam suatu pertengkaran orang tua dimana sangat ekstrim di hadapan anaknya, dapat memungkinkan seorang anak guna menggunakan obat-obatan ataupun alkohol, menolak atau gagal untuk menyediakan membutuhkan perawatan psikologis secara terus-menerus meremehkan pemberian kasih sayang. Perilaku orang tua dimana dianggap menelantarkan anak secara emosional meliputi :

- 1) Mengabaikan (kegagalan konsisten guna merespon kebutuhan oleh anak untuk melakukan stimulasi, merawat, dorongan serta perlindungan ataupun kegagalan guna mengakui keberadaan anak);
- 2) Menolak (aktif menolak untuk menanggapi kebutuhan anak, misalnya: menolak untuk menunjukkan kasih sayang);
- 3) Menghina secara verbal (meremehkan atau mengancam);
- 4) Mengisolasi(mencegah anak dari mempunyai kontak sosial yang normal dengan anak-anak lain serta orang dewasa);
- 5) Meneror (mengancam anak dengan hukuman ekstrim ataupun dapat menciptakan iklim teror dengan memainkan ketakutan pada masa kanak-kanak); dan
- 6) Kerusakan ataupun pemanfaatan (mendorong anak guna terlibat dalam perilaku merusak, ilegal ataupun antisosial).

Sebuah pola perilaku orang tua dapat menyebabkan citra diri dimana rendah pada anak, melakukan penyalahgunaan narkoba ataupun alkohol, perilaku yang dapat merusak hingga bunuh diri. Yang lebih parah yaitu mengabaikan stimulasi serta perawatan kebutuhan bayi bisa menyebabkan bayi gagal guna berkembang serta bahkan menyebabkan kematian bayi.

d. *Medical Neglect* (Penelantaran Medis)

Penelantaran medis atau penelantaran perawatan kesehatan yakni kegagalan guna menyediakan perawatan kesehatan dimana bagi anak (walaupun secara finansial bisa melakukannya), sehingga itu menempatkan anak beresiko cacat ataupun mati. Menurut NCANDS,

pada tahun 2005, 2 % anak-anak (17.637 anak-anak) di Amerika Serikat menjadi korban dari kelalaian medis. Penelantaran tidak hanya ketika orangtua menolak perawatan medis untuk anak, tetapi juga saat orangtua dapat mengabaikan rekomendasi oleh medis guna anak dengan penyakit kronis dimana seharusnya dapat diobati, akan tetapi malah terjadi kecacatan terhadap anak. Bahkan didalam situasi non-darurat, penelantaran medis bisa mengakibatkan kesehatan secara keseluruhan dapat semakin memburuk. Orangtua mungkin menolak perawatan medis untuk anak-anak mereka untuk alasan yang berbeda, seperti agama atau keyakinan, ketakutan atau kecemasan tentang kondisi medis atau perawatan dan masalah keuangan. Lembaga perlindungan anak umumnya akan campur tangan apabila :

- 1) Perawatan medis sangat dibutuhkan dalam suatu keadaan darurat (contohnya, seorang anak perlu transfusi darah guna mengobati *shock*);
- 2) Seorang anak terhadap penyakit kronis yang bisa mengancam nyawa tetapi tidak bisa mendapatka perawatan medis dibutuhkan (contohnya, anak dengan diabetes tidak menerima obat-obatan);
- 3) Seorang anak memiliki penyakit kronis yang bisa menyebabkan kecacatan atau kematian jika tidak secara langsung segera ditangani (misalnya, anak dengan katarak bawaan haruslah dioperasi untuk mencegah kebutaan).

Dalam hal ini, jasa lembaga perlindungan anak mampu mencari perintah pengadilan guna perawatan medis untuk menyelamatkan

nyawa anak ataupun mencegah timbulnya cedera yang dapat mengancam nyawa, atau kecacatan.

Meskipun penelantaran secara medis sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidakmampuan seorang pengasuh guna mendapatkan perawatan yang diperlukan yaitu: kurangnya sumber daya keuangan, keengganan pengasuh guna mengetahui perawatan itu sendiri serta penolakan untuk menyediakan sebuah perawatan. Anak-anak dan juga keluarga mereka mungkin memerlukan pelayanan meskipun orang tua mungkin tidak secara sengaja lalai. Ketika kemiskinan membatasi sumber daya orangtua guna menyediakan kebutuhan bagi anak, ada lembaga yang menawarkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut.

Alfred Kadushin yang dikutip oleh Charles Zastrow, mengemukakan tentang jenis-jenis penelantaran anak sebagai berikut :

- 1) Perlakuan yang kasar terhadap fisik, artinya anak tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang
- 2) Kekurangan gizi, kekurangan pakaian, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, tidak mendapatkan perhatian atau pengawasan, gagal untuk tumbuh dan berkembang secara wajar
- 3) Penelantaran pemeliharaan kesehatan
- 4) Kegagalan mengikuti sekolah
- 5) Pemasakan terhadap anak dan anak dibebani pekerjaan yang terlalu berat

- 6) Anak dalam lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung kearah perkembangan
- 7) Penyalahgunaan seksual
- 8) Perlakuan salah dan keterlantaran emosional melibatkan pengingkaran terhadap perkembangan anak secara normal bahwa anak patut untuk merasakan dicintai, diinginkan dan dilindungi serta dihormati hak-haknya.

Jenis-jenis keterlantaran tersebut mungkin hanya sebagian saja ada pada seorang anak, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pada seorang anak dengan jenis yang lebih dari satu. Anak-anak dengan jenis keterlantaran yang lebih dari satu ini lebih memerlukan pelayanan sosial yang menyeluruh atau bervariasi. Peranan orang tua dan keluarga dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat diabaikan karena anak sangat tergantung pada orang tuanya. Keluarga menjadi pihak pertama dan utama dalam memperkenalkan dan mengantarkan anak dalam kehidupan bermasyarakat karena keluarga merupakan tempat sosialisasi yang utama dan pertama bagi anak. Kondisi dan perubahan tingkah laku anak dalam fase perkembangan sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan lingkungannya.⁵²

3. Ciri-ciri Penelantaran Anak

Ciri-ciri umum anak yang mengalami tindak penelantaran antara lain :

- a. Usia 5-18 tahun dan belum menikah.

⁵² Abu Huraerah, **Op.cit**, hlm 59-64.

- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan)
- c. Tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap / lontang lantung (untuk usia 15 s/d 18 tahun).
- d. Pendidikan yang tidak memadai, sering absen / tidak masuk sekolah
- e. Menunjukkan sebuah perubahan tingkah laku serta keahlian belajar di sekolah
- f. Tidak mendapat bantuan guna mengatasi masalah fisik serta kesehatan yang menjadi perhatian orang tua
- g. Tidak terpenuhinya suatu perawatan medis, gigi maupun perawatan mata atau lainnya.
- h. Memiliki gangguan belajar ataupun sulit berkonsentrasi dimana tidak merupakan akibat dari masalah fisik ataupun psikologis tertentu
- i. Kurang mendapatkan pengarahan orang dewasa
- j. Selalu pasif, mengeluh atau menghindar
- k. Orang tua dan juga anak jarang bersentuhan fisik serta bertatap muka
- l. Mengungkapkan bahwa tidak terdapat seorangpun di dalam rumah yang merawatnya
- m. Meminta-minta / mencuri uang dan makanan
- n. Mengonsumsi alkohol dan obat terlarang

Keterlantaran pada anak secara fisik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Penampilan fisik dirinya sering dalam kondisi kotor dan berbau
- b. Tingkat kesehatan yang rendah

- c. Tidak berpakaian yang sewajarnya atau secukupnya

Ciri-ciri tersebut secara umum dimiliki oleh anak-anak yang mengalami penelantaran. Kondisi anak yang demikian menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh kesejahteraan, yang seharusnya merupakan sebuah hak dimana melekat pada setiap anak.

Ciri-ciri orang tua yang melakukan penelantaran terhadap anak ialah :

- a. Orang tua mengacuhkan atau tidak mempedulikan anak
- b. Menunjukkan sikap apatis dan depresi
- c. Perilaku tidak rasional serta berlebihan
- d. Menuntut tingkat kemampuan fisik akademik yang tak terjangkau oleh anak
- e. Kurangnya pemberian perhatian serta pengarahan pada anak
- f. Kebutuhan emosional guna memperoleh perhatian serta perawatan
- g. Menganggap seorang anak sebagai anak yang nakal, tidak berguna dan susah di atur.⁵³

Sedangkan Dinas Sosial mengatur mengenai bentuk penelantaran anak, yaitu :

- a. Berasal dari keluarga fakir miskin
- b. Anak yang mengalami perlakuan salah (KDRT)
- c. Diterlantarkan oleh orang tua/ keluarga
- d. Anak kehilangan hak asuh oleh orang tua/ keluarga
- e. Anak yang tidak pernah sekolah/ tidak sekolah lagi dan tidak tamat

SMP

⁵³*Ibid*, hlm 59.

- f. Makan makanan pokok kurang dari 2x sehari
- g. Mempunyai pakaian hanya kurang dari 4 stel layak pakai
- h. Bila sakit tidak diobati
- i. Yatim, piatu, yatim piatu
- j. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
- k. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.⁵⁴

4. Dampak Penelantaran Anak

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya penelantaran anak dapat timbul dalam berbagai aspek yakni :

a. Dampak Penelantaran anak bagi anak

Keterlantaran bagi seseorang anak akan memiliki dampak atau akibat sebagai berikut :

- 1) Anak akan menjadi rendah diri atau sebaliknya akan bersikap agresif (nakal). Penyebabnya adalah anak kurang memperoleh kasih sayang secara memadai
- 2) Anak terancam menjadi generasi yang tidak berkualitas secara intelektual dan personal. Penyebabnya adalah anak kurang memperoleh bekal pendidikan formal secara memadai
- 3) Secara fisik anak cenderung lemah dan rentan terhadap serangan penyakit yang mengakibatkan pertumbuhan fisik anak dibawah rata-rata. Penyebabnya adalah anak kurang memperoleh asupan makanan yang cukup baik kuantitas maupun kualitas (makanan kurang bergizi).

⁵⁴Buku Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

b. Dampak Penelantaran anak bagi masyarakat

- 1) Keterlantaran anak dapat menimbulkan perilaku menyimpang seperti terjadinya berbagai bentuk tindak kenakalan yang mengganggu ketenangan lingkungan
- 2) Keterlantaran anak dapat mendorong anak menjadi anak-anak jalanan yang mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Bahkan dalam beberapa kasus perilaku anak jalanan menjurus pada perbuatan kriminal
- 3) Keterlantaran anak dapat menjadi indikator terjadinya kasus-kasus disharmoni dalam banyak keluarga di masyarakat
- 4) Anak yang diterlantarkan dapat menjadi sumber terjadinya perilaku yang cenderung mengganggu ketenangan masyarakat.

c. Dampak Penelantaran anak bagi pemerintah dan pembangunan

- 1) Keterlantaran anak dapat menjadi indikator kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah
- 2) Keterlantaran anak menyebabkan beban pemerintah menjadi lebih berat
- 3) Anak terlantar dalam jangka panjang dapat menjadi beban bagi pembangunan
- 4) Anak terlantar identik dengan kebutuhan subsidi pembangunan dalam banyak aspek
- 5) Anak terlantar dalam jangka panjang dapat menjadi pemicu kerawanan stabilitas

- 6) Anak terlantar dalam jangka panjang dapat menjadi sumber penghambat laju pembangunan
- 7) Keterlantaran anak dapat menjadi tolok ukur gagalnya penerapan kebijakan politik.⁵⁵

D. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau yang disebut dengan istilah *law enforcement* merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai dimana terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang benar serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum sebagai suatu kaidah di dalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang memuat anjuran, larangan, dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana kontrol sosial dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat.⁵⁶

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya yakni penegakan ide-ide ataupun konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial serta sebagainya. Sehingga penegakan hukum sebuah

⁵⁵Maulana Hasan Wadong, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Grassindo, Jakarta, 2000, hlm 41.

⁵⁶Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 12.

usaha guna mewujudkan ide serta konsep-konsep tadi sehingga menjadi kenyataan.⁵⁷

Mekanisme penegakan oleh petugas hukum harus berorientasi pada tujuan bahwa menyelenggarakan hukum sebagai suatu instrument dari tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan kepentingan individu harus dalam rangka suatu sistem tertib sosial.⁵⁸

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

a. Dilihat dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, sebuah proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum terhadap setiap hubungan hukum. Siapa saja dimana menjalankan aturan normatif ataupun melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dengan berdasar diri kepada norma peraturan hukum yang berlaku, berarti dirinya menjalankan ataupun menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai sebuah usaha aparaturnya penegakan hukum tertentu guna menjamin serta memastikan bahwa peraturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Dilihat dari sudut obyeknya, yakni dari segi hukumnya

Dalam arti secara luas, penegakan hukum dimana mencakup kepada suatu nilai-nilai keadilan dimana didalamnya ada atau terkandung

⁵⁷Satjipto Rahardjo, **Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosial)**, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm 18.

⁵⁸Bambang Poernomo, **Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 97.

bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada didalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan bentuknya tertulis.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu suatu usaha guna mewujudkan suatu ide-ide keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial sehingga menjadi *real*. sehingga penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide.

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*), tetapi diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum (*legal structure*) dan didukung oleh perilaku hukum atau kultur hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini dikatakan sebagai susunan sistem hukum *three element of legal system* oleh Lawrence M. Friedman, antara lain:⁵⁹

1. Struktur

Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

2. Substansi

⁵⁹Darmono, **Pengeyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum**, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, hlm 19.

Sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

3. Kultur

Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch hakim dalam menegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu:⁶⁰

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu hal yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih menaati aturan hukum tersebut.
2. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
3. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan

⁶⁰Fence Wantu, **Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)**, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 75.

(*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

Ketiga komponen penegakan hukum di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri, yaitu struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan (*wholeness*). Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses. Berdasarkan kriteria kedekatan itu, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum yakni antara lain aparat kepolisian, Kejaksaan, pengadilan serta masyarakat. Dalam hal tersebut penerapan hukum seharusnya dilihat dari 3 dimensi antara lain :

1. Penerapan hukum dilihat sebagai sistem normatif (*normative system*) merupakan suatu penerapan keseluruhan aturan hukum dimana menggambarkan suatu nilai-nilai sosial dimana didukung oleh sanksi pidana
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) dimana mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum dimana merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana suatu sistem sosial (*social system*), bahwa mengartikan sebuah tindak pidana seharusnya pula melihat berbagai perspektif pemikiran yang terdapat dalam lapisan masyarakat.⁶¹

⁶¹Satjipto Rahardjo, **Op.cit**, hlm 14-18.

Walter C. Reckless, menyatakan bahwa penegakan hukum seharusnya dilihat bagaimana suatu sistem serta organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanannya dan bagaimana birokrasinya.⁶²

3. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suatu penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yakni :⁶³

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan suatu kebijakan ataupun tindakan yang tidaklah sepenuhnya berdasarkan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga terdapat *peaces maintenance*, dikarenakan penyelenggaraan hukum sesungguhnya adalah sebuah proses penyerasian antara nilai kaedah serta pola perilaku nyata yang bertujuan guna mencapai kedamaian

b. Faktor Penegak Hukum

Kepribadian petugas penegak hukum dala memainkan suatu peranan penting, apabila peraturan yang telah baik, namun kualitas petugas kurang baik. Oleh karena itu salah satu kunci sebuah keberhasilan didalam penegakan hukum merupakan mentalitas dan kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

⁶²Walter C.Reckless dalam Bambang Sutiyono, **Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi (Paaparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Sebagainya**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 58.

⁶³Soerjono Soekanto, **Op.cit**, hlm. 42.

Faktor sarana ataupun fasilitas pendukung lainnya mencakup perangkat lunak serta perangkat keras, salah satu misal perangkat lunak merupakan pendidikan. Pendidikan yang dapat diterima oleh penegak hukum yakni cenderung praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal penegak hukum mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya merupakan pengetahuan tentang tindak pidana kejahatan komputer.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum yang berasal dari unsur masyarakat dan bertujuan guna mencapai kedamaian didalam masyarakat. semua masyarakat ataupun kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan dimana timbul adalah taraf kepatuhan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki fungsi yang sangat besar bagi umat manusia serta masyarakat, yakni mengatur agar manusia bisa mengerti bagaimana seharusnya bertingkah laku, berbuat serta menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan masyarakat lain. Dengan demikianlah, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang tingkah yang menetapkan peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dan yang dilarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.⁶⁴ Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶⁵

Penelitian ilmiah adalah salah satu sarana utama untuk mewujudkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga dengan penelitian hukum. Skripsi sebagai salah satu jenis penelitian ilmiah haruslah menggunakan metodologi, karena penggunaan suatu metodologi adalah ciri khas yang tidak bisa ditinggalkan dari suatu penelitian.⁶⁶ Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini dapat menggunakan metode antara lain :

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (*empiric legal research*). Penelitian hukum empiris menerapkan studi kasus hukum empiris yakni perilaku hukum masyarakat.⁶⁷ Yuridis-empiris adalah penelitian dimana ditinjau oleh aspek hukum, yakni internalisasi hukum

⁶⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I Cetakan 10**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 6.

⁶⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi pustaka, Jakarta, 1997, hlm 1.

⁶⁶Poedjawijatna, **Tahu dan Pengetahuan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 25.

⁶⁷Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 40.

dalam pranata sosial, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan.⁶⁸ Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁶⁹

Adapun alasan dilakukannya penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini ialah mendeskripsikan secara obyektif mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro, serta upaya Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang maupun interaksi antar mereka, penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).⁷⁰ Serta pendekatan yuridis kriminologis, yakni penelitian dimana menekankan kepada ilmu hukum (yuridis), dengan melakukan kajian serta

⁶⁸Bartimeus Tondy, **Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 27.

⁶⁹Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 54.

⁷⁰Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 19.

penelaahan terhadap kaidah-kaidah dimana berlaku dalam masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.⁷¹

Berdasarkan metode pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis kriminologis, maka penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro, serta upaya Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan wilayah Bojonegoro memiliki persentase kasus penelantaran anak yang cukup tinggi di beberapa wilayah kecamatan Bojonegoro, dibandingkan dengan wilayah Surabaya dan Malang yang jumlah penduduknya lebih banyak, namun kasus penelantaran anak lebih sedikit.⁷² Serta melihat bahwa Kabupaten Bojonegoro dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2017 yang siap menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Kabupaten Bojonegoro adalah bertolak belakang.⁷³ Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang diperoleh pada saat Survey.

⁷¹Ronny Hanitjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 35.

⁷²Hasil Survey dari data rekapitulasi PMKS Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

⁷³Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih (Kepala Bidang Bimb. Ressos & Peningkatan Ressos), pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

Tabel 3.1

Data Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro
pada tahun 2012 s/d 2017

No.	Tahun	Penelantaran Anak			Jumlah Penduduk Umur 6-18 tahun	Persentase
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	2012	2.940	2.713	5.653	276.739	2,042%
2.	2013	1.402	1.756	3.158	274.611	1,149%
3.	2014	1.008	1.252	2.260	274.242	0,824%
4.	2015	398	287	685	283.753	0,241%
5.	2016	379	254	633	283.753	0,223%
6.	2017	27	12	39	283.753	0,013%

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung didapat hasil penelitian lapangan (*Field Research*), yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) secara langsung dengan responden⁷⁴.

Data primer dalam penelitian ini adalah terdiri atas data yang diperoleh dari narasumber dari studi yang dilaksanakan di lokasi penelitian yang mana lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Kabupaten

⁷⁴Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106.

Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur dimana sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁷⁵ Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁷⁶

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- a. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- b. Pasal 58 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- c. Pasal 13 ayat 1 (huruf c), Pasal 71 ayat (2), Pasal 77 huruf (b) Undang-undang Perlindungan Anak,
- d. Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-undang Perlindungan Anak,
- e. Pasal 5 huruf (d), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Dokumen, catatan resmi dan laporan yaitu :
 - 1) Data Rekapitulasi Kasus yang ditangani sejawaran Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2017,

⁷⁵Burham Bungim, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 46.

⁷⁶*Ibid.*, hlm 12.

- 2) Laporan Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tahun 2012-2016,
- 3) Data Kasus Penelantaran Anak dari Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro tahun 2012-2016,
- 4) Dokumen dari Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro,
- g. Berbagai buku dan literatur, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah, serta informasi hukum yang berasal dari website.

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, perolehan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan untuk memperoleh data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah cara yang dapat digunakan guna memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain guna diagnosa serta treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.

Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan guna mengumpulkan sebuah keterangan mengenai kehidupan manusia dan pendapat-pendapat mereka.

Dalam suatu wawancara ada dua pihak yang memiliki sebuah kedudukan berbeda yakni pengejar informasi yang secara biasa disebut pewawancara ataupun interviewer serta pemberi informasi yang biasa disebut informan, atau responden. kedua pihak yang berhadapan secara fisik. Dengan kemajuan teknologi dimungkinkan pula suatu wawancara yang dilakukan melalui hubungan telepon, tetapi cara ini sangat jarang dilakukan karena reaksi-reaksi seseorang lebih sukar ditangkap dibandingkan bila berhadapan langsung dengan orang yang kita wawancarai. Dari segi jumlah orang yang diwawancarai dapat hanya satu orang seperti yang umumnya dilakukan dan dapat pula sekaligus dengan sekelompok orang.

Dalam penerapannya wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana pelengkap apabila yang digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain. Sedangkan sarana penguji yaitu apabila digunakan untuk menguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh dengan cara lain.⁷⁷

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan pada responden yaitu 2 orang pegawai Polres Kabupaten Bojonegoro Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), 3 orang pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang menangani terkait penelantaran anak, 1 orang pegawai Pusat Pelayanan Perempuan &

⁷⁷Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95-96.

Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro, 10 Orang Tua yang melakukan penelantaran anak dan 5 Anak yang diterlantarkan oleh orang tua di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.⁷⁸ Studi kepustakaan ini melakukan studi *literature* dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisa penelitian. Studi Kepustakaan dilakukan di Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Kota Malang.

F. Populasi, Sampel dan Responden

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.⁷⁹

Populasi didalam penelitian ini merupakan seluruh pegawai Polres Kabupaten Bojonegoro Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),

⁷⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21.

⁷⁹ Ronny Hanitijo Soemito, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 40.

seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, seluruh pegawai Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro, seluruh Orang Tua yang melakukan penelantaran anak di Kabupaten Bojonegoro, dan seluruh Anak yang diterlantarkan oleh orang tua di Kabupaten Bojonegoro.

b) Sampel

Sampel adalah keseluruhan sebagian individu yang diselidiki atau diteliti untuk dijadikan sumber pengambilan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁸⁰ Teknik sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 2 orang pegawai Polres Kabupaten Bojonegoro Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), 3 orang pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang menangani terkait penelantaran anak, 1 orang pegawai Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro, 10 Orang Tua yang melakukan penelantaran anak di Kabupaten Bojonegoro dan 5 Anak yang diterlantarkan oleh orang tua di Kabupaten Bojonegoro.

c) Responden

Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta di lapangan.⁸¹

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Pegawai Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro :

⁸⁰Marzuki, **Metodologi Riset**, BPFE, Jogjakarta, 1977, hlm 22.

⁸¹*Ibid*, hlm 23.

- a. Bapak Aiptu Kasdi, SH selaku Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
- b. Bripka Sunarsih selaku anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

2. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro :

- a. Ibu Dra. Dwi Hariningsih, selaku Kepala Bidang Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Rehabilitasi Sosial.
- b. Ibu Mamsuhah, S.Sos, selaku pegawai Sie Pendataan, Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Sie Kesejahteraan Sosial.
- c. Bapak Doni, selaku Sie Pendataan, Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Sie Kesejahteraan Sosial.

3. Pegawai Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro yaitu : Ibu Dra. Mahfudloh Suyoto, Msi selaku Ketua Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A)

4. 10 Orang Tua yang pernah melakukan tindakan penelantaran anak di Kabupaten Bojonegoro :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Bapak YS dan Ibu YN | f. Bapak AP dan Ibu SK |
| b. Bapak PS | g. Ibu WW |
| c. Ibu LM | h. Ibu VK |
| d. Ibu SL | i. Bapak HR dan Ibu JM |
| e. Ibu IW | j. Ibu SL |

5. 5 Anak yang pernah diterlantarkan oleh orang tua di Kabupaten Bojonegoro :

- | | |
|------------------|------------------|
| a. AG (14 tahun) | d. BA (13 tahun) |
|------------------|------------------|

b. WK (11 tahun)

e. MA (12 tahun)

c. WH (11 tahun)

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif Analisis. Teknik Deskriptif Analisis adalah teknik penelitian dengan cara mengumpulkan sebuah data-data sesuai dimana sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah serta dianalisis guna memperoleh gambaran mengenai masalah yang ada.⁸² Dalam penelitian ini maka data-data hasil wawancara, pengamatan dan kepustakaan akan disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan, apakah telah sesuai dengan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum sesuai atau bahkan tidak sesuai antara realita pelaksanaan dengan ketentuan hukum yang ada (*das sollen das sein*).

H. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum :

Bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Tindak Pidana :

Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, yang perbuatannya diancam pidana sesuai dalam ketentuan undang-undang.

⁸²Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm 23.

3. Penelantaran Anak :

Perbuatan orang dewasa atau orang tua atau wali yang secara hukum bertanggung jawab bagi kesejahteraan anak selama pengasuhannya tidak memelihara, tidak merawat, tidak mengurus anak, tidak memberi/ menyediakan kebutuhan dasar anak sebagaimana mestinya.

4. Anak Terlantar :

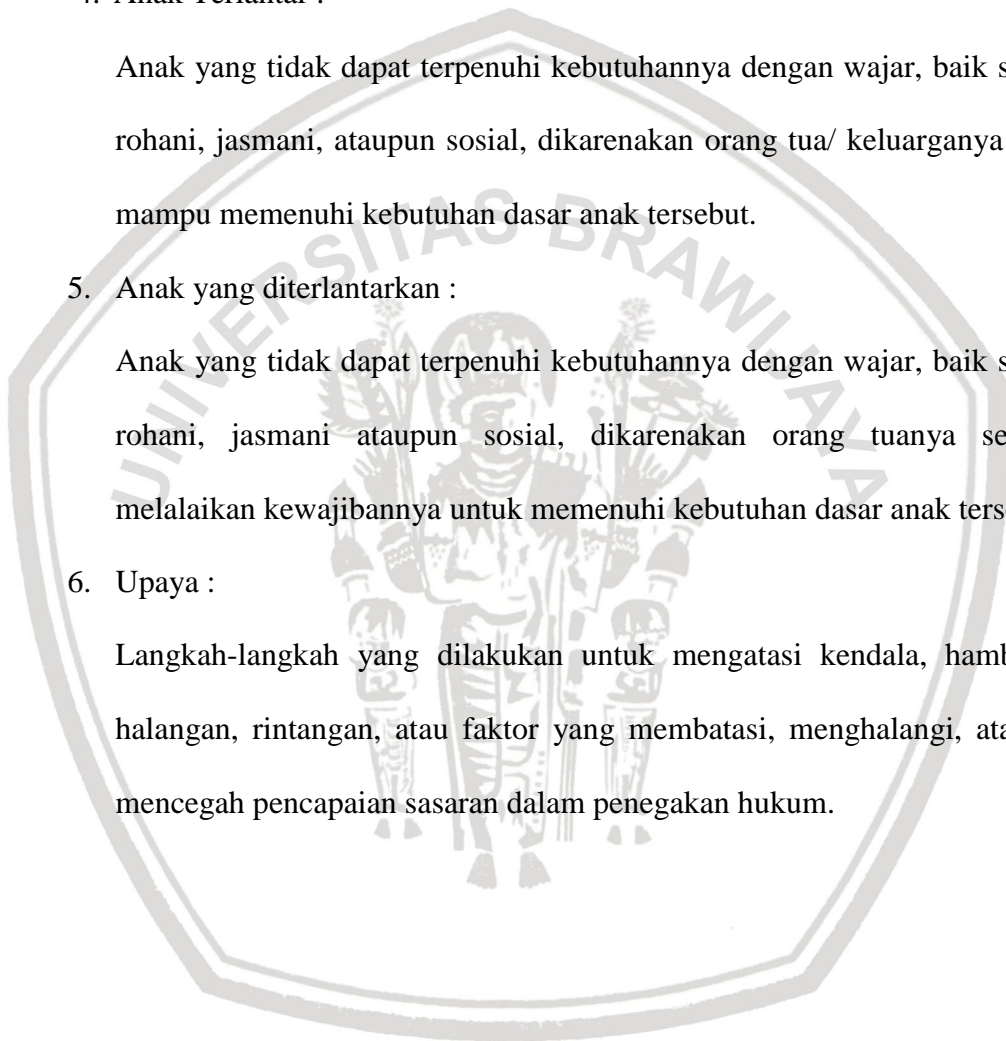
Anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial, dikarenakan orang tua/ keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut.

5. Anak yang diterlantarkan :

Anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani ataupun sosial, dikarenakan orang tuanya sengaja melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut.

6. Upaya :

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala, hambatan, halangan, rintangan, atau faktor yang membatasi, menghalangi, ataupun mencegah pencapaian sasaran dalam penegakan hukum.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Realita Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro

1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Bojonegoro berpedoman terhadap Visi dan Misi pembangunan Bojonegoro sebagaimana tertulis dalam Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Bojonegoro Tahun 2013-2018. Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Bojonegoro Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

a. VISI :

“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri yang produktif, berdaya saing, adil, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan”.

b. MISI :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat;
- 3) Memantapkan pengelolaan sarana prasarana, sumber daya alam, infrastruktur, dan industri jasa yang berkualitas;

- 4) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman;
- 5) Meningkatkan modal sosial masyarakat guna menopang daya tahan, keamanan ketertiban dan kebahagiaan masyarakat yang kondusif serta menjaga kehidupan bernegara yang demokratis;
- 6) Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah

Secara administrasi Kabupaten Bojonegoro diklasifikasikan menjadi 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan ialah 230.706 Ha. Kabupaten Bojonegoro bagian terdiri dari Propinsi Jawa Timur berjarak 110 km dari ibukota propinsi serta berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Batas-batas administrasi Kabupaten Bojonegoro yaitu :

Sebelah Utara : Kabupaten Tuban

Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi

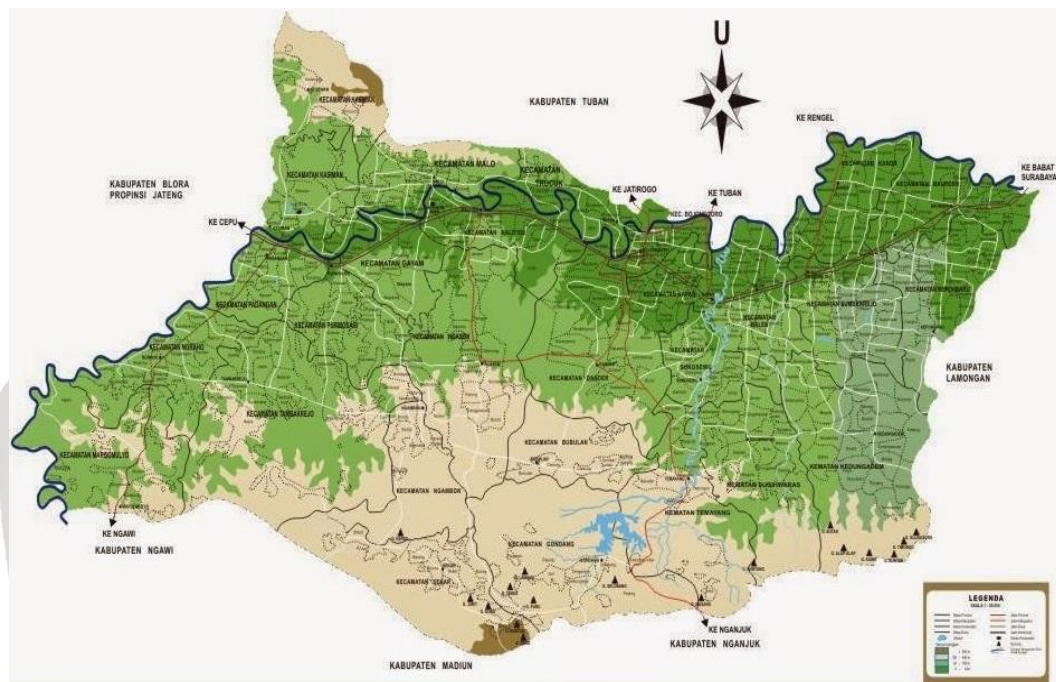
Sebelah Barat : Kabupaten Blora (Jawa Tengah)

Dengan luas wilayah secara keseluruhan 230.706 ha, 40,15% wilayah Bojonegoro adalah wilayah hutan Negara dimana sebagian besar tepat berada di wilayah Selatan Bojonegoro, 32,58% berikutnya berupa lahan sawah yang sebagian besar berada didaerah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Sebanyak sekitar 22,42% adalah tanah

kering dan sisanya 4,85% adalah perkebunan dan lain-lain.⁸³ Sedangkan grafis wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro bisa digambarkan pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Topografi Bojonegoro memperlihatkan bahwa didaerah sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah pada dataran rendah, sedangkan di pada bagian Selatan adalah dataran tinggi disepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat serta Gajah. Sungai Bengawan Solo mengalirkan air dari Selatan, menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir menuju Timur, di sepanjang wilayah Utara Kabupaten Bojonegoro. Bagian Utara adalah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo dimana cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada waktu musim

⁸³Bojonegoro Dalam Angka 2014, *Bojonegoro in Figures 2014*, Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, hlm 5.

penghujan serta tembakau pada musim kemarau. 40,15 persen wilayah Bojonegoro masih merupakan hutan Negara yang sebagian besar berada pada wilayah Selatan Bojonegoro, 35,58 persen berikutnya berupa lahan sawah, yang sebagian besar berada di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Sebanyak 19,42 persen adalah tanah kering dan sisanya 4,85 persen merupakan perkebunan serta lain-lain. Bojonegoro hanya memiliki 22 stasiun penangkar hujan, yang tersebar di 15 kecamatan. Sementara itu, guna menanggulangi kekurangan air untuk keperluan pengairan lahan pertanian pada musim kemarau, dilakukan dengan menaikkan air dari Sungai Bengawan Solo melalui pompanisasi. Yang tersebar di 9 kecamatan yang meliputi 49 desa.⁸⁴

Sedangkan Luas Wilayah Kabupaten Bojonegoro ialah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

No.	Kecamatan/ <i>Sub-District</i>	Luas/Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten/ <i>Percentage to the total area of District</i>
1.	Margomulyo	139,68	6.05
2.	Ngraho	71,48	3.10
3.	Tambak rejo	209,52	9.08
4.	Nganbon	48,65	2.11
5.	Sekkar	130,24	5.65
6.	Bubbulan	84,73	3.67
7.	Gondaang	107,01	4.64
8.	Temayang	124,67	5.40
9.	Sugih waras	87,15	3.78
10.	Kedung adem	145,15	6.29
11.	Kepoh baru	79,64	3.45
12.	Baureno	66,37	2.88
13.	Kanor	59,78	2.59

⁸⁴Bojonegoro Dalam Angka 2014, *Bojonegoro in Figures 2014*, Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, hlm 4.

14.	Sumber rejo	76,58	3.32
15.	Ballen	60,52	2.62
16.	Sukosewu	47,48	2.06
17.	Kapas	46,38	2.01
18.	Bojonegoro	25,71	1.11
19.	Trucuk	36,71	1.59
20.	Dander	118,36	5.13
21.	Ngasem	147,21	6.38
22.	Kalitidu	65,95	2.86
23.	Malo	65,41	2.84
24.	Purwosari	62,32	2.70
25.	Padangan	42	1.82
26.	Kasiman	51,8	2.25
27.	Kedewan	56,51	2.45
28.	Gayam	50,05	2.17
2013		2.307,06	100

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Didalam rangka peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah guna pemberdayaan masyarakat dalam hal upaya pelayanan masyarakat secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan, diperlukan penataan kembali administrasi serta manajemen pemerintahan yang bertumpu kepada nilai-nilai serta paradigma baru. Kabupaten Bojonegoro mempunyai 430 desa dan 11 kelurahan, yang terbagi dari 1.299 dusun dan lingkungan, 2.000 RW dan 7.528 RT. Suatu desa dipimpin seorang kepala desa. Kebanyakan besar kepala desa di Kabupaten Bojonegoro berpendidikan SMA, yaitu hampir sekitar 57,11 persen, sedangkan yang sempat mengenyam bangku kuliah hanya sekitar 18,41 persen, yang melegakan adalah mulai tahun 2010 sudah tidak ada lagi kepala desa yang berpendidikan sebatas sekolah dasar.

Tabel 4.2

Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT, dan RW

Per Kecamatan di Kab. Bojonegoro

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Margomulyo	6	41	43	105
2.	Ngraho	16	58	131	318
3.	Tambakrejo	18	66	89	357
4.	Ngambon	5	16	23	66
5.	Sekar	6	35	60	155
6.	Bubulan	5	17	25	86
7.	Gondang	7	32	45	166
8.	Temayang	12	37	26	110
9.	Sugihwaras	17	54	88	287
10.	Kedungadem	23	95	164	586
11.	Kepohbaru	25	73	102	438
12.	Baureno	25	56	165	462
13.	Kanor	25	59	97	408
14.	Sumberrejo	26	79	99	430
15.	Balen	23	56	80	430
16.	Sukosewu	14	41	53	288
17.	Kapas	21	35	43	309
18.	Bojonegoro	18	12	58	328
19.	Trucuk	12	26	30	174
20.	Dander	16	43	69	366
21.	Ngasem	17	53	96	348
22.	Kalitidu	18	44	79	289
23.	Malo	20	52	101	230
24.	Purwosari	12	32	61	201
25.	Padangan	16	37	59	207
26.	Kasiman	10	20	41	179
27.	Kedewan	5	11	18	69
28.	Gayam	12	37	61	200
2013		419/11	1.227	2.004	7.592
2012		419/11	1.225	2.004	7.592
2011		419/11	1.299	2.000	7.528

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

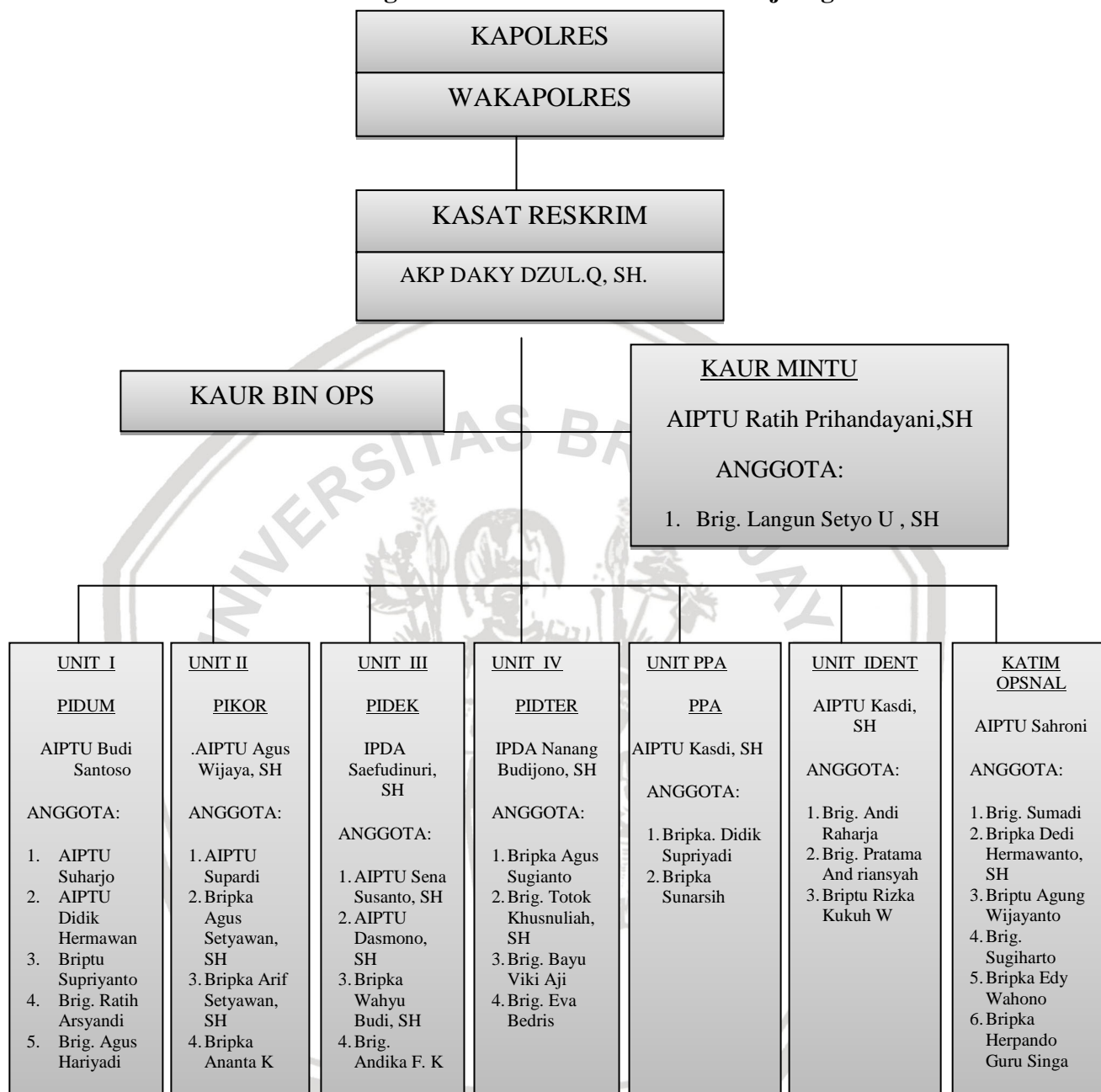
2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro

Kepolisian Resort Bojonegoro di singkat Polres Bojonegoro terletak di Jalan MH. Thamrin No. 46 Bojonegoro. Polres Bojonegoro dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang bernama AKBP Ary Fadli, SIK., MH., M.Si. Polres Bojonegoro sendiri membawahi 28 Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Bojonegoro. Kepolisian Resort Bojonegoro (selanjutnya Polres Bojonegoro) merupakan salah satu instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang sekaligus berada dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum sehingga Polres Bojonegoro ini memiliki tugas antara lain yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayahnya.

Dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Polres Bojonegoro, terdapat bagian yang berkaitan dengan penanganan perkara-perkara pidana yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) adalah suatu unsur pelaksana tugas pokok Polres Bojonegoro yang mempunyai tugas untuk tindakan melaksanakan penyelidikan, penyidikan serta pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk di dalamnya yaitu fungsi identifikasi serta laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan juga pengawasan terhadap PPNS. Penelitian ini dilakukan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro.

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Kasat Reskrim Polres Bojonegoro



Keterangan bagan adalah sebagai berikut :

- KASAT RESKRIM (Kepala Satuan Reserse Kriminal), Bertanggungjawab kepada Kapolres serta dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolres.

- b) KAUR BINOPS (Kepala Urusan Pembinaan Operasional), Bertugas melakukan suatu pembinaan serta pengawasan terhadap administrasi dan juga pelaksanaan atas penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas dari Satreskrim
- c) KAUR MINTU (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan), Bertugas menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan ketatausahaan.
- d) UNIT PIDUM (Unit Tindak Pidana Umum), Bertugas untuk menangani perkara pidana secara umum baik untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan
- e) UNIT PIKOR (Unit Tindak Pidana Korupsi), Bertugas melakukan penyelidikan serta penyidikan terkait tindak pidana korupsi.
- f) UNIT PIDEK (Unit Tindak Pidana Ekonomi), Bertugas untuk menangani perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi atau khusus.
- g) UNIT PIDTER (Unit Tindak Pidana Tertentu), Bertugas melaksanakan penyelidikan serta penyidikan dalam kejahatan tertentu pada daerah hukum Polres.
- h) UNIT PPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak), Bertugas dalam memberikan pelayanan serta perlindungan khusus terhadap remaja, anak serta wanita baik sebagai pelaku ataupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- i) UNIT IDENT (Unit Urusan Identifikasi), Bertugas melaksanakan identifikasi serta laboratorium forensik lapangan serta pengidentifikasian guna kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

3. Realita Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro

Jumlah Penduduk di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2014 tercatat sebanyak 1.453.880 jiwa (453.726) KK dibanding tahun 2013 mengalami peningkatan 0,05%. Jumlah penduduk laki-laki yaitu 730.815 jiwa dan penduduk perempuan yaitu 723.065 jiwa dengan angka rasio jenis kelamin yaitu 101,26.

Tabel 4.3

Data Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur
di Kabupaten Bojonegoro tahun 2012-2014

No.	Kelompok Umur	Jumlah / Total		
		2012	2013	2014
1.	0-5	93.393	94.175	90.325
2.	6-10	101.670	100.324	101.893
3.	11-16	130.021	129.948	130.992
4.	17	22.751	21.390	19.821
5.	18	22.297	22.949	21.536
6.	19-25	153.826	155.719	157.063
7.	26-30	128.676	124.294	118.997
8.	31-35	135.308	136.387	137.378
9.	36-40	121.868	124.694	127.966
10.	41-45	118.400	117.444	117.362
11.	46-50	106.339	109.147	113.291
12.	51-55	92.568	96.270	97.397
13.	56-59	58.890	57.630	62.696
14.	≥60	186.868	160.518	156.326
Jumlah / Total		1.472.865	1.450.889	1.453.043

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Dalam hal ini data Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur digunakan untuk mengetahui persentase tindak pidana penelantaran anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa : “Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada kandungan.”⁸⁵ Dalam penelitian ini mengenai tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa anak yang mengalami penelantaran di wilayah Bojonegoro ialah anak yang berusia 6-18 tahun. Berdasarkan data pada tabel 4.3, pada tahun 2012 jumlah penduduk berumur 6-18 tahun tercatat sebanyak 276.739 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk berumur 6-18 tahun tercatat sebanyak 274.611 jiwa.

Jumlah penduduk menurut golongan usia dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Belum produktif (<16 tahun)
- b. Produktif (17-60 tahun)
- c. Tidak produktif (>60 tahun)

Berdasarkan pengelompokan usia tersebut dapat diketahui rasio beban tanggungan (dependency ratio) yang dapat digunakan untuk melihat angka ketergantungan suatu negara. Rasio beban tanggungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia non-produktif dengan penduduk usia produktif.

⁸⁵Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tabel 4.4

Persentase Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2012 s/d 2017

No.	Tahun	Penelantaran Anak			Jumlah Penduduk Umur 6-18 tahun	Persentase
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	2012	2.940	2.713	5.653	276.739	2,042%
2.	2013	1.402	1.756	3.158	274.611	1,149%
3.	2014	1.008	1.252	2.260	274.242	0,824%
4.	2015	398	287	685	283.753	0,241%
5.	2016	379	254	633	283.753	0,223%
6.	2017	27	12	39	283.753	0,013%

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Berdasarkan data jumlah kasus Penelantaran Anak yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dipadukan dengan data Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, maka dapat diketahui persentase kasus Penelantaran Anak sebagaimana disajikan tabel 4.4 di atas.

Tabel 4.5

Data Kasus Penelantaran Anak yang sudah ditangani Dinas Sosial Kab. Bojonegoro

Tahun 2012 s/d 2017

No.	Tahun	Penelantaran Anak		
		Jumlah	Yang sudah ditangani	Yang belum ditangani
1.	2012	5.653	386	5.267
2.	2013	3.158	59	3.099
3.	2014	2.260	220	2.040
4.	2015	685	93	592
5.	2016	633	74	559
6.	2017	39	11	28
Total		12.428	843	11.585

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Dari data yang diperoleh dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada tabel 4.5 di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pada setiap tahunnya selalu ditemukan kasus penelantaran anak di kabupaten Bojonegoro. Pada 3 tahun terakhir secara berturut-turut kasus penelantaran anak di Kabupaten Bojonegoro penanganannya tidak dapat mencapai 50%. Pada tahun 2015 hanya 13,57% kasus yang dapat ditangani, pada tahun 2016 hanya 11,69% kasus yang dapat ditangani, dan pada tahun 2017 hanya 28,20% kasus yang dapat ditangani.

Tabel 4.6

Data Kasus Penelantaran Anak di Dinas Sosial Kab. Bojonegoro menurut Kecamatan pada tahun 2012 s/d 2017

No.	Kecamatan	Penelantaran Anak					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kedewan	84	9	9	10	10	-
2.	Tambakrejo	58	644	14	15	-	-
3.	Kepohbaru	212	78	87	100	77	1
4.	Gondang	123	26	26	13	13	6
5.	Kedungadem	24	61	-	61	62	-
6.	Bubulan	70	25	19	19	9	4
7.	Ngasem	128	89	84	82	17	1
8.	Ngraho	28	9	7	-	-	-
9.	Balen	42	151	4	4	4	-
10.	Kasiman	157	71	75	-	-	-
11.	Kapas	110	58	30	-	5	-
12.	Dander	104	54	50	54	33	9
13.	Padangan	109	26	30	28	-	-
14.	Malo	9	19	4	20	68	-
15.	Sugihwaras	41	87	-	-	-	1
16.	Sumberrejo	186	93	99	58	95	1
17.	Gayam	209	-	106	35	87	-

18.	Ngambon	87	17	17	15	17	3
19.	Purwosari	140	36	46	15	-	-
20.	Trucuk	90	70	18	29	-	-
21.	Bojonegoro	1.174	423	423	1	-	-
22.	Sukosewu	1.259	404	404	57	55	5
23.	Baureno	59	-	-	8	6	-
24.	Kanor	685	448	448	1	2	1
25.	Temayang	162	97	97	-	3	2
26.	Sekar	204	152	152	-	1	1
27.	Margomulyo	37	-	-	-	-	-
28.	Kalitidu	62	1	1	60	69	4
	Jumlah	5.653	3.158	2.260	685	633	39

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Pada tabel 4.6 di atas merupakan data yang menunjukkan jumlah kasus penelantaran anak yang terjadi pada setiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2015, kecamatan yang memiliki kasus penelantaran anak tertinggi ialah kecamatan Kepohbaru yaitu 100 anak. Dan pada tahun 2016, kecamatan yang memiliki kasus penelantaran anak tertinggi ialah kecamatan Sumberrejo yaitu 95 anak. Sedangkan pada tahun 2017, kecamatan yang memiliki kasus penelantaran anak tertinggi ialah kecamatan Dander yaitu 9 anak. Menurut data pada tabel 4.6 di atas, menandakan bahwa kasus penelantaran anak belum dapat hilang dan selalu ada pada setiap tahunnya di wilayah Bojonegoro.

Masih banyaknya penelantaran anak pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro ini salah satunya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat. Diketahui bahwa ekonomi penduduk di wilayah kabupaten Bojonegoro masih berada pada kategori rendah. Hal ini terlihat dari data mata pencaharian penduduk daerah Bojonegoro.

Tabel 4.7

Mata Pencaharian Penduduk menurut Kecamatan yang memiliki Kasus
Penelantaran Anak tertinggi di Kab. Bojonegoro

Kecamatan	Petani	Pedagang	Industri/Ke- rajinan	Buruh	PNS/ Polri/ TNI	Lain- lainnya	Jumlah
Dander	12.355	169	83	185	1.254	419	14.465
Ngasem	38.321	303	332	207	82	1.028	40.273
Gayam	2.845	193	33	1.776	22	705	5.574
Kanor	29.572	550	18	109	430	1.375	32.054
Kepohbaru	15.669	708	7	476	116	2.612	19.588
Balen	18.551	102	24	289	1.108	4.415	24.489
Kasiman	3.210	62	-	157	79	1.461	4.969
Sumberejo	5.665	805	97	1.504	331	3.520	11.922
Sukosewu	11.874	83	9	336	82	827	13.211
Sekar	4.535	100	70	90	57	2.285	7.137
Temayang	14.500	814	135	294	303	902	16.948

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, diolah, 2018

Sektor pertanian adalah sektor utama dalam sistem perekonomian Kabupaten Bojonegoro, jadi penduduk Kabupaten Bojonegoro sebagian besar bermata pencaharian adalah petani. Namun, saat ini petani Bojonegoro mulai terusir akibat proyek migas. Sebab keberadaan industrialisasi migas yang berlangsung saat ini telah banyak memakan lahan pertanian sehingga dapat mengancam ketahanan pangan. Serta semenjak adanya perusahaan migas tersebut, tanah milik warga menjadi tidak produktif. Sejak adanya pengeboran minyak, tanah warga termasuk daerah bahaya sehingga petani tidak bisa leluasa mengolah tanahnya setiap saat. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat petani yang kian menurun.⁸⁶

⁸⁶Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Bapak Doni selaku pegawai Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak

Penegakan Hukum dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu Faktor Hukum dan Faktor Non Hukum, yang mana keduanya saling memiliki keterkaitan. Faktor hukum merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum ialah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang menjadi tujuan hukum.⁸⁷

Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro, yang mana hasil penelitian dan analisisnya ialah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum (Penegakan Hukum)

a. Substansi Hukum

Komponen Substansi adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum *in-concreto* atau kaidah hukum individual maupun hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum. Contoh kaidah hukum individual yaitu pengadilan menghukum terdakwa, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal. Sedangkan contoh kaidah hukum umum yaitu ketentuan aturan hukum yang tercantum dalam Undang-undang.⁸⁸

Suatu peraturan perundang-undangan telah diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-

⁸⁷Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

⁸⁸Edi Setiadi dan Kristian, **Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm 169.

undangan tersebut berlaku. Kemudian timbul pendapat bahwa setiap masyarakat di anggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.⁸⁹

Dalam penelitian ini, Substansi Hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak diatur oleh 2 (dua) peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 76B tersebut diatur dalam Pasal 77B Undang-undang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Unsur dari Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-undang Perlindungan Anak di atas ialah :

- i. Unsur Subjektif : Setiap orang
- ii. Unsur Objektif : Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
- iii. Unsur Objek : Anak.
- iv. Ancaman Pidana : Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁸⁹Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66.

Serta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT juga mengatur mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) mengenai Penelantaran Rumah Tangga diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).”

Unsur dari Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT di atas ialah :

- i. Unsur Subjektif : Setiap orang berada dalam lingkup rumah tangga
- ii. Unsur Objektif : Dilarang menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangga
- iii. Unsur Objek : Orang yang menurut hukum berlaku baginya ataupun karena persetujuan atau perjanjian dirinya wajib memberikan kehidupan, perawatan, ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut.

- iv. Ancaman Pidana : Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan di atas yang sama-sama mengatur mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak, maka dapat diketahui bahwa terdapat adanya perbedaan unsur. Dalam perbedaan unsur pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan.

Pada Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak yakni kelebihanannya terletak pada penjelasan perlakuan penelantaran yang dijelaskan secara spesifik tertera pada penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf c Undang-undang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Tindakan ataupun perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban guna memelihara, merawat, ataupun mengurus anak sebagaimana mestinya.”

Kemudian kelemahan Pasal 76B yakni terletak pada Unsur *Subjective Relation*, yaitu kata “setiap orang” tidak dijelaskan mengenai hubungan pelaku dengan korban (anak), apakah yang dapat dikenakan pasal tersebut merupakan hubungan keturunan horizontal/vertikal dengan korban (anak), atau hubungan perwalian dengan korban (anak), atau hubungan kerja dengan korban (anak). Karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut unsur “setiap orang” merupakan orang perseorangan ataupun korporasi. Sehingga penegak hukum merasa kesulitan untuk menerapkan unsur pasal “setiap orang” tersebut, sebab

terlalu luas cakupannya dan kurang spesifiknya pengaturan mengenai penentuan hubungan antara pelaku dengan korban (anak).

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT, yakni memiliki kelebihan yang terletak pada pengaturan mengenai hubungan antara pelaku dengan korban (anak), yakni diatur pada Pasal 2 Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT, yang berbunyi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kejelasan pengaturan mengenai hubungan antara pelaku dengan korban (anak) ini secara jelas disebutkan yaitu dalam lingkup rumah tangga. Akan tetapi terdapat pula kelemahan dalam Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT yakni tidak dijelaskannya secara spesifik perlakuan penelantaran tersebut.

Dalam hal pengaturan ancaman pidana, kedua Undang-undang tersebut di atas juga memiliki perbedaan yaitu Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dikarenakan terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan khusus yang sama-sama mengatur mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak serta adanya perbedaan unsur dan ancaman pidana yang telah dijelaskan di atas, maka mengakibatkan penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Bojonegoro menjadi kesulitan dalam menentukan pilihan pasal mana yang akan diterapkan pada kasus Penelantaran Anak, hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Aiptu Kasdi selaku Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Bojonegoro.⁹⁰

Indonesia mengenal 4 (empat) asas dalam peraturan perundang-undangan, yakni : Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama), Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), Asas Legalitas (tiada suatu perbuatan yang bisa dipidana terkecuali perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-undang).

Apabila keempat asas tersebut dikaitkan dengan substansi hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak, yaitu Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT, maka keempat asas di atas tidak ada yang cocok untuk diterapkan pada kedua peraturan perundang-undangan ini, dikarenakan kedua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kedudukan yang

⁹⁰Hasil survey wawancara dengan Bapak Aiptu Kasdi selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro, pada tanggal 20 Februari 2018, diolah.

sama yaitu merupakan Undang-undang khusus. Sehingga kedua Undang-undang khusus tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa tidak dapat mengesampingkan satu sama lain dalam penerapannya.

b. Struktur Hukum

Komponen struktur hukum adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), menyebutkan bahwa struktur hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Pengacara atau Advokat.

Keberhasilan suatu perundang-undangan pidana sangat bergantung pada penegakannya. Apabila penegakannya tidak berjalan dengan baik, maka peraturan perundang-undangan pidana yang bagaimanapun sempurnanya akan dirasakan tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.⁹¹ Penegakan tersebut dilaksanakan oleh struktur penegak hukum yang kewenangannya dijamin oleh Undang-undang.

Dalam penelitian ini struktur hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Bojonegoro ialah Kepolisian, khususnya Polres Bojonegoro. Selain Polres Bojonegoro terdapat pula instansi/ lembaga pemerintahan lain yang membantu menangani perkara Penelantaran Anak yaitu Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan &

⁹¹Edi Setiadi dan Kristian, **Op.cit.**, hlm 173.

Anak (P3A) Bojonegoro, dalam hal ini Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro menangani perkara Penelantaran Anak melalui jalur non hukum.

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro, terlebih dahulu akan dibahas mengenai penanganan kasus Penelantaran Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro.

Dinas Sosial Bojonegoro melakukan tindakan-tindakan dalam membantu menangani kasus Penelantaran Anak di Bojonegoro dari segi sosial. Tindakan-tindakan sosial tersebut meliputi Tindakan Preventif dan Tindakan Represif. Berikut ini ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bojonegoro untuk membantu menangani kasus Penelantaran Anak di Bojonegoro :

1) Tindakan Preventif

Tindakan Preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi tujuannya agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam, diantisipasi ataupun dicegah. Pengendalian yang umumnya bersifat preventif dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Tindakan Preventif Dinas Sosial Bojonegoro dalam melakukan penanganan terhadap kasus Penelantaran Anak yaitu :

a) Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

Kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Bojonegoro yaitu menghimbau kepada masyarakat terutama orang tua dan anak-anak mengenai Gerakan Ayo Sekolah, tujuannya yaitu agar masyarakat terutama orang tua memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga terpenuhilah hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial tersebut merupakan program kegiatan tahunan yang wajib dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Bojonegoro.

b) Pembinaan Sosial

Kegiatan Pembinaan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Bojonegoro yaitu menyelenggarakan sebuah seminar yang pesertanya ialah masyarakat/ warga yang berada di daerah/ wilayah pedesaan, dengan tujuan memberikan pengetahuan mengenai pemenuhan Hak-hak dasar Anak dan perlindungan terhadap anak. Selain itu Dinas Sosial Bojonegoro membentuk program Kegiatan Pelatihan Keterampilan serta Praktek Belajar Kerja oleh Anak Terlantar termasuk juga Anak Jalanan, Anak Cacat, serta Anak Nakal. Pembinaan Sosial tersebut merupakan program kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

c) Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan memberikan Bantuan Sosial

Tindakan preventif selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan memberikan Bantuan Sosial. Sasarannya

ialah memberikan bantuan kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), yaitu Bantuan Ekonomi berupa Usaha Ekonomi Produktif. Bantuan Ekonomi yang diberikan oleh Dinas Sosial yaitu hanya sebatas Bantuan Stimulan (rangsangan) yang diharapkan dapat mendorong untuk mengembangkan ekonomi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) tersebut. Bantuan Ekonomi tersebut yaitu berupa :

(1) Pemberian Kambing :

Sebelum diberikan bantuan berupa kambing, pihak Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Peternakan terlebih dahulu mengadakan pelatihan mengenai perawatan hewan ternak. Pemberian berupa kambing ini diharapkan kambing tersebut kemudian dapat berkembang biak, lalu dapat dijual sehingga perekonomian keluarga menjadi lebih baik, agar tidak akan terjadi kasus penelantaran anak daei segi pendidikan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan. Bantuan ekonomi berupa pemberian kambing ini merupakan Hibah Daerah.

(2) Bantuan Tunai :

Bantuan Tunai yang diberikan ialah berupa uang tunai. Bantuan tunai tersebut diberikan kepada keluarga yang memiliki usaha seperti warung, toko, dan usaha-usaha kecil lainnya. Yang diharapkan bantuan berupa uang tunai ini dapat menambah modal usaha keluarga tersebut, kemudian usahanya dapat semakin berkembang sehingga perekonomian keluarga menjadi lebih baik,

supaya tidak ditemukan lagi kasus penelantaran anak diakibatkan oleh kondisi kemiskinan keluarga.

Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tersebut merupakan program kegiatan tahunan yang dilaksanakan minimal sebanyak 1 kali dalam satu tahun, yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya. Daerah / wilayah yang dipilih untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut setiap tahunnya berganti. Daerah/ wilayah yang terpilih merupakan daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya miskin dan daerah tersebut merupakan daerah yang mayoritas anak-anaknya ialah anak jalanan, anak cacat, anak yatim/piatu/yatim piatu, anak yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Sebelum pelaksanaan program kegiatan tersebut, terlebih dahulu Dinas Sosial melakukan pendataan bagi calon penerima bantuan sosial, tujuannya ialah supaya tepat sasaran. Prosedur pendataan bagi calon penerima bantuan sosial ialah : Kepala Desa / Kelurahan (membuat proposal permohonan bantuan sosial, dalam proposal harus mencantumkan nama lengkap anak + umur anak + nama lengkap orang tua + alamat lengkap + keterangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (jenis PMKS) → Proposal yang dibuat oleh Kepala Desa diajukan kepada bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) → Bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengecek data calon penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Proposal tersebut supaya valid → Setelah proses pengecekan kemudian bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengajukan proposal

tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.⁹² Dana yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan tahunan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.⁹³

2) Tindakan Represif

Tindakan Represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan terdapat pada saat penyimpangan sosial yang terjadi agar penyimpangan dapat dihentikan.

Tindakan Represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini melibatkan instansi pemerintah lain yaitu Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Terlantar milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Bojonegoro untuk menangani kasus penelantaran anak yang ada di Bojonegoro. Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Terlantar milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menerima kasus penelantaran anak dari wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Ngawi, Madiun, dan Magetan.

Dalam hal ini tindakan represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial sepenuhnya dilimpahkan kepada Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk diberikan Pelayanan Sosial. Anak-anak yang dapat diberikan Pelayanan Sosial

⁹²Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Bapak Doni selaku pegawai Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

⁹³APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

oleh Dinas Sosial UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar ialah yang berusia 15-18 tahun, yang berusia di bawah 15 tahun dicoba untuk dikembalikan ke Orang Tua.

Tindakan Represif yaitu dilakukan dengan cara :

a) Usaha Penampungan

Usaha Penampungan ini yaitu penampungan sementara yang bertujuan untuk mengidentifikasi anak-anak yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Panti Asuhan Sosial yang ada di wilayah Bojonegoro.

Berikut ialah daftar Panti Asuhan yang ada di wilayah Bojonegoro :

Tabel 4.8
Banyaknya Panti Asuhan, Penghuni dan Pengasuh di Kabupaten Bojonegoro

No.	Kecamatan/ Regency	Panti Asuhan/ Reformatory	Penghuni/Inhabitant			Pengasuh/ Guardian
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Margomulyo	-	-	-	-	-
2.	Ngraho	-	-	-	-	-
3.	Tambakrejo	-	-	-	-	-
4.	Ngambon	-	-	-	-	-
5.	Sekar	-	-	-	-	-
6.	Bubulan	-	-	-	-	-
7.	Gondang	-	-	-	-	-
8.	Temayang	-	-	-	-	-
9.	Sugihwaras	-	-	-	-	-
10.	Kedungadem	-	-	-	-	-
11.	Kepohbaru	1	48	72	120	1
12.	Baureno	1	24	36	60	1
13.	Kanor	-	-	-	-	-
14.	Sumberrejo	1	35	52	87	2
15.	Balen	1	15	20	35	1
16.	Sukosewu	2	87	100	187	2
17.	Kapas	1	50	57	107	1
18.	Bojonegoro	5	120	128	248	3
19.	Trucuk	-	-	-	-	-

20.	Dander	2	70	77	147	3
21.	Ngasem	-	-	-	-	-
22.	Kalitidu	-	-	-	-	-
23.	Malo	1	41	46	87	1
24.	Purwosari	-	-	-	-	-
25.	Padangan	1	35	40	75	1
26.	Kasiman	-	-	-	-	-
27.	Kedewan	-	-	-	-	-
28.	Gayam	-	-	-	-	-
	2013	16	525	628	1153	16
	2012	14	670	732	1402	156
	2011	14	670	730	1400	156

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

b) Usaha Seleksi

Usaha seleksi bertujuan untuk kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Seleksi ini gunanya untuk mengetahui kondisi calon penerima pelayanan sosial (Anak Terlantar), yaitu layak atau tidak diberikan bantuan pelayanan sosial tersebut. Seleksi calon penerima pelayanan (klien) dilaksanakan di daerah-daerah wilayah jangkauan pelayanan UPT oleh petugas UPT satu bulan sebelum pelaksanaan bimbingan dengan melibatkan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota.

c) Usaha Pelayanan Sosial

Usaha Pelayanan Sosial yaitu berupa :

(1) Bimbingan Mental & Kedisiplinan :

- (a) Agama
- (b) Apel
- (c) Baris Berbaris

(2) Bimbingan Fisik :

- (a) Olahraga
- (b) Praktek Hidup Sehat Diri & Lingkungan (Sanitasi)
- (3) Bimbingan Keterampilan Usaha :
 - (a) Organisasi & Manajemen
 - (b) Kewirausahaan
 - (c) Keterampilan Otomotif
 - (d) Keterampilan Menjahit
 - (e) Keterampilan Elektronika & HP
 - (f) Keterampilan Bordir
 - (g) Keterampilan Finishing Kayu
- (4) Bimbingan Sosial (Perilaku Sosial) :
 - (a) Komunikasi Sosial
 - (b) Kepribadian dan Norma Sosial
 - (c) Kepemimpinan
 - (d) Relasi Sosial dan Jejaring Kerja
 - (e) Organisasi dan Manajemen
 - (f) Dinamika Kelompok
 - (g) Pendampingan Kelompok
 - (h) Kewirausahaan
 - (i) Konseling
- (5) Resosialisasi :
 - (a) Dinamika Kelompok
 - (b) PBK / Magang
 - (c) Karang Taruna

(d) Pertandingan Olahraga

(e) Upacara

(f) Rekreasi

(g) Kesenian

(h) Kunjungan Keluarga

d) Usaha Penyaluran / kelayakan kembali ke masyarakat

Anak-anak yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Tahap ini diawali dengan pemberian sertifikat dan bantuan paket peralatan kerja sesuai jurusan keterampilan masing-masing klien untuk modal awal membuka usaha. Berikutnya klien dikembalikan/ diserahkan kembali kepada kabupaten/ kota pengirim dan disalurkan ke tempat-tempat usaha bagi yang dinilai memenuhi standar kemampuan. Tujuan dari penyaluran ini ialah supaya anak tersebut dapat berperilaku normatif, berperilaku mandiri, mampu membawa diri, optimistik dan percaya diri.

e) Usaha Bimbingan Lanjut

Usaha Bimbingan Lanjut yaitu berupa :

(1) Konseling :

Proses interaksi antara konselor (pihak Dinas Sosial) dengan klien/ konselee (Anak) secara langsung atau tidak langsung dalam rangka membantu klien (Anak) agar dapat mengembangkan potensi dirinya/ memecahkan masalah yang dialaminya.

(2) Penempatan pada Bursa Kerja :

Memberikan bantuan berupa menempatkan Anak Terlantar yang telah mendapat bantuan pelayanan sosial ke dalam dunia kerja, agar kemampuan sosial dan ekonominya berkembang dan berguna di masyarakat.

(3) Komunikasi :

Meningkatkan kemampuan komunikasi dalam hidup bermasyarakat.

(4) Pemantauan :

Selalu memantau / melihat dan mengikuti perkembangan Anak Terlantar yang telah mendapat pelayanan sosial, mengalami perubahan yang lebih baik atau tidak.

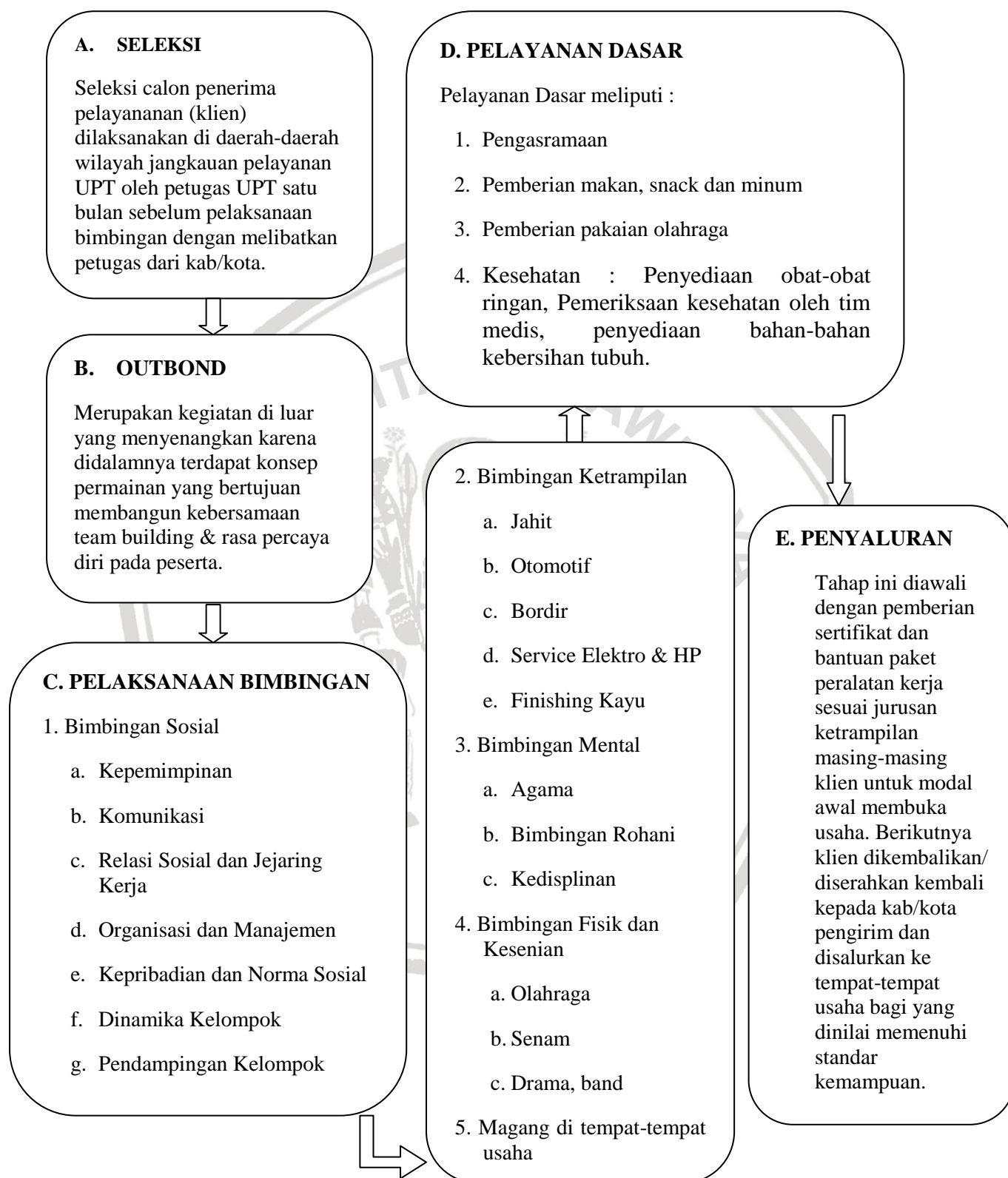
(5) Kunjungan :

Melakukan kegiatan kunjungan ke tempat-tempat Anak Terlantar yang telah mendapat pelayanan sosial tersebut yang sekarang sudah dikembalikan ke masyarakat.⁹⁴

⁹⁴Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Bapak Doni selaku pegawai Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018.

Bagan 4.2

PROSES PELAYANAN SOSIAL DI UPT PSRT BOJONEGORO

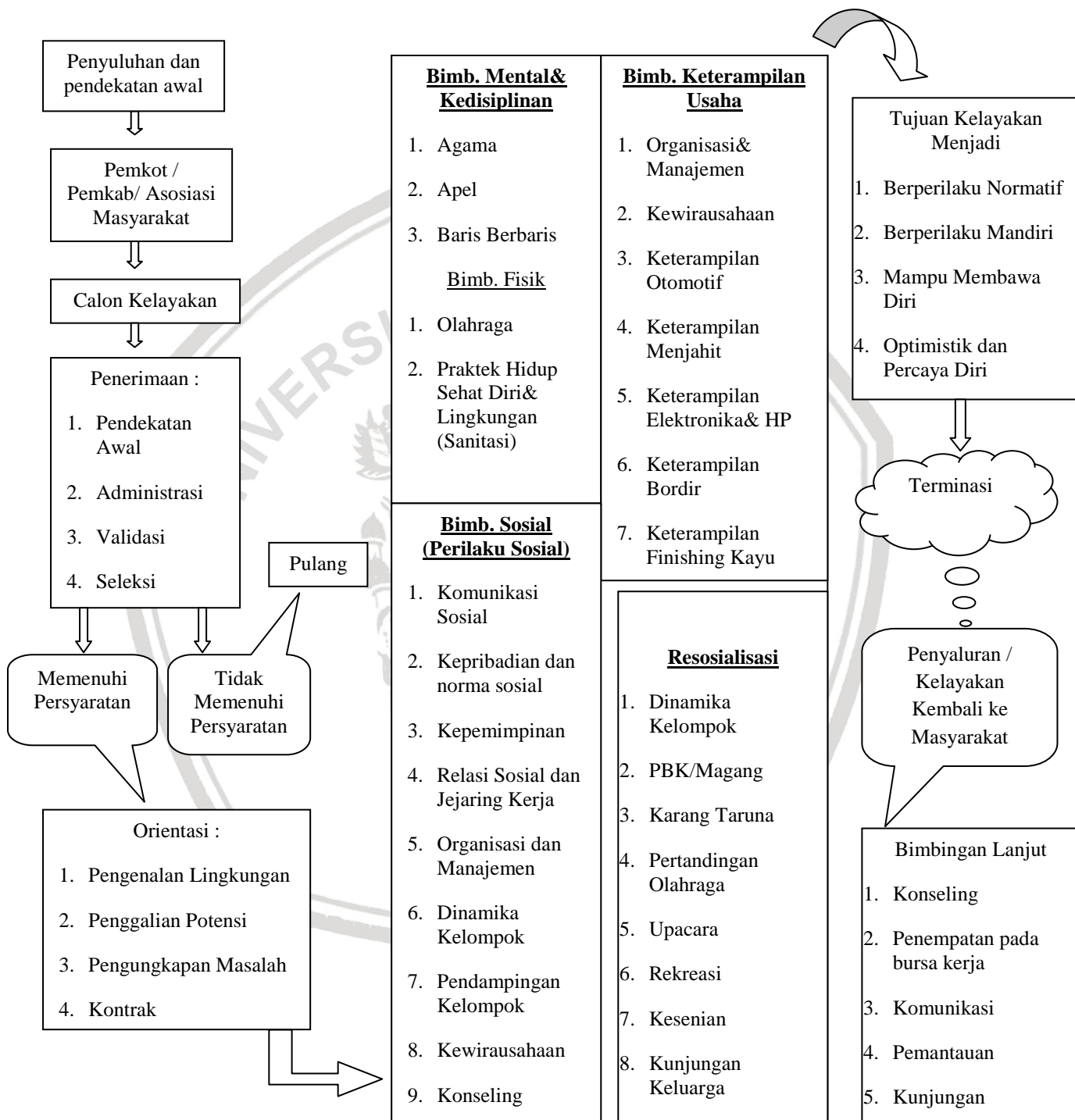


Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Bagan 4.3

Proses Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah Terlantar

UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Bojonegoro



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Berikut ini ialah data jumlah kasus Penelantaran Anak yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro :

Tabel 4.9

Data Kasus Penelantaran Anak di Dinas Sosial Kab. Bojonegoro

pada tahun 2012 s/d 2017

No.	Tahun	Penelantaran Anak			Jumlah Penduduk Umur 6-18 tahun	Persentase
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	2012	2.940	2.713	5.653	276.739	2,042%
2.	2013	1.402	1.756	3.158	274.611	1,149%
3.	2014	1.008	1.252	2.260	274.242	0,824%
4.	2015	398	287	685	283.753	0,241%
5.	2016	379	254	633	283.753	0,223%
6.	2017	27	12	39	283.753	0,013%

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018

Tabel 4.10

Data Kasus Penelantaran Anak yang sudah ditangani Dinas Sosial

Kab. Bojonegoro tahun 2012 s/d 2017

No.	Tahun	Penelantaran Anak		
		Jumlah	Yang sudah ditangani	Yang belum ditangani
1.	2012	5.653	386	5.267
2.	2013	3.158	59	3.099
3.	2014	2.260	220	2.040
4.	2015	685	93	592
5.	2016	633	74	559
6.	2017	39	11	28
Total		12.428	843	11.585

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Tabel 4.11

Data Kasus Penelantaran Anak di Dinas Sosial Kab. Bojonegoro menurut
Kecamatan pada tahun 2012 s/d 2017

No.	Kecamatan	Penelantaran Anak					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kedewan	84	9	9	10	10	-
2.	Tambakrejo	58	644	14	15	-	-
3.	Kepohbaru	212	78	87	100	77	1
4.	Gondang	123	26	26	13	13	6
5.	Kedungadem	24	61	-	61	62	-
6.	Bubulan	70	25	19	19	9	4
7.	Ngasem	128	89	84	82	17	1
8.	Ngraho	28	9	7	-	-	-
9.	Balen	42	151	4	4	4	-
10.	Kasiman	157	71	75	-	-	-
11.	Kapas	110	58	30	-	5	-
12.	Dander	104	54	50	54	33	9
13.	Padangan	109	26	30	28	-	-
14.	Malo	9	19	4	20	68	-
15.	Sugihwaras	41	87	-	-	-	1
16.	Sumberrejo	186	93	99	58	95	1
17.	Gayam	209	-	106	35	87	-
18.	Ngambon	87	17	17	15	17	3
19.	Purwosari	140	36	46	15	-	-
20.	Trucuk	90	70	18	29	-	-
21.	Bojonegoro	1.174	423	423	1	-	-
22.	Sukosewu	1.259	404	404	57	55	5
23.	Baureno	59	-	-	8	6	-
24.	Kanor	685	448	448	1	2	1
25.	Temayang	162	97	97	-	3	2
26.	Sekar	204	152	152	-	1	1
27.	Margomulyo	37	-	-	-	-	-
28.	Kalitidu	62	1	1	60	69	4
	Jumlah	5.653	3.158	2.260	685	633	39

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Dari hasil survey yang dilakukan di Dinas Sosial Bojonegoro, maka dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Bojonegoro dalam melakukan tindakan preventif dan represif guna membantu menangani kasus penelantaran anak dari segi sosial telah berjalan cukup efektif. Terlihat dari data-data kasus penelantaran anak di

atas meskipun tidak seluruhnya dapat ditangani, namun setidaknya mengalami penurunan.

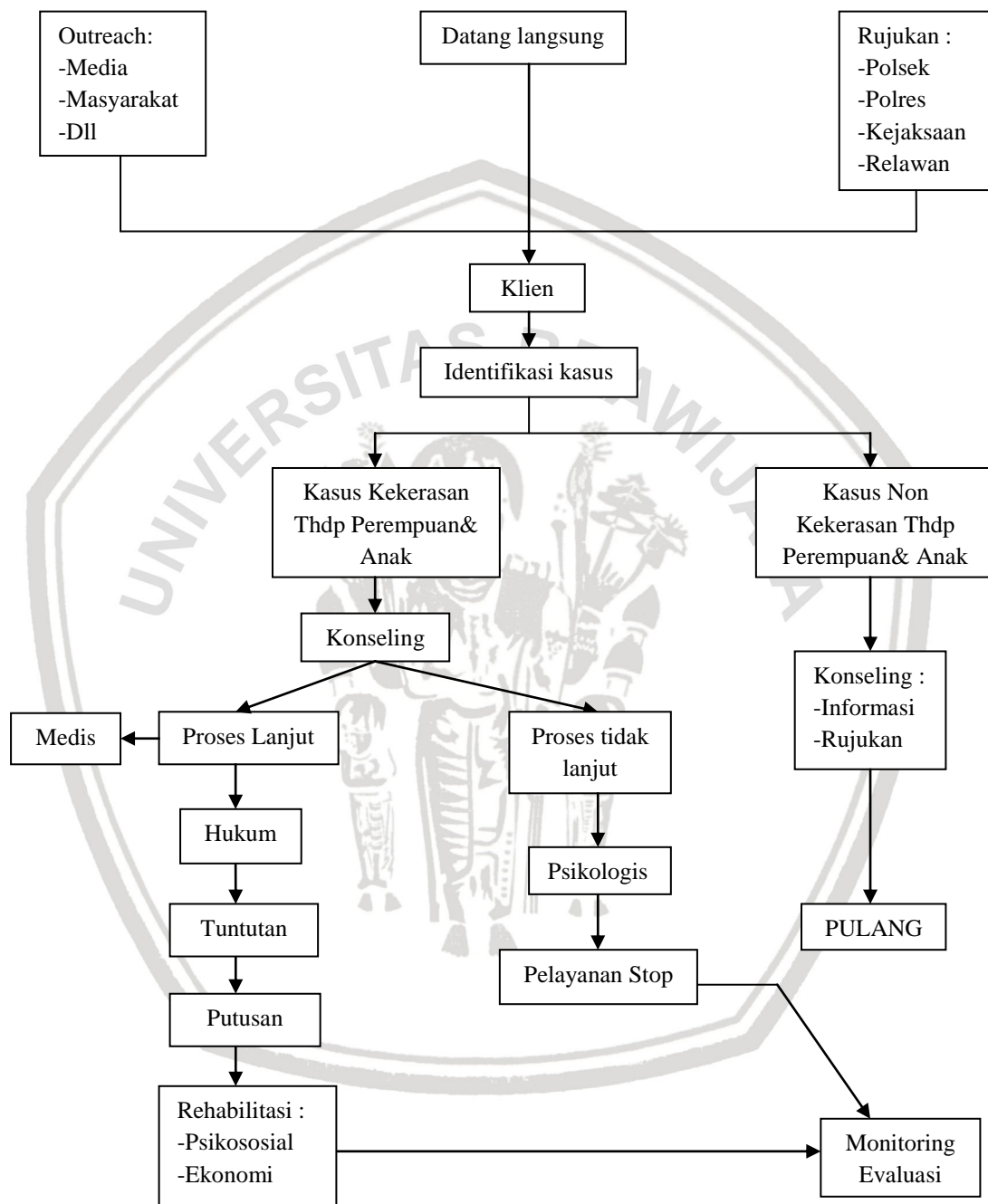
Selanjutnya akan membahas mengenai Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro, yang turut membantu menangani kasus penelantaran anak di Bojonegoro. Berikut ialah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dimiliki oleh Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro, dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang ditangani :

- 1) Klien diterima di bagian penerimaan (identifikasi kasus)
- 2) Klien mengisi “form khusus” (dibagian ini kasus diidentifikasi)
- 3) Klien diantar konselor untuk mendapatkan pelayanan konseling awal
 - a) Bila kasus non pidana, maka klien hanya diberikan informasi/konseling/rujukan, setelah itu klien boleh pulang. Klien boleh berkonsultasi lebih dari satu kali dengan harus membuat janji untuk bertemu
 - b) Bila kasus pidana, maka klien diberikan pilihan untuk menyelesaikan kasus secara hukum atau tidak
- 4) Jika klien memilih jalur hukum, klien akan mendapatkan pendampingan sampai vonis dan klien siap mandiri
- 5) Jika klien tidak memilih jalur hukum, klien hanya akan mendapatkan pelayanan psikologis
- 6) Pada kekerasan fisik dan seksual, klien didampingi untuk mendapatkan Visum Et Repertum (VER) dan pengobatan.

Kemudian terdapat mekanisme pelayanan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro, yaitu sebagai berikut :

Bagan 4.4

Mekanisme Pelayanan di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A)

Bojonegoro ialah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi lembaga
- 2) Pendidikan masyarakat dan kampanye melalui radio, surat kabar, spanduk, pamflet, booklet, kunjungan ke PKK Kecamatan dan kegiatan non formal lainnya
- 3) Informasi data dan dokumentasi kasus-kasus kekerasan dan bentuk ketidakadilan lainnya
- 4) Supporting kepada organisasi lain dengan memfasilitasi pelatihan
- 5) Pendampingan korban
- 6) Advokasi kebijakan (merekomendasikan Raperda dan mengupayakan alokasi anggaran daerah untuk kepentingan perempuan
- 7) Networking
- 8) Penguatan lembaga dan SDM (studi banding, bedah kasus, bedah UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak).

Pada poin 5 yaitu mengenai pendampingan korban, berikut ini merupakan macam-macam bentuk pelayanan pendampingan korban :

- 1) Konseling
- 2) Pendampingan Hukum
- 3) Rehabilitasi Medis, Psikososial, dan Ekonomi
- 4) Fasilitator untuk perempuan dan anak penyandang penyakit akut
- 5) Homevisit
- 6) Rujukan

Berikut ini ialah data jumlah kasus Penelantaran Anak yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro :

Tabel 4.12

Jumlah Kasus Penelantaran Anak di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro tahun 2011 s/d 2017

No.	Tahun	Jumlah kasus masuk Penelantaran Anak	Keterangan penyelesaian kasus
1.	2011	2	1 rehabilitasi ekonomi, 1 konseling.
2.	2012	2	konseling
3.	2013	1	konseling
4.	2014	-	konseling
5.	2015	1	konseling
6.	2016	1	konseling
7.	2017	3	konseling

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Dari hasil survey yang dilakukan di Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro, maka dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro dalam menangani kasus penelantaran anak yaitu klien diberikan pilihan 2 (dua) macam jalur penyelesaian kasus : jalur hukum atau jalur non hukum. Jika klien memilih jalur hukum maka kasus akan diberikan ke Kepolisian, sedangkan jika klien memilih jalur non hukum maka klien akan diberikan pendampingan berupa konseling, rehabilitasi ekonomi, dan rehabilitasi psikososial.⁹⁵

⁹⁵Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Mahfudhoh Suyoto, M.Si selaku Ketua Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro, pada tanggal 15 Februari 2018.

Setelah hasil survey mengenai penanganan kasus Penelantaran Anak yang didapatkan dari Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro, kemudian survey dilanjutkan di Polres Bojonegoro.

Hasil survey yang ditemukan dari Polres Bojonegoro ialah selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah ada kasus penelantaran anak yang masuk. Kasus yang masuk di Polres Bojonegoro ialah mengenai anak korban cabul, persetubuhan, aniaya, bawa lari (culik), perkosaan, keroyok.

Tabel 4.13

Data Jumlah Kejahatan Terhadap Anak pada tahun 2013-2017
di Polres Bojonegoro

No.	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cabul	1	-	-	4	2
2.	Persetubuhan	11	8	6	15	11
3.	Aniaya	6	4	8	7	10
4.	Bawa lari	1	1	1	3	-
5.	Perkosaan	-	-	-	1	-
6.	Keroyok	-	1	-	-	2

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018

Pada tahun 2013 pernah ada 2 kasus penelantaran rumah tangga. Pertama, kasus istri dan anak yang ditinggalkan oleh suami (kepala rumah tangga), anak dan istri tersebut tidak diberi nafkah, namun kemudian kasus tersebut dicabut oleh istri dikarenakan suami telah kembali dan berjanji akan memberi nafkah anak-anak serta istrinya. Kasus kedua pun sama yaitu istri dan anak tidak diberi nafkah

oleh suami (kepala rumah tangga), kasus ini pun juga tidak lanjut karena penyidik Polres Bojonegoro memberikan solusi damai (mediasi) kepada suami dan istri tersebut. Dasar pertimbangan penyidik ialah terkait dengan kondisi anak-anak, dikarenakan apabila suami (kepala rumah tangga) tersebut dipidana (kurungan penjara) maka anak-anak akan semakin parah mengalami kondisi penelantaran, sebab orang tua dari anak tersebut dipenjara dan tidak dapat memberikan perawatan terhadap anaknya.⁹⁶

Dalam hal ini kesimpulannya ialah Polres Bojonegoro dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Bojonegoro masih belum berjalan dengan efektif dan optimal. Ketidakefektifan penegakan hukum tersebut tentunya disebabkan adanya kendala. Berikut ini ialah kendala dalam proses penegakan hukum yang dihadapi Polres Bojonegoro :

1) Kurangnya Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Perlindungan Anak

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro, bahwa pernah terdapat 2 kasus penelantaran rumah tangga pada tahun 2013 tetapi kedua kasus tersebut tidak dilanjutkan dan salah satu kasus diselesaikan dengan cara mediasi yang dilakukan oleh penyidik. Namun menurut penulis penyelesaian kasus melalui mediasi yang digunakan penyidik untuk perkara penelantaran anak adalah kurang tepat.

Dalam perkembangan ranah hukum pidana, terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal, namun tidak semua perkara pidana dapat dilakukan mediasi penal. Kasus hukum yang memiliki preferensi

⁹⁶Hasil survey wawancara dengan Bapak Aiptu Kasdi selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro, tanggal 20 Februari 2018.

untuk diselesaikan melalui ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah sebagai berikut :

- a) “Kasus-kasus yang terhadap pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan negara. Ataupun, diprioritaskan guna tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan. Disamping itu, ADR juga bisa diperluas mencakup tindak pidana yang korbannya merupakan masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya.”
- b) “Tindakan pidana walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku), tetapi membutuhkan penyelesaian mengingat dampaknya langsung kepada masyarakat. Misalnya, dalam hal tindak pidana di bidang ekonomi bahwa negara mengharapkan adanya sebuah pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi.”⁹⁷

Dari sumber di atas, menjelaskan bahwa mediasi diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan. Sedangkan Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak, serta Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23/ 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik biasa. Maka menurut penilaian penulis, kurang tepat bila penyidik menggunakan cara mediasi untuk menyelesaikan perkara penelantaran anak atau penelantaran rumah tangga.

Secara parsial dan terbatas sifatnya, mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009

⁹⁷Lilik Mulyadi, **Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm 38.

tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu :

- a) “Mengupayakan penanganan tindak pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.”
- b) “Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan ADR haruslah disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.”
- c) “Penyelesaian tindak pidana yang menggunakan ADR haruslah berprinsip kepada musyawarah mufakat harus serta diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.”
- d) “Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR haruslah menghormati norma sosial/ adat serta memenuhi asas keadilan.”
- e) “Memberdayakan anggota Polmas serta memerankan FKPM yang terdapat di wilayah masing-masing guna mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang memiliki kerugian materi kecil serta memungkinkan guna diselesaikan melalui konsep ADR.”

- f) “Dalam hal kasus yang mampu diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.”⁹⁸

Kemudian dalam Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri ditentukan bahwa penerapan Konsep ADR (pada pola penyelesaian masalah sosial melewati jalur alternatif yang lebih efektif berupa dalam upaya menetralsir masalah selain melewati proses hukum atau litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

Pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagaimana konteks di atas diatur secara parsial, terbatas dan gradasi pengaturannya diatur pada level di bawah undang-undang. Akan tetapi, dalam batas pengaturan ditingkat undang-undang, untuk perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan ada penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan akan tetapi tidak termasuk ruang lingkup mediasi penal. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

- a) “Dalam hal tindak pidana dilakukan secara “pelanggaran yang diancam dengan pidana denda”. Ketentuan Pasal 82 KUHP yang dapat menentukan kewenangan/hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum guna pelanggaran tersebut dan

⁹⁸*Ibid*, hlm 39.

biaya-biaya yang dikeluarkan kalau penuntutan sudah dilakukan. Pada dasarnya, ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut dikenal dengan bahasa “*afkoop*” atau “pembayaran denda secara damai” yang adalah bagian salah satu dari alasan penghapus penuntutan.”

- b) “Dalam hal perkara pidana dilakukan oleh anak dibawah usia 8 (delapan) tahun. berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan mengenai batas usia anak nakal yang bisa diajukan ke Pengadilan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun serta belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Khusus terhadap anak dibawah usia 8 (delapan) tahun, penyidik bisa menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, ataupun orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina ataupun diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh.”
- c) “Dalam hal terjadi adanya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat 7, Pasal 76 ayat 1, Pasal 89 ayat 4 dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberi kewenangan terhadap komnas HAM guna melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM. Aspek ini sifatnya hanya bersifat parsial, dikarenakan tidak ada peraturan secara tegas menyatakan bahwa semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM, karena peraturan Pasal 89 ayat (4) menentukan bahwa Komnas HAM dapat hanya memberi saran terhadap para pihak guna menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, ataupun hanya memberi rekomendasi kepada pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti

penyelesaiannya. Selain itu juga ketentuan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tidak mengatur secara tegas yang menyatakan bahwa akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan, tetapi berdasarkan Pasal 96 ayat (3) hanya ditentukan bahwa, keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.”⁹⁹

Dari penjelasan Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri di atas, maka penulis menilai bahwa perkara penelantaran anak atau penelantaran rumah tangga ini tidak dapat semudah itu dapat diselesaikan melalui mediasi langsung oleh penyidik, karena terdapat langkah-langkah penanganan kasus jika ingin diselesaikan melalui mediasi. Mediasi juga harus mempertimbangkan keadilan atas kerugian yang dialami oleh anak karena kehilangan hak-haknya.

- 2) Tidak adanya Koordinasi antara Polres Bojonegoro dengan Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro

Kendala lain dalam proses penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak di Bojonegoro adalah tidak adanya koordinasi antar instansi terkait yaitu antara Polres Bojonegoro, Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro.

⁹⁹*Ibid*, hlm 40-42.

Tidak adanya koordinasi antara ketiga instansi yang saling berkaitan dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak tersebut, dikarenakan tidak pernah diadakan pertemuan rutin antara ketiga instansi, sehingga tidak terjalin kerjasama yang baik untuk menangani permasalahan penelantaran anak. Masing-masing instansi hanya menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk instansi tersebut saja. Hal ini membuat usaha dalam pemberantasan tindak pidana penelantaran anak menjadi tidak berjalan optimal.¹⁰⁰

Dapat dinilai pula dari hasil penelitian penulis di Polres Bojonegoro yang tidak pernah menangani kasus penelantaran anak selama 3 (tiga) tahun terakhir, Polres Bojonegoro menangani kasus penelantaran anak yaitu terakhir pada tahun 2013 yang mana kasus tersebut keduanya diselesaikan melalui mediasi. Jika dibandingkan dengan data kasus penelantaran anak dari Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro yang pada setiap tahunnya selalu ada kasus masuk tentang penelantaran anak, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Polres Bojonegoro tidak pernah ada kerjasama dengan instansi-instansi lain di Bojonegoro untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Bojonegoro.

c. Budaya Hukum

Komponen budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat baik secara positif maupun negatif yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaga. Budaya hukum dapat juga diartikan sebagai keseluruhan

¹⁰⁰Hasil survey wawancara dengan Bapak Aiptu Kasdi selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro, tanggal 20 Februari 2018.

jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap yang mempengaruhi hukum.¹⁰¹

Penulis menemukan bahwa terdapat budaya hukum yang ternyata menjadi kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak di Bojonegoro. Berikut ini ialah budaya hukum yang menjadi kendala :

1) Kurangnya Keaktifan Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kab. Bojonegoro

Kurang aktif maksudnya ialah, Polisi terbiasa dengan hanya menunggu laporan dan aduan masuk. Sebab di Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro pada setiap tahunnya ditemukan kasus penelantaran anak, sedangkan di Kepolisian Bojonegoro tidak ada kasus masuk. Jika kita melihat pula Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak, serta Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT adalah delik biasa bukan delik aduan. Maka Polisi dalam hal ini dituntut untuk aktif melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak, tidak sekedar menunggu laporan dan aduan masuk.

Apabila SDM kurang dikarenakan wilayah Bojonegoro yang luas terdiri dari 28 kecamatan, setidaknya Polisi dapat melakukan kerja sama dengan cara mengadakan pertemuan rutin bersama instansi-instansi lainnya agar dapat saling bertukar informasi, karena banyak ditemukan kasus penelantaran anak di Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro yang mungkin tidak dapat lagi

¹⁰¹Edi Setiadi dan Kristian, Op.cit, hlm 14.

dilakukan penanganan oleh Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro, melainkan harus Polisi yang menangani.

2) Rendahnya Kesadaran Hukum Orang Tua tentang Hukum Perlindungan Anak

Perihal rendahnya kesadaran hukum orang tua tentang hukum perlindungan anak ini, penulis ketahui dari hasil wawancara terhadap pegawai Dinas Sosial Bojonegoro. Menurut Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pelaksanaan program kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam menangani perkara Penelantaran Anak ternyata memiliki kendala yaitu dari orang tua.

Pihak Dinas Sosial telah melakukan upaya-upaya yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua, bahwa anak perlu dipenuhi hak-haknya dalam hal pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Dikarenakan anak sebagai tunas, potensi, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan untuk bangsa dan negara pada masa depan, supaya semua anak kelak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka anak butuh memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya guna tumbuh serta berkembang secara optimal, yaitu meliputi fisik, mental ataupun sosial, serta berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan oleh anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta tanpa adanya perlakuan diskriminasi.¹⁰²

Beberapa orang tua yang telah mendapat penyuluhan dari pihak Dinas Sosial, namun masih ditemukan orang tua yang tidak memperhatikan Hak-hak Anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua terhadap anak. Masih ditemukan anak yang sengaja disuruh orang tua untuk mencari uang menjadi pengamen, ada anak yang dibiarkan saja oleh orang tuanya meskipun orang tua melihat anak tersebut mengamen, kemudian ada banyak anak yang akhirnya putus sekolah, kesehatannya pun juga tidak terjaga, serta berbagai situasi dan kondisi buruk lainnya yang menyebabkan suatu bentuk penelantaran terhadap anak. Hal yang menyebabkan orang tua tidak memperhatikan pemenuhan hak-hak anak ialah karena rendahnya kesadaran hukum orang tua tentang hukum perlindungan anak. Ada beberapa orang tua yang sebenarnya sudah paham hukum, namun kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku belum tumbuh dalam diri orang tua tersebut.¹⁰³

3) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Hukum Perlindungan Anak

Pada umumnya orang berpendapat jika kesadaran warga masyarakat terhadap hukum tinggi, maka akan membuat warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila

¹⁰²Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Bapak Doni selaku pegawai Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

¹⁰³Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Bapak Doni selaku pegawai Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya pun juga rendah.

Pernyataan yang lain adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum mempunyai beberapa masalah di antaranya : apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat. Misalnya, pada pelaksanaan pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara tegas berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Pasal tersebut apabila penulis mengkaji unsur-unsurnya, unsur subyek : Setiap orang, unsur subyektif : dilarang (baik sengaja maupun tidak sengaja), unsur perbuatan : menempatkan, membiarkan, melibatkan, melibatkan, perlakuan salah, dan penelantaran dan obyeknya : anak.

Pada masyarakat Bojonegoro, selama peneliti membuat tugas akhir terdapat pada rentang 3 tahun terdapat banyak kasus penelantaran anak yang tercatat dalam Dinas Sosial. Peraturan perundang-undangan yang secara tegas dibuat tertulis oleh pemerintah dan penerapan sanksi bagi seseorang yang melakukan penelantaran pada pasal 77B, dapat dipidana paling lama 5 Tahun dan atau denda sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pasal tersebut menurut peneliti tidak berjalan dengan baik (tidak efektif) karena tidak ada catatan dalam polres kepolisian bojonegoro, tidak adanya kasus yang diselesaikan dalam ranah hukum, bahkan penyidik pun justru melakukan mediasi kepada pelaku penelantaran.

Masyarakat Bojonegoro belum memiliki kepedulian mengenai masalah penelantaran anak. Masyarakat terkesan membiarkan masalah penelantaran anak ini terus berlanjut, karena kepekaan dan tak adanya kontribusi terhadap permasalahan penelantaran anak ini. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, ketika masyarakat melihat ada anak-anak yang mengamen di lampu merah dan tempat makan, mengemis di pinggir jalan, namun masyarakat membiarkannya. Padahal kondisi yang dialami anak tersebut dapat mengganggu perkembangan anak. Hal demikian menunjukkan bahwa masyarakat tidak peduli terhadap kondisi anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengajak anak-anaknya mengamen hingga putus sekolah, namun masyarakat juga bersikap acuh. Ditambah lagi dengan keadaan penduduk di wilayah tempat tinggal anak tersebut ternyata sudah terbiasa dengan kondisi anak-anak di wilayah tersebut yang mengamen, mengemis, memulung, dan bentuk pekerjaan terburuk anak lainnya.¹⁰⁴

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang hukum perlindungan anak ini merupakan *Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusuinya (Pasal 340 KUHP). Masyarakat yang tidak berbuat apapun padahal masyarakat sebenarnya melihat adanya indikasi terjadi penelantaran anak, maka menurut *Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa* masyarakat telah melakukan pelanggaran larangan.

¹⁰⁴Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Bapak Doni selaku pegawai Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

Dalam semua komponen penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Bojonegoro, dilihat dari segi substansi hukum, segi struktur hukum, dan segi budaya hukum, hasil penelitian penulis adalah ketiga komponen tersebut mengalami kendala.

Maka kesimpulannya penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Bojonegoro belum mencapai tujuan hukum. Tujuan Hukum dapat dicapai secara efektif, jika : (1) substansi hukum dibangun atas dasar nilai sosial dalam Budaya Hukum Masyarakat setempat; dan (2) jika struktur (lembaga hukum) beserta SDM menginternalisasi nilai sosial dalam Budaya Hukum Masyarakat setempat.¹⁰⁵

Kemudian terkait dengan perihal data yang masuk di Polres Bojonegoro tidak ada, namun di Dinas Sosial Bojonegoro ada banyak, sebab adanya perbedaan definisi antara anak terlantar di Dinas Sosial dan anak terlantar di Polres Bojonegoro.

Penulis di atas telah menjelaskan dan menganalisis mengenai Faktor Hukum yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak. Maka, di bawah ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis mengenai Faktor Non Hukum yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak yaitu meliputi Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga, dan Faktor Lingkungan.

¹⁰⁵Nurhasan Ismail, **Sosiologi Hukum**. Aditya Media, Yogyakarta, 2013, hlm 42.

2. Faktor Non Hukum

1) Faktor Ekonomi

Dari penelitian yang penulis lakukan di Bojonegoro mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak, penulis mendapatkan hasil bahwa Faktor Ekonomi menjadi pengaruh terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak di Bojonegoro.

Penulis melakukan wawancara dengan orang tua dan anak di Bojonegoro yang datanya penulis dapatkan dari Dinas Sosial Bojonegoro. Berikut ialah hasil wawancara :

- AG, usia 14 th, yaitu salah satu anak yang menjadi korban penelantaran anak dalam hal pendidikan, dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan. Seharusnya ia telah memasuki bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun dikarenakan orang tua yang tidak memiliki biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, maka AG sengaja tidak meneruskan jenjang pendidikannya ke taraf Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ayah AG Bapak YS bekerja sebagai kuli bangunan, namun apabila tidak ada pekerjaan untuk menjadi kuli bangunan, maka Pak YS terpaksa menganggur. Pendapatan keluarga Agus di bawah Rp 500.000,- per bulannya, dan pastinya tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah AG ke jenjang yang lebih tinggi. Maka, kedua orang tua Agus memutuskan untuk tidak menyekolahkan AG ke tingkat SMP

karena keterbatasan biaya, namun orang tua AG berjanji akan menyekolahkan AG lagi jika sudah ada biaya. Sehingga dalam kasus ini AG merupakan anak yang mengalami penelantaran dalam hal pendidikan dikarenakan kemiskinan keluarganya.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka penulis menganalisis menggunakan teori dari Robert K.Merton yang mengadopsi konsep *anomie* Emile Durkheim untuk menjelaskan perilaku menyimpang di kalangan warga kulit hitam Amerika. Menurut Merton, *anomie* diartikan kembali yaitu ketidaksesuaian atau timbulnya perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat dari cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Karena itu, menurut John Hagan, teori *anomie* Robert K. Merton mengacu pada kelas (*"Merton is in exploring variations in crime and deviance by social class"*).

Merton menjelaskan bahwa di masyarakat Amerika, telah tercipta suatu prinsip untuk mengejar sukses semaksimal mungkin, dan pada umumnya sukses tersebut diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.¹⁰⁷ Guna mencapai sukses dimaksud, masyarakat telah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui serta dibenarkan yang haruslah ditempuh seseorang. Namun demikian dalam kenyataannya tidak semua orang dapat mencapai cita-cita yang dimaksud melewati cara-cara yang telah dibenarkan tersebut. Oleh karena itu, terdapat individu-individu

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan anak dan orang tua, pada tanggal 1 Juli 2015, diolah.

¹⁰⁷Indah Sri Utari, **Aliran dan Teori dalam Kriminologi**, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 94.

yang berusaha meraih cita-cita tersebut melalui cara-cara yang menyimpang.

Pada umumnya menurut Merton, mereka yang melakukan cara-cara yang menyimpang dimaksud adalah mereka yang berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Penyimpangan oleh golongan ini merupakan akibat dari ketidaksamaan kondisi sosial antara mereka dengan golongan elit dan mayoritas. Inilah yang menurut pandangan Merton disebut sebagai struktur masyarakat yang anomistis.

Individu dalam keadaan di masyarakat yang diartikan “anomistis” selalu dihadapkan dengan adanya tekanan psikologis atau *strain* karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya, ataupun dalam kesempatan yang sangat terbatas. Menegaskan kembali konsep anominya, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya dalam tingkah laku yang menyimpang.

Teori *anomie* Merton sebenarnya menjelaskan tentang korelasi perilaku delinkuen dengan kondisi anomistis dalam struktur sosial. Oleh karena itu, ada 2 unsur perilaku delinkuen yaitu unsur struktur sosial dan kultural.¹⁰⁸ Unsur kultur menciptakan *goals* dan unsur struktural menciptakan *means*. *Goals* ialah tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya yang meliputi kerangka aspirasi dasar dari manusia. Sedangkan *means*

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 95.

artinya aturan dan cara kontrol yang ada dan diterima sebagai sarana guna mencapai tujuan. Karena itu, Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociate goals*) dan sarana-sarana yang diterima (*acceptable means*) guna mencapai tujuan. Didalam perkembangan selanjutnya, pengertian *anomie* mengalami perubahan yaitu adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Dalam pencapaian tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan (*illegitimate means*). Aspek ini dikarenakan, menurut Merton, struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misal, mereka yang dari kelas rendah (*lower class*) memiliki kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibanding dengan mereka yang dari kelas tinggi (*uper class*).

Keadaan-keadaan tersebut adalah tidak meratanya sarana dan perbedaan-perbedaan kesempatan, akan menimbulkan frustasi pada kalangan warga yang tidak memiliki kesempatan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian ketidakpuasan, frustasi, konflik, dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan.¹⁰⁹ Situasi ini akan menimbulkan keadaan dimana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut yang disebut “*anomie*”.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 96.

Melalui penjelasan teori *anomie* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton di atas, apabila dikaitkan dengan kasus penelantaran anak oleh orang tua di Kabupaten Bojonegoro, maka dalam hal ini orang tua memiliki cita-cita/ tujuan untuk mengejar sukses semaksimal mungkin, yaitu ingin membiayai segala keperluan untuk anak-anaknya. Tetapi orang tua dihadapkan pada kondisi tekanan (*strain*), yaitu kekurangan ekonomi. Orang tua tidak mampu untuk beradaptasi dan bersaing seperti orang tua lainnya yang dapat membiaya segala keperluan untuk anak-anaknya. Orang tua yang berasal dari kelas rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan, apabila dibandingkan dengan orang tua yang berasal dari kelas tinggi (*uper class*).

Keadaan tersebut yaitu tidak meratanya sarana dan perbedaan-perbedaan kesempatan akan menimbulkan frustasi orang tua yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai cita-cita/ tujuan. Dengan demikian ketidakpuasan, frustasi, konflik, dan penyimpangan muncul, karena tidak adanya kesempatan bagi orang tua untuk mencapai cita-cita/ tujuan. Situasi ini akan menimbulkan keadaan dimana para orang tua tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Kondisi inilah yang disebut dengan “*anomie*”.

Apabila sudah berada pada keadaan anomie, kemudian para orang tua menggunakan cara untuk mengatasi keadaan anomie. Terdapat 5 (lima) mode adaptasi kepribadian yang merepresentasikan tipe-tipe penyesuaian pada sarana dan tujuan masyarakat untuk mengatasi keadaan anomie.

Kemudian dikaitkan dengan kasus penelantaran anak oleh orang tua di Kabupaten Bojonegoro, terdapat mode adaptasi kepribadian yaitu *Innovation* (inovasi), keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam hal ini orang tua mengakui adanya norma (aturan) yang telah dibenarkan oleh pemerintah/ negara untuk mencapai cita-cita/ tujuan yaitu proses untuk memperoleh uang, namun orang tua mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Para orang tua menyuruh anak-anak mereka untuk mencari uang dengan bekerja, mengemis, memulung, dan pekerjaan lainnya yang tidak pantas dilakukan anak tersebut untuk mencapai tujuan orang tua yaitu kondisi ekonomi yang lebih /baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua dalam meraih cita-cita/ tujuan tersebut melalui cara-cara yang menyimpang.

Dalam tulisan yang sangat berpengaruh bagi penganut aliran sosialis di tahun 1850-an, Karl Marx Angels menyatakan bahwa kejahatan dipengaruhi tekanan ekonomi, untuk melawan kejahatan harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain, kemakmuran akan dapat mengurangi tingkat terjadinya kejahatan. Sutherland dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam determinisme ekonomi, tingkat kejahatan (kriminalitas) merupakan konsekuensi masyarakat kapitalis atau sistem ekonomi yang diwarnai penindasan terhadap buruh sehingga menciptakan faktor yang dapat mendukung terjadinya berbagai bentuk kejahatan.¹¹⁰

¹¹⁰Edwin H. Sutherland & Donald R, Cressey, **Principle of criminology**, Six Edition, J.B.Lippincott, New York, 1960, hlm 56.

Lebih lanjut dijelaskan, kejahatan dipandang sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya saja. Menurut WA Bonger, ajaran ini telah menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap dapat memiliki hubungan sebab akibat. **Determinisme ekonomi** dimulai dengan sebuah hipotesa serta kumpulan bahan nyata lalu melalui cara yang memungkinkan orang lain guna mengulangi penyelidikan dan menguji kembali kesimpulannya.¹¹¹

Sementara itu, mengenai kejahatan dan hubungannya dengan kondisi ekonomi, Sudjono merumuskan dua pertanyaan mengenai hal tersebut, yakni :

- 1) Apakah orang-orang dari ekonomi lemah lebih sering terlibat dari pada orang yang kedudukan ekonominya kuat?
- 2) Apakah meningkatnya kejahatan sesuai dengan ketika meningkatnya kebutuhan di dalam periode tekanan ekonomi?¹¹²

Dari dua prinsip diatas, dapat disampaikan sejumlah pendapat yang mendekati kebenaran, yaitu :

Kelas ekonomi yang lemah merupakan tempat bagi meningkatnya kejahatan dari pada golongan yang ekonominya kuat, hal ini disimpulkan dari dua tipe data :

- i. Arrest : orang hukuman dan orang yang terlibat kejahatan adalah sebagian besar berasal dari orang yang ekonominya lemah akibat

¹¹¹Yesmil Anwar, Adang, **Pembaruan Hukum Pidana : reformasi hukum**, Grasindo, Jakarta, 2011, hlm 210-211.

¹¹²Sudjono, **Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian**, Tarsito, Bandung, 1974, hlm 160.

lingkungan penduduk di dalam kelas tersebut dan mengakibatkan orang dewasa dan kejahatan anak-anak.

- ii. Perbandingan *delinquency* dan tingkatan kejahatan dari berbagai daerah yang status ekonominya berbeda-beda. SHOW dan MC KAY berkesimpulan “berbagai tingkatan dari pada catatan mengenai *delinquency* dalam masyarakat suatu kota sangat erat hubungannya dengan berbagai status ekonomi”. Tingkat kejahatan tertinggi terdapat dalam masyarakat yang mempunyai posisi paling tidak menguntungkan dalam jatah perekonomian, namun *white collar crime* tidak termasuk dalam statistic resmi tentang kejahatan.

Melalui penjelasan **teori determinisme ekonomi** yang dipelopori oleh **Karl Marx** serta diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya, apabila dikaitkan dengan kasus penelantaran anak oleh orang tua, maka dapat diketahui bahwa orang tua yang melakukan tindakan penelantaran anak tersebut dipengaruhi oleh faktor status ekonomi. Para orang tua di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki status ekonomi rendah rentan mengakibatkan terjadinya kejahatan yaitu salah satunya melakukan penelantaran terhadap anak-anaknya. Untuk mengatasi terjadinya penelantaran anak tersebut, orang tua harus meningkatkan status ekonominya. Dengan kata lain, kemakmuran akan dapat mengurangi tingkat terjadinya suatu kejahatan. Dikarenakan tingkat kejahatan tertinggi terdapat dalam masyarakat yang mempunyai posisi paling tidak menguntungkan dalam jatah perekonomian.

2) Faktor Keluarga

Dari penelitian yang penulis lakukan di Bojonegoro mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak, penulis mendapatkan hasil bahwa Faktor Keluarga menjadi pengaruh terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak di Bojonegoro.

Penulis melakukan wawancara dengan orang tua dan anak di Bojonegoro yang datanya penulis dapatkan dari Dinas Sosial Bojonegoro. Berikut ialah hasil wawancara :

- WK, usia 11 tahun, merupakan korban penelantaran anak dalam hal pendidikan dikarenakan kedua orang tuanya cerai dan ibunya pergi bekerja ke luar kota kemudian WK ditinggalkan dan dirawat oleh Kakek dan Neneknya. Kakek WK berusia 66 th bekerja sebagai Tukang Becak, dan pendapatannya pun tidak menentu, dan Nenek kondisi yang sudah lemah dan sedang sakit. Karena keterbatasan biaya inilah yang mengakibatkan WK memilih untuk putus sekolah serta tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Sehingga dalam kasus ini ditemukan kasus penelantaran anak dalam hal pendidikan dikarenakan situasi keluarga yang tidak utuh.
- BA adalah seorang anak berusia 13 th yang menjadi korban penelantaran anak dikarenakan situasi keluarga yang tidak utuh yaitu kedua orang tuanya bercerai. Perceraian kedua orang tuanya terjadi 3 tahun yang lalu mengakibatkan BA tidak bersekolah lagi. Kini BA tinggal bersama dengan Ibunya beserta kedua adeknya yang berusia 7 th dan 5 th. Ibu BA kesehariannya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Upah sebagai

pembantu rumah tangga dinilai tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari 3 orang anak tersebut. Penulis tidak mengetahui penyebab kedua orang tuanya bercerai, namun yang di alami oleh BA saat ini ialah ia berhenti sekolah ketika Ayahnya menceraikan Ibunya dan Bima tidak mendapatkan hak pendidikan sebagai seorang anak, dikarenakan kondisi ekonomi yang buruk semenjak orang tuanya bercerai.¹¹³

Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan kajian ilmu sosiologi hukum untuk menganalisis, karena menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹¹⁴ Sebagai contoh : Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyebutkan, “apabila seorang suami bermaksud guna beristri lebih dari seorang, maka dirinya wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”¹¹⁵ Berikut ini ialah bagan yang menggambarkan mengenai metode kajian sosiologi hukum :

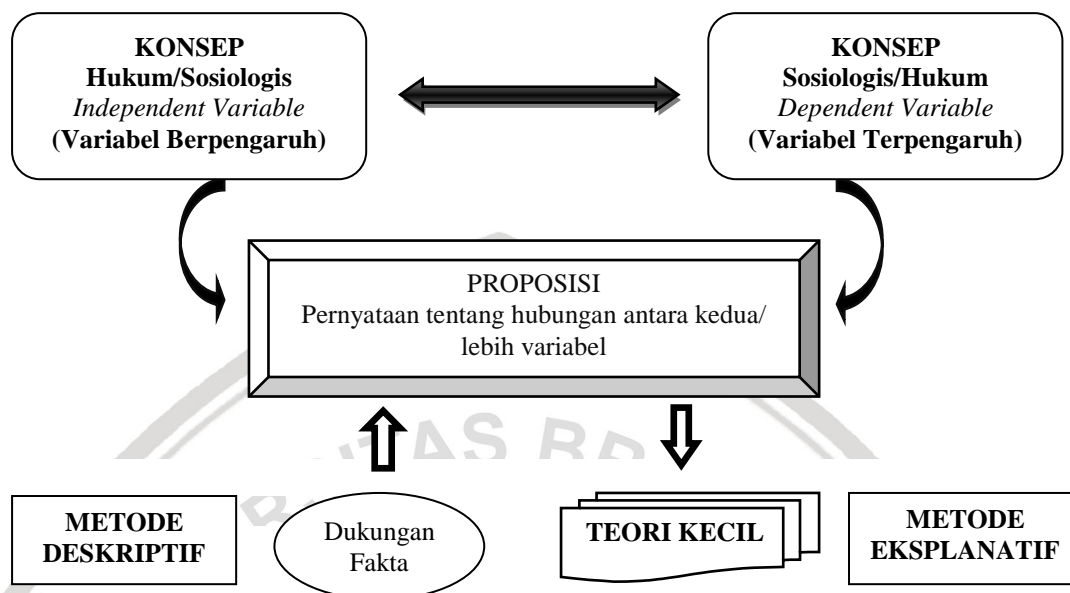
¹¹³Hasil Wawancara dengan anak dan orang tua, pada tanggal 1 Juli 2015, diolah.

¹¹⁴Soerjono Soekanto, **Mengenal Sosiologi Hukum**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 11.

¹¹⁵Ali Zainudin, **Sosiologi Hukum**. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 15.

Bagan 4.5

Orientasi dan Metode Kajian Sosiologi Hukum

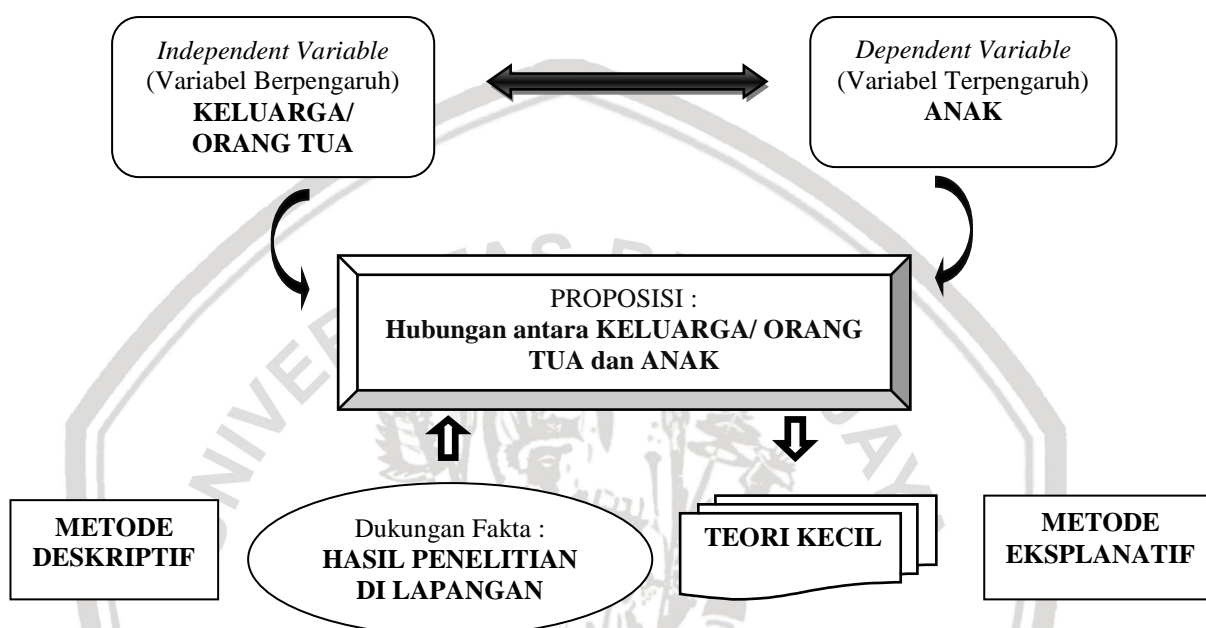


Berdasarkan pemaparan bagan diatas diketahui bahwa *Independent Variable* (Variabel Berpengaruh) atau dapat disebut penyebab dari timbulnya variabel selanjutnya, adalah sejumlah gejala atau unsur yang menentukan ada atau munculnya gejala atau unsur lain. Unsur lain yaitu *Dependent Variable* (Variabel Terpengaruh), sebagai akibat dari adanya variable berpengaruh, ini artinya tidak akan muncul variabel terpengaruh tanpa hadirnya variabel berpengaruh. *Dependent variable* (Variabel Terpengaruh) adalah sejumlah gejala atau unsur yang ada atau muncul ditentukan dan dipengaruhi oleh adanya variabel berpengaruh tertentu. Artinya, variabel ini akan muncul jika ada variabel berpengaruh yang mengikatnya. Kemudian antara kedua/ lebih variabel tersebut memiliki suatu proposisi. Yang mana proposisi ini apabila

mendapatkan dukungan fakta yaitu berdasarkan hasil penelitian, maka akan muncul suatu Teori Kecil (*small theory*).

Bagan 4.6

Penerapan Metode Kajian Sosiologi Hukum



Berdasarkan pemaparan bagan diatas, *Independent Variable* (Variabel Berpengaruh) atau dapat disebut penyebab dari timbulnya variabel selanjutnya, adalah Keluarga¹¹⁶/ Orang Tua¹¹⁷. Sedangkan *Dependent Variable* (Variabel Terpengaruh) sebagai akibat dari adanya variable berpengaruh adalah Anak¹¹⁸.

Kemudian antara kedua variabel tersebut memiliki suatu proposisi yaitu jika keluarga/ orang tua harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya

¹¹⁶Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. (Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

¹¹⁷Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. (Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

¹¹⁸Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

kepada anak, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka anak akan terpenuhi Hak-haknya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan fakta yang terjadi di lapangan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 685 keluarga/ orang tua, tahun 2016 sebanyak 633 keluarga/ orang tua, dan tahun 2017 sebanyak 39 keluarga/orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dalam hal ini anak menjadi kehilangan Hak-haknya.

Berdasarkan fakta tersebut, maka muncul Teori Kecil (*small theory*) yaitu : Orang tua/ keluarga yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan seorang anak. Keluarga yang menjadi tempat pertama seorang anak memulai kehidupannya. Mengasuh, membina dan mendidik anak di rumah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua untuk membentuk pribadi anak. Keluarga sangat berpengaruh terhadap sosialisasi anak.¹¹⁹ Dalam hal ini Pemerintah telah membuat Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

¹¹⁹Soerjono Soekanto. **Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal, Remaja dan Anak**. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 70.

Dalam Rumah Tangga yang di dalamnya mencakup hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab keluarga serta orang tua serta pemerintah terhadap anak guna memberikan perlindungan terhadap anak. Terkhusus didalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak, pasal 58 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pasal 5 huruf (d) serta pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23/ 2004 tentang PKDRT telah melarang perlakuan penelantaran terhadap anak dan memiliki konsekuensi hukum.

Tetapi dalam pelaksanaannya peraturan tersebut kurang berjalan optimal, karena ditemukan fakta ada keluarga/ orang tua di Bojonegoro yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang telah di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak dilaksanakannya kewajiban dan tanggung jawab oleh keluarga/ orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut, dikarenakan situasi keluarga/ orang tua yang mengalami kondisi kemiskinan, pendidikan rendah, dan perceraian. Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan salah satu faktor terjadinya penelantaran anak, sehingga dapat berpengaruh pula dalam melakukan penegakan hukumnya.

3) Faktor Lingkungan

Dari penelitian yang penulis lakukan di Bojonegoro mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak, penulis mendapatkan hasil bahwa Faktor Lingkungan menjadi pengaruh terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak di Bojonegoro.

Penulis melakukan wawancara dengan orang tua dan anak di Bojonegoro yang datanya penulis dapatkan dari Dinas Sosial Bojonegoro. Berikut ialah hasil wawancara :

- MA, usia 12 th, ialah seorang anak yang menjadi korban penelantaran anak.

MA sudah 2 tahun menjadi pengamen di jalanan dengan alasan untuk membantu kebutuhan keluarga dan karena keterbatasan biaya maka MA belum dapat meneruskan sekolahnya. Dalam wawancara penulis dengan MA, ia mengatakan bahwa menjadi pengamen di usianya yang 12 th ini sudah menjadi kebiasaan anak-anak yang tinggal di wilayah desanya, karena mayoritas penduduk disana ialah miskin. Ketika penulis menanyakan hal ini pada kedua orang tua MA, orang tuanya pun hanya bisa berpasrah dan menjawab bahwa sudah terbiasa anaknya mengamen dengan teman-temannya sejak ia masih berusia 9 th, karena kondisi perekonomian keluarga yang memaksa MA diperbolehkan untuk mengamen. Ayah MA bekerja sebagai buruh tani dan Ibunya tidak bekerja. Kedua orang tua yang seakan mendukung anaknya melakukan kegiatan mengamen mencari uang di jalanan tersebut, mengakibatkan sang anak tidak menyadari bahwa hal yang dilakukannya ialah salah. Seharusnya orang tua bagaimanapun juga wajib bertanggungjawab atas kehidupan anaknya, bukan anak yang akhirnya mencari uang sendiri untuk keperluannya. Kemudian dari segi budaya masyarakat di sekitar juga sudah terbiasa membiarkan anak-anak yang mengamen, mengemis, menjadi pemulung untuk menambah kebutuhan sehari-hari. MA tidak ingin melanjutkan sekolahnya dikarenakan melihat

teman-teman MA yang juga rata-rata putus sekolah dan anak-anak disana justru lebih senang mencari uang padahal usianya belum mencukupi.

- BA adalah seorang anak berusia 13 th yang menjadi korban penelantaran anak dikarenakan situasi keluarga yang tidak utuh yaitu kedua orang tuanya bercerai. Perceraian kedua orang tuanya terjadi 3 tahun yang lalu yang mengakibatkan BA tidak bersekolah lagi. Kini BA tinggal bersama dengan Ibunya beserta kedua adeknya yang berusia 7 th dan 5 th. Ibu BA bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Upah sebagai pembantu rumah tangga dinilai tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari 3 orang anak tersebut. Penulis tidak mengerti apa penyebab kedua orang tuanya bercerai, namun yang di alami oleh BA saat ini ialah ia berhenti sekolah ketika Ayahnya menceraikan Ibunya dan BA tidak mendapatkan hak pendidikan sebagai seorang anak, dikarenakan kondisi ekonomi yang rendah semenjak orang tuanya bercerai. BA juga terpaksa mencari uang untuk membantu keperluan kebutuhan keluarga dengan mengamen di jalanan bersama teman-temannya. Orang tua BA pun juga tidak melarang BA untuk mengamen, karena memang kondisi ekonomi keluarga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari anak-anaknya. Masyarakat sekitar pun juga sudah terbiasa dengan kondisi anak-anak yang ada di desa tersebut tiap harinya mencari uang dengan mengemis, mengamen, menjadi pemulung. BA mengakui bahwa dirinya mengamen atas ajakan dari seorang tetangganya yang juga menjadi pengamen, alasan BA mengamen ingin memiliki uang jajan sendiri dan tidak ingin bergantung pada orang tua. Dari segi kondisi tempat BA tinggal juga mempengaruhi perkembangannya,

tempat ia tinggal sangat kumuh dan kotor, kondisi lingkungan tersebut jelas mempengaruhi tumbuh kembang anak.¹²⁰

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka penulis menganalisis menggunakan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dari Edwin Sutherland untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu.¹²¹ Teori ini mengindikasikan bahwa individu menjadi condong pada kriminalitas karena ekspos kontak yang mendukung perilaku kriminal. Karena kontak-kontak inilah seseorang akan cenderung mempelajari dan menerima nilai-nilai dan sikap yang terlihat lebih mendukung kriminalitas.¹²²

Kemudian **menurut Manouvrier**, kejahatan dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukurnya. Menurutnya kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang. Serta seorang antropolog bernama Tarde juga menggunakan milieu atau lingkungan sebagai landasan teorinya yang menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain.¹²³

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) yang dipelopori oleh Albert Bandura juga menjelaskan bahwa suatu perilaku seseorang dipengaruhi oleh karena pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan anak dan orang tua, pada tanggal 1 Juli 2015, diolah.

¹²¹ Topo Santoso, **Kriminologi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 74.

¹²² Frank E.Hagan, **Pengantar Kriminologi**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 226.

¹²³ *Ibid*, hlm 25.

disertai nilai-nilai serta pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.¹²⁴ Dalam perkembangan lahirnya teori-teori mengenai kejahatan, terdapat 3 mazhab atau aliran yaitu aliran klasik, aliran neo klasik, dan aliran positifis. Secara garis besar aliran positifis ini membagi dirinya menjadi 2 pandangan yaitu : Determinisme Biologis dan *Determinisme Cultural*. Dalam pandangan determinisme cultural merupakan teori-teori yang mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.¹²⁵

Berdasarkan pemaparan teori-teori kriminologi di atas yaitu Teori Asosiasi Diferensial, Teori Pembelajaran Sosial, dan Aliran/ mazhab Determinisme Cultural apabila dikaitkan dengan hasil penelitian penulis berupa kasus penelantaran anak di Kabupaten Bojonegoro ialah lingkungan tempat tinggal orang tua yang mayoritas penduduknya tidak menyekolahkan anak-anaknya hingga menyuruh anak di bawah umur tersebut untuk mencari uang, berpengaruh terhadap penduduk lain yang telah melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang berada pada lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta tidak menyuruh anak untuk mencari uang dengan cara mengamen lalu meninggalkan sekolahnya, seperti halnya dilakukan oleh orang tua yang tinggal berada di lingkungan sekitarnya. Kondisi inilah yang mengakibatkan anak menjadi terlantar.

Menurut Thorsten Sellin, dengan teorinya yaitu **Teori Konflik Budaya** (*Culture Conflict Theory*) menjelaskan bahwa *conduct norms* (suatu norma-norma yang telah mengatur kehidupan kita sehari-hari) adalah aturan-aturan

¹²⁴ *Ibid*, hlm 54.

¹²⁵ *Ibid*, hlm 23.

yang merefleksikan sikap-sikap dari sebuah kelompok-kelompok yang masing-masing dari kita mempunyai. Tujuan dari norma-norma tersebut merupakan guna mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tingkah laku yang pantas ataupun normal serta apa yang dianggap perilaku tak pantas ataupun abnormal. Menurut Sellin, setiap kelompok memiliki *conduct norms*-nya sendiri serta bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lainnya. Seorang individu yang telah mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan sebuah kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini, perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal merupakan bahwa masing-masing menganut perangkat *conduct norms* yang berbeda.

Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi apabila suatu norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Pertentangan itu dapat terjadi di perbatasan antara area-area budaya yang telah berdekatan, apabila hukum dari satu kelompok budaya meluas jadi mencakup wilayah dari kelompok budaya yang lain, ataupun apabila anggota-anggota dari sebuah kelompok berpindah ke budaya yang lain. Konflik sekunder muncul apabila satu budaya berkembang telah menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat *conduct norms*-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi apabila satu masyarakat homogen ataupun sederhana menjadi masyarakat-masyarakat yang kompleks yang sejumlah

kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan serta norma-norma seringkali tertinggal.¹²⁶

Berdasarkan pemaparan teori kriminologi mengenai Teori Konflik Budaya (*Culture Conflict Theory*) di atas, kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian penulis berupa kasus penelantaran anak di Kabupaten Bojonegoro yaitu hasil wawancara penulis dengan orang tua dan beberapa penduduk sekitar, mereka mengatakan bahwa masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal tersebut sudah terbiasa menyuruh anak mereka untuk mencari uang guna membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Hal tersebut merupakan kondisi yang normal atau biasa terjadi di lingkungan tersebut, sehingga menjadi *conduct norms* masyarakat di lingkungan itu. Dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai hal yang normal hingga menjadi seperti budaya masyarakat di lingkungan itu, maka orang tua yang melakukan hal tersebut tidak merasa bersalah ketika ia tidak menyekolahkan anak-anaknya bahkan menyuruh anaknya untuk mencari uang.

C. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Bojonegoro yang telah penulis jelaskan di atas, maka diketahui terdapat kendala-kendala yang ada pada Faktor Hukum yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum dan Faktor Non Hukum, sehingga tujuan hukum tidak tercapai. Oleh karena itu Polres Bojonegoro memiliki beberapa

¹²⁶ *Ibid*, hlm 79.

upaya guna menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum:

1. Upaya Substansi Hukum

Ada 2 (dua) pilihan upaya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak terkait dengan substansi hukum, yaitu :

a. Pembaharuan Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai masyarakat jika aturan tersebut diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Artinya, masyarakat telah benar-benar merasakan bahwa norma hukum tersebut menghasilkan ketertiban dan ketentraman dalam keberlangsungan hidupnya. Dengan adanya beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka diperlukan revisi atau pembaharuan hukum sehingga dapat menjamin rasa keadilan untuk masyarakat. Karena suatu perundang-undangan adalah landasan dari terwujudnya penegakan hukum. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang baik, penegakan hukum tidak dapat diwujudkan. Adapun pembaharuan hukum tersebut yaitu mengenai :

- 1) Memperjelas rumusan pasal penelantaran anak mengenai pengaturan subyek hubungan antara pelaku dengan korban (anak)
- 2) Memperjelas bentuk-bentuk perlakuan penelantaran anak

3) Menjadikan satu antara kedua pengaturan mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23/ 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, supaya sanksi pidana tidak berbeda. Serta penegak hukum tidak akan mengalami kesulitan dalam memilih pasal Penelantaran Anak dikarenakan ada 2 (dua) Undang-undang khusus yang mengatur.

4) Apabila pidana pokok dalam Undang-undang tersebut dirasa sulit diterapkan oleh aparat penegak hukum, dikarenakan penyidik memiliki pertimbangan jika orang tua dipenjara maka anak akan semakin tidak terpenuhi hak-haknya, mungkin dapat ditambahkan alternatif sanksi hukuman, seperti contohnya hukuman sosial (misal : melakukan aksi sosial sebagai hukuman sehingga orang tua tidak perlu sampai dipenjara, namun tetap merasakan hukuman).

b. Terdapat asas baru dalam perkembangan Hukum Pidana

Adanya 2 undang-undang khusus yang mengatur mengenai Penelantaran Anak sebagai *lex specialis*, yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentunya juga tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya dan akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh masing-masing undang-undang tersebut berbeda. Oleh

karenanya dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah yuridis tersebut, yaitu asas *lex specialis sistematica*.¹²⁷

Dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana asas *lex specialis derogat legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis sistematica* sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut Remmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas juridical* atau *specialitas systematical*, disamping *logische specialiteit*.

Adapun kriteria dari spesialisitas sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Sedangkan spesialisitas logis memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum. Dalam hal ini adalah anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya mengakibatkan anak tersebut kehilangan hak-hak dasarnya. Perbuatan orang tua tersebut di satu sisi melanggar Undang-undang Perlindungan Anak, namun di sisi lain juga melanggar Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut yang harus digunakan adalah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena diatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana

¹²⁷Eddy O.S Hiariej, **Prinsip-prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 352.

husus. Dengan demikian Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan *lex specialis sistematica*.¹²⁸

2. Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Perlindungan Anak

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bojonegoro adalah dengan mengharuskan para penyidik memahami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana penelantaran anak dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan Perlindungan Anak.

Penyidik Kepolisian harus meningkatkan pengetahuannya tentang Hukum Perlindungan Anak terkhusus yaitu tentang pengetahuan mengenai cara penanganan Tindak Pidana Penelantaran Anak. Apabila penyidik ingin memediasi pelaku tindak pidana penelantaran anak, maka penyidik harus mengetahui adanya Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Mediasi tidak dapat dengan mudahnya dilakukan langsung oleh penyidik sendiri, namun ada langkah-langkah penanganan untuk melakukan mediasi.

Selain itu Polri harus memberikan pendidikan tambahan pada penyidik Kepolisian guna meningkatkan kualitas agar dapat memahami,

¹²⁸ *Ibid*, hlm 353.

menganalisa, dan memecahkan permasalahan secara cepat dan tepat sesuai peraturan yang berlaku.

3. Meningkatkan Kerjasama antara Polres Bojonegoro, Dinas Sosial Bojonegoro, dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak di Bojonegoro, dibutuhkan lebih dari 1 (satu) instansi/ lembaga. Polres Bojonegoro, Dinas Sosial Bojonegoro, dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro harus saling bekerja sama. Karena tanpa adanya kerjasama, tidak akan optimal dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak, penegakan akan terasa jalan di tempat.

Kerjasama dapat dimulai dengan mengadakan pertemuan rutin setiap beberapa bulan sekali antara ketiga instansi, pertemuan yang diadakan tujuannya adalah untuk bertukar informasi mengenai data-data yang masing-masing instansi miliki. Apabila Dinas Sosial Bojonegoro, dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro merasa tidak sanggup lagi menangani kasus penelantaran anak yang terjadi, maka Polres Bojonegoro dapat membantu untuk menangani, sehingga tidak ada independensi antar instansi/ lembaga. Dengan hal itu maka Polres Bojonegoro pun juga dapat menjadi lebih aktif, tidak hanya sekedar menunggu laporan/ aduan masuk ke Polres, lagipula Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah

delik biasa bukan delik aduan, oleh sebab itu Polres Bojonegoro memang dituntut untuk lebih aktif.

Setelah pertemuan rutin tersebut telah berjalan, kemudian dapat dilanjutkan dengan membuat suatu perjanjian antara Polres Bojonegoro dengan instansi/lembaga terkait untuk bersama-sama memberantas kasus Penelantaran Anak tersebut. Sehingga diharapkan tidak akan ada tindakan Penelantaran Anak di wilayah Bojonegoro.

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Orang Tua dan Masyarakat tentang Hukum Perlindungan Anak

Peningkatan kesadaran hukum sebaiknya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang matang. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Peraturan tersebut dapat dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum. Penerangan dan penyuluhan hukum yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan masalah-masalah hukum yang timbul dalam masyarakat.

Penyuluhan hukum ialah tahap lanjut dari penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Mengadakan penerangan dan penyuluhan hukum mengenai hukum perlindungan anak di Bojonegoro. Penyuluhan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Polres Bojonegoro yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. Penyuluhan hukum dilakukan guna memberi pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini ialah orang tua, bahwa terdapat Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur dan terdapat ancaman hukuman apabila orang tua mengabaikan dengan sengaja kewajiban guna memelihara, merawat, ataupun mengurus anak sebagaimana mestinya. Serta sangat penting masyarakat dan orang tua untuk mengetahui hak-hak anak di Indonesia secara umum yang disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Anak.

Namun, Polres Bojonegoro terlebih dahulu harus diberikan pelatihan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. Sebab jangan sampai terjadi petugas-petugas yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan cara menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum.¹²⁹

Peran masyarakat dalam perlindungan anak ini diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak diatur mengenai Peran masyarakat terhadap Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 72, yaitu :

“Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.”

¹²⁹ *Ibid*, hlm 189.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat juga tercantum dalam Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak yang menjelaskan, bahwa :

“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Peran serta masyarakat dan pengawasan diatur pula dalam Pasal 12 PP Nomor 2 tahun 1988, masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak, yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial atau perseorangan. Untuk itu pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi dorongan dan bantuan. Pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat (Pasal 13 PP Nomor 2 tahun 1988) dilakukan oleh Menteri Sosial dan bersifat responsif. Pelaksanaan peran serta masyarakat dan pengawasan diatur oleh Menteri Sosial setelah mendapat pertimbangan menteri lain yang terkait.¹³⁰

Selain penyuluhan hukum, dapat pula dilakukan penyuluhan tentang ilmu *parenting* yaitu ilmu yang mempelajari proses pengasuhan dan pendidikan anak yang dimulai dari kelahirannya hingga mencapai kedewasaan personal. sehingga *parenting* sejak anak baru dilahirkan, serta selesai pada saat anak sudah memenuhi kriteria guna adalah sebagai pribadi yang dewasa. Dewasa dalam fungsi *parenting* merupakan dewasa secara mental atau psikologis. Penyuluhan ilmu *parenting* ini berguna supaya orang tua dapat memahami pola pengasuhan terhadap anak secara baik dan benar, hingga anak menjadi pribadi yang dewasa.

¹³⁰Darwan Prinst, Ibid, hlm 85.

5. Meningkatkan Kualitas Ekonomi Orang Tua dan Masyarakat yang rendah

Meningkatkan perekonomian orang tua dan masyarakat dalam hal ini adalah yang mengalami kondisi ekonomi rendah. Usaha peningkatan ekonomi tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh Dinas Sosial, karena termasuk dalam program kerja Dinas Sosial, yang mana merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar anak-anak dapat terpenuhi hak-haknya. Program kerja Dinas Sosial tersebut ialah dengan memberikan Bantuan Sosial. Sasarannya ialah memberikan bantuan kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), yaitu Bantuan Ekonomi berupa Usaha Ekonomi Produktif. Contoh bantuan : Pemberian kambing, bantuan tunai untuk modal usaha.

Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tersebut merupakan program kegiatan tahunan yang dilaksanakan minimal sebanyak 1 kali dalam satu tahun, yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya. Daerah / wilayah yang dipilih untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut setiap tahunnya berganti. Daerah/ wilayah yang terpilih merupakan daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya miskin dan daerah tersebut merupakan daerah yang mayoritas anak-anaknya ialah anak jalanan, anak cacat, anak yatim/piatu/yatim piatu, anak yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Namun Ibu Dwi Hariningnsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mengatakan bahwa Dinas Sosial sering terhalang dana pemerintah yang

terlambat cair, sehingga bantuan yang diberikan Dinas Sosial pun juga terlambat.¹³¹

Namun Bantuan Ekonomi yang diberikan oleh Dinas Sosial yaitu hanya sebatas Bantuan Stimulan (rangsangan) yang diharapkan dapat mendorong untuk mengembangkan ekonomi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Dikarenakan hanya sebatas bantuan stimulan, maka Dinas Sosial harus rutin memantau mengenai perkembangan dari bantuan yang diberikan tersebut, apakah telah berjalan lancar dan sesuai bantuan tersebut atau mengalami permasalahan, jika ada permasalahan maka diharapkan Dinas Sosial dapat peduli terhadap permasalahan tersebut. Dinas Sosial perlu mengawasi hingga RTSM benar-benar dapat memiliki kondisi ekonomi yang lumayan baik.

Selain bantuan ekonomi, Dinas Sosial dapat pula memberikan bimbingan keterampilan usaha misalnya : organisasi dan manajemen, kewirausahaan, keterampilan otomotif, keterampilan memasak, keterampilan elektronika, dan keterampilan lainnya, yang dapat menjadi bekal orang tua untuk membuka wirausaha sesuai *passion* masing-masing.

¹³¹Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Bapak Doni selaku pegawai Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan yang merangkum seluruh analisis yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak, terdapat beberapa kendala yang mana dilihat dari kedua faktor yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.

- a. Faktor Hukum

- 1) Substansi Hukum

- a) Adanya perbedaan unsur dan perbedaan sanksi pidana antara Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak
 - b) Terdapat kelebihan dan kelemahan pengaturan mengenai Penelantaran Anak pada masing-masing Undang-undang tersebut
 - c) Kedua Undang-undang tersebut sama-sama merupakan Undang-undang khusus yang membawa konsekuensi hukum bahwa kedua Undang-undang tersebut saling berdiri sendiri dan tidak dapat mengesampingkan satu sama lain.

b. Struktur Hukum

1) Kurangnya Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Perlindungan Anak

Mediasi yang dilakukan oleh penyidik pada sebuah perkara penelantaran anak yang terjadi pada tahun 2013 ditangani oleh Polres Bojonegoro, menurut penulis kurang tepat.

Sebab mengacu pada Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, bahwa mediasi memiliki langkah-langkah penanganan kasus, penyidik tidak dapat semudah itu secara langsung melakukan mediasi pada perkara penelantaran anak.

Terlebih mediasi diprioritaskan untuk delik aduan, sedangkan Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah delik biasa.

2) Tidak adanya Koordinasi Polres Bojonegoro dengan Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro

Tidak pernah diadakan pertemuan rutin antara ketiga instansi, sehingga tidak terjalin kerjasama yang baik untuk menangani permasalahan penelantaran anak.

c. Budaya Hukum

- 1) Kurangnya Keaktifan Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kab. Bojonegoro

Polisi terbiasa dengan hanya menunggu laporan dan aduan masuk. Padahal Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah delik biasa, maka dalam hal ini Polisi dituntut aktif. Terlebih perkara Penelantaran Anak ini merupakan hal yang tidak mudah ditangani sebab diperlukan usaha yang lebih untuk benar-benar membuat anak-anak di Negara kita benar-benar terlindungi dari hukum.

- 2) Rendahnya Kesadaran Hukum Orang Tua tentang Hukum Perlindungan Anak

Beberapa orang tua yang telah mendapat penyuluhan dari pihak Dinas Sosial, namun masih ditemukan orang tua yang tidak memperhatikan Hak-hak Anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua terhadap anak. Masih ditemukan anak yang sengaja disuruh orang tua untuk mencari uang menjadi pengamen, ada anak yang dibiarkan saja oleh orang tuanya meskipun orang tua melihat anak tersebut mengamen, kemudian ada banyak anak yang akhirnya putus sekolah, kesehatannya pun juga tidak terjaga, serta berbagai situasi dan kondisi buruk lainnya yang menyebabkan suatu bentuk penelantaran terhadap anak.

3) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Hukum Perlindungan Anak

Masyarakat Bojonegoro belum memiliki kepedulian mengenai masalah penelantaran anak ini. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, masih banyak ditemukan anak-anak yang mengamen, memulung, mengemis, namun masyarakat membiarkannya, masyarakat memilih memberinya uang receh lalu pergi. Padahal kondisi yang dialami anak tersebut dapat mengganggu perkembangan anak. Hal demikian menunjukkan bahwa masyarakat tidak peduli terhadap kondisi anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk mengamen dan anak tersebut sampai putus sekolah, namun masyarakat juga bersikap acuh.

b. Faktor Non Hukum

1) Faktor Ekonomi

Para orang tua di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki status ekonomi rendah rentan mengakibatkan terjadinya kejahatan yaitu salah satunya melakukan penelantaran terhadap anak-anaknya.

2) Faktor Keluarga

Kondisi keluarga yang mengalami perceraian dan permasalahan keluarga lainnya, mendorong terjadinya penelantaran anak. Namun, hal tersebut sering tidak disadari.

3) Faktor Lingkungan

Di lingkungan tempat mereka tinggal tersebut sudah terbiasa menyuruh anak mereka untuk mencari uang guna membantu

kebutuhan ekonomi keluarga. Hal tersebut merupakan kondisi yang normal atau biasa terjadi di lingkungan tersebut, sehingga menjadi *conduct norms* masyarakat di lingkungan itu.

2. Upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala yang terjadi

a. Upaya Substansi Hukum

1) Pembaharuan Hukum

2) Terdapat asas baru dalam perkembangan Hukum Pidana

b. Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Perlindungan Anak

Polri harus memberikan pendidikan tambahan pada penyidik Kepolisian guna meningkatkan kualitas agar dapat memahami, menganalisa, dan memecahkan permasalahan secara cepat dan tepat sesuai peraturan yang berlaku.

c. Meningkatkan Kerjasama antara Polres Bojonegoro, Dinas Sosial Bojonegoro, dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro

Kerja sama dapat dimulai dengan mengadakan pertemuan rutin setiap beberapa bulan sekali antara ketiga instansi, pertemuan yang diadakan tujuannya adalah untuk bertukar informasi mengenai data-data yang masing-masing instansi miliki. Apabila Dinas Sosial Bojonegoro, dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A) Bojonegoro merasa tidak sanggup lagi menangani kasus penelantaran anak yang terjadi, maka Polres dapat membantu untuk menangani.

d. Meningkatkan Kesadaran Hukum Orang Tua dan Masyarakat tentang Hukum Perlindungan Anak

Mengadakan penyuluhan hukum mengenai hukum perlindungan anak dan ilmu *parenting* kepada masyarakat khususnya orang tua di Bojonegoro. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan oleh Polres Bojonegoro dan bekerja sama dengan Dinas Sosial.

e. Meningkatkan Kualitas Ekonomi Orang Tua dan Masyarakat yang rendah

Bantuan Ekonomi yang diberikan oleh Dinas Sosial yaitu hanya sebatas Bantuan Stimulan (rangsangan) yang diharapkan dapat mendorong untuk mengembangkan ekonomi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Dikarenakan hanya sebatas bantuan stimulan, maka Dinas Sosial perlu memantau mengenai perkembangan dari bantuan yang diberikan tersebut. Selain bantuan ekonomi, dapat pula dilakukan dengan memberikan bimbingan keterampilan usaha.

B. Saran

Untuk mewujudkan penegakan hukum dalam tindak pidana penelantaran anak, berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran :

1. Bagi Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro

Adanya penelitian ini, diharapkan Polres Bojonegoro menjadi dapat lebih aktif dan tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di wilayah kabupaten Bojonegoro. Serta ke depannya dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi/ lembaga terkait khususnya Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Perempuan & Anak (P3A)

Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan perlindungan terhadap anak korban penelantaran.

2. Bagi Masyarakat

Dengan diberikannya penyuluhan hukum sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak, diharapkan seluruh masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih sehingga ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, terkhusus kepada orang tua diharapkan dapat lebih sadar dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana kewajiban orang tua.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, 2012, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2008, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2011, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Assiddiqie, Jimly, 2008, **Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi**, BIP, Jakarta.
- Bungim, Burham, 2001, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, **Metodologi Penelitian**, Bumi pustaka, Jakarta.
- Darmono, 2013, **Pengeyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum**, Solusi Publishing, Jakarta.
- Djamil, M.Nasir, 2013, **Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, **Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 1960, **Principle of criminology**, Six Edition, J.B.Lippincott, New York.
- E. Hagan, Frank, 2013, **Pengantar Kriminologi**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Endrawati, Netty, 2012, **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Universitas Islam, Kediri.

- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasan Wadong, Maulana, 2000, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Grassindo, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, **Prinsip-prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huraerah, Abu, 2006, **Kekerasan Terhadap Anak**, Cet. Ke-1, Nuansa, Bandung.
- Ismail, Nurhasan, 2013, **Sosiologi Hukum**. Aditya Media, Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 2011, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, 1997, **Metodologi Riset**, BPFE, Jogjakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2015 **Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, PT. Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2004, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poedjawijatna, 2004, **Tahu dan Pengetahuan**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1994, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, **Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarmenta, W.J.S, 1976, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Cet. Ke-5, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2001, **Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosial)**, Sinar Baru, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto, 2009, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ruba'i, Masruchin, 2001, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 1981, **Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial**, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1989, **Mengenal Sosiologi Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I Cetakan 10**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, **Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal, Remaja dan Anak**. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Utari, Indah, 2012, **Aliran dan Teori dalam Kriminologi**, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sudjono, 1974, **Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian**, Tarsito, Bandung.
- Sugiyono, 2009, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung.
- Supeno, Hadi, 2010, **Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Topo Santoso, 2012, **Kriminologi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyudi, Setya, 2011, **Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Walter C, Reckless dalam Bambang Sutiyono, 2004, **Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi (Paaparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Sebagainya**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wantu, Fence, 2011, **Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)**, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Yesmil Anwar, Adang, 2011, **Pembaruan Hukum Pidana : reformasi hukum**, Grasindo, Jakarta.

Yusuf, M, 2011, **Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintah Daerah**, Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Skripsi

Bartimeus Tondy, **Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 27.

Jurnal

Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI, **Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan *Social Work Reform***, makalah disajikan dalam Seminar Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan *Social Work Reform*, FISIP Universitas Indonesia, Depok, 27 September 2010, hlm 5.



PEDOMAN WAWANCARA

UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

POLRES BOJONEGORO

1. Berapa jumlah kasus Penelantaran Anak yang ditangani oleh Polres Bojonegoro selama 3 tahun terakhir?
2. Berapa jumlah kasus yang masuk dan kasus yang selesai?
3. Bagaimana cara Polisi mengetahui adanya kasus Penelantaran Anak di Bojonegoro?
4. Bagaimana cara Polisi mengetahui jika ada kasus Penelantaran Anak yang tidak dilaporkan/ diadukan di Polres Bojonegoro?
5. Menurut saudara, bentuk/ kriteria tindakan seperti apa yang dapat dikatakan bahwa hal itu adalah tergolong Penelantaran terhadap anak?
6. Bagaimana kronologi kejadian kasus Penelantaran Anak yang terjadi di Bojonegoro?
7. Apa undang-undang yang digunakan oleh Penyidik dalam kasus Penelantaran Anak tersebut? Pasal berapa?
8. Apa ada koordinasi antara Polres dengan organisasi, lembaga, dan dinas terkait dalam proses menangani kasus Penelantaran Anak di Bojonegoro?
Apa nama organisasi, lembaga, dan dinas tersebut?
Apa tugas dan fungsi organisasi, lembaga, dan dinas tersebut dalam membantu menangani kasus Penelantaran Anak?
9. Apa kendala/ hambatan yang dialami oleh penyidik/ Polisi dalam menangani kasus Penelantaran Anak yang terjadi di Bojonegoro?
10. Apa upaya yang dilakukan oleh Polres untuk mencegah agar tidak terjadi lagi Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak di Bojonegoro?

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro



Wawancara dengan
Ibu Dra. Dwi
Hariningsih, selaku
Kepala Bidang
Bimb. Ressos &
Peningkatan Ressos



Wawancara dengan
Bapak Doni, selaku
pegawai bidang
Kesejahteraan Sosial



2. Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 664/UN10.F01.01/PP/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi

Kepada : Yth. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro
Jl. MH Thamrin No 46 ,Kabupaten Bojonegoro

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

Nama : Birgita Veni Andriani
NIM : 115010101111008
Alamat : Perum Griya Shanta M 407
Telp : 081332421115
Konsentrasi : Hukum Pidana

untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan :

judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak. (Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro)

tempat survey : Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro

waktu survey : 9 Februari 2018 sampai dengan selesai

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 8 Februari 2018



a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Priya Djatmika, SH., MS.
NIP. 19611116 198601 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 63 /UN10.F01.01/PP/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi

Kepada : Yth. Ketua P3A (Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak)
Jl. Pahlawan No 1 , Kabupaten Bojonegoro

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

Nama : Birgita Veni Andriani
N I M : 115010101111008
Alamat : Perum Griya Shanta M 407
Telp : 081332421115
Konsentrasi : Hukum Pidana

untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan :

judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak. (Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro)

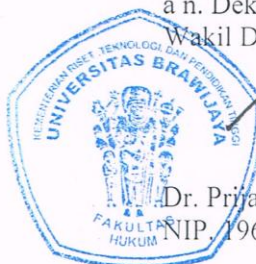
tempat survey : Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Bojonegoro

waktu survey : 9 Februari 2018 sampai dengan selesai

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 8 Februari 2018

a n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Prija Djatmika, SH., MS.

NIP. 19611116 198601 1 0014



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 662 /UN10.F01.01/PP/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro
Jl. Trunojoyo No 12 Kabupaten Bojonegoro

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

Nama : Birgita Veni Andriani
N I M : 115010101111008
Alamat : Perum Griya Shanta M 407
Telp : 081332421115
Konsentrasi : Hukum Pidana

untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan :

judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak. (Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro)

tempat survey : Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

waktu survey : 9 Februari 2018 sampai dengan selesai

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 8 Februari 2018

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Prija Djatmika, SH., MS.
NIP. 19611116 198601 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Trunojoyo No. 12 Telepon / Fax. (0353) 893526

BOJONEGORO

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/606/412.305/2017

TENTANG

SURVEY/ RESEARCH/ PENELITIAN/ KKN

- Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kab.Bojonegoro sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kab.Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Dan Non Perijinan Di Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Di Bidang Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Camat;
 - Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tanggal 4 Desember 2017 Nomor 5410/UN10F01/PP/2017 hal Ijin Pra Survey.

MENGIZINKAN :

- Nama : **BIRGITA VENI ANDRIANI**
- NIM : 115010101111008
- Alamat : JL. Pemuda Gang Balong No. 9 Bojonegoro
- Civitas/Lembaga : Universitas Brawijaya
- Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
- Keperluan : Penelitian
- Judul : Faktor faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Penelantaran Terhadap Anak (Studi di Kabupaten Bojonegoro)
- Tempat : ❖ Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
❖ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Bojonegoro
- Waktu : Tmt 5 Desember 2017 s/d 5 Maret 2018

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
- Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah desa/instansi setempat.
- Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
- Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
- Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
- Setelah melakukan kegiatan diwajibkan/diharuskan untuk memberikan/ mengirimkan 1 buah hasil penelitian/ survey/ research, kepada Bupati Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kab. Bojonegoro.**
- Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 6 Desember 2017

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOJONEGORO

Sekretaris

Drs. HUSNAN

Penata Tk. I

NIP. 19620808 198909 1 012

Tembusan disampaikan kepada :

- Sdr. Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro
- Sdr. Kepala DP3A dan KB Kab. Bojonegoro
- Sdr. Dekan Fak. Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Yang bersangkutan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT BOJONEGORO



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK//28 /II/LIT.6.1/2018/Reskrim

KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOJONEGORO, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : BIRGITA VENI ANDRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 115010101111008
Dari Fakultas Hukum : UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Program Kekhususan : S1 - HUKUM PIDANA

Rujukan surat Fakultas Hukum Brawijaya Malang Nomor : 5410/UN.10.F01/PP/2017 tanggal 30 November 2017 perihal permohonan izin pra survey untuk menyusun skripsi. Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data tentang "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ORANG TUA MELAKUKAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK Studi Kasus : Di Wilayah Hukum Kab. Bojonegoro" melalui Sat Reskrim Polres Bojonegoro.

Adapun penelitian tersebut dilaksanakan sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 20 Februari 2018

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO
KASAT RESKRIM



DAKY DZUL QORNAIN, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87071797



PUSAT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
P3A

KABUPATEN BOJONEGORO
Jl. Pahlawan No. 01 Bojonegoro. Telp. 0353-892541

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03 /P3A/III/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa,

Nama : **BIRGITA VENI ANDRIANI**

Mahasiswa : Fakultas Hukum pada Universitas Brawijaya

NIM : 1150 1010 1111008

Telah selesai melaksanakan praktek/penelitian di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A)
Kab. Bojonegoro mulai tanggal 20 Desember-20 Maret 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 20 Maret 2018

AN. KETUA PUSAT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIS



Dra. Suci MADURATNANI, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
Jl. Panglima Sudirman No. 24 Telp. (0353) 888918
BOJONEGORO – 62111

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/1295/412.32/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : BIRGITA VENI ANDRIANI

Mahasiswa : Universitas Brawijaya Fakultas Hukum

N I M : 1150 1010 1111008

Telah selesai melaksanakan praktek/ penelitian di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro mulai tanggal, 12 Juni s/d 12 September 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bojonegoro, 13 Juli 2015

KEPALA DINAS TENAGA KERJATRANSMIGRASI
DAN SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO


ADIE WITJAKSONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700108 198911 1 001





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 134 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Mengingat : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : Dr. Abdul Majid, SH.M.Hum.; Mufatihatul Farikhah, SH.MH., masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Wignita Veni Andriani NIM 115010101111008

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Februari 2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Abdul Rasyid, SH, M.Hum
Nama Dosen Pendamping : Muhammad Fathah, SH, MH
SK. Dekan : No. 154 Tahun 2018
Tgl. 1 Februari 2018

Nama Mahasiswa : Brigitte Veni
No. Induk : 115010101111008
Judul Skripsi : Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penel
Anat (Studi di Kep
Kapupaten Boyoneg
1 Februari 2018

Bimbingan mulai : 28 Juni 2018
Bimbingan selesai : 28 Juni 2018

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
1/18	Konsultasi untuk persiapan Survey di Polres Boyonegoro untuk mencari data dan pertanyaan untuk wawancara.	1/18	Konsultasi untuk persiapan Survey di Polres Boyonegoro, mencari data dan pertanyaan untuk wawancara.
2/18	Bimbingan Bab IV (konsep Bab IV)	28/18	Memberikan Hasil Survey + wawancara. Dan bimbingan outline Bab IV.
6/18	Konsultasi Bab IV rumusan masalah pertama dan kedua.	7/18	Bimbingan Bab IV rumusan masalah pertama dan kedua.
8/18	Bimbingan Bab IV, rumusan masalah pertama dan kedua.	25/18	Bimbingan revisi Bab I-IV
28/18	ACC Skripsi.	28/18	Bimbingan revisi Bab 1-IV

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Ridana Setiyo
Dr. Juliah, SH, LL.M.

Dosen Pembimbing Pendamping
Muhammad Fathah, SH, MH

Malang, 28 Juni
Dosen Pembimbing U
Dr. Abdul Rasyid

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BIRGITA VENI ANDRIANI

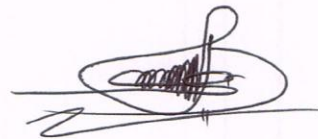
NIM : 115010101111008

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 29 Juni 2018

Yang menyatakan,



BIRGITA VENI ANDRIANI
NIM. 115010101111008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Birgita Veni Andriani
NIM : 115010101111008
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas / Konsentrasi: Hukum / Hukum Pidana
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

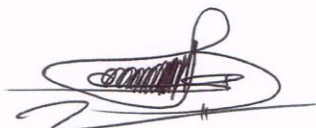
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalih media / format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 29 Juni 2018

Yang menyatakan,



Birgita Veni Andriani



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 600/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : BIRGITA VENI ANDRIANI
NIM : 115010101111008
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Juli 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



[Signature]
Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENELANTARAN ANAK

(Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro)

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BIRGITA VENI ANDRIANI

NIM. 115010101111008



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro)**

Birgita Veni Andriani, Dr. Abdul Madjid,S.H.,M.Hum,
Mufatikhatul Farikhah,S.H.,M.H

Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : birgitaveniandriani@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip perlindungan anak terdapat di dalam ketentuan Undang-undang Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperbarui menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya Undang-undang Perlindungan Anak hingga sampai saat ini, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih belum terpenuhi seutuhnya. Pada penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang menjadi sangat penting, sebab keterlantaran anak mendorong terjadinya perlakuan salah yakni berupa eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, perdagangan anak, dan lain-lain.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penelantaran Anak, UU Perlindungan Anak

LAW ENFORCEMENT IN CRIMINAL CHILD NEGLECT
(A study in Sub-Regional Police Department of Bojonegoro)

Birgita Veni Andriani, Dr. Abdul Madjid,S.H.,M.Hum,
Mufatikhatul Farikhah,S.H.,M.H

Bachelor Program in Legal Studies
Faculty of Law Universitas Brawijaya
Email: birgitaveniandriani@gmail.com

ABSTRACT

The principle of child protection is provided in Law Number 23 of 2002 on Child Protection, amended to Law Number 35 of 2014 concerning Amendment of Law Number 23 of 2002 on Child Protection, further amended to Law Number 17 of 2016. The attention to the children dignity has existed since 1979 when the Law Number 4 of 1979 was made. However, along with the issuance of Law of Child Protection, the welfare and rights of children have not been entirely fulfilled. This research is aimed to study legal enforcement concerning criminal child neglect, as this issue could trigger another crime such as exploitation, violence, discrimination, child trafficking, and many more.

Keywords: law enforcement, child neglect, law of child protection

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum dan bukan *machtsstate* atau negara kekuasaan (*absolute state*), menandakan Indonesia mengedepankan hukum bukan absolutism dalam menjalankan roda pemerintahan.¹³² Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia.

Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperbarui menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak semua pasal di rubah, namun hanya beberapa pasal yang dilakukan perubahan terutama terkait dengan pemberatan sanksi pidana dan denda, serta ditambahkan beberapa ayat-ayat baru yang mengatur lebih spesifik dalam perlindungan terhadap anak pada berbagai aspeknya.

Prinsip perlindungan anak tersebut terdapat di dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya Undang-undang Perlindungan Anak hingga sampai saat ini, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih belum terpenuhi seutuhnya. Hal ini dapat dilihat dari survey yang telah dilakukan oleh penulis di wilayah Bojonegoro.

Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan Luas Wilayah 2.307,06 km² dan terdiri atas 28 Kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 430 Desa dan 11 Kelurahan. Bojonegoro memiliki

¹³²Jimly Assiddiqie, **Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi**, BIP, Jakarta, 2008, hlm 297.

penduduk yang berjumlah 1.450.889 jiwa.¹³³ Berdasarkan data dari Dinas Sosial Bojonegoro pada tahun 2017 jumlah penelantaran anak sebanyak 39 anak dari 283.753 anak yang ada di Bojonegoro atau 0,013% penelantaran anak.¹³⁴

Tabel 1.1

Data Kasus Penelantaran Anak di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
tahun 2012 s/d 2017

No.	Tahun	Penelantaran Anak	Jumlah Penduduk Umur 6-18 tahun	Prosentase
1.	2012	5.653	276.739	2,042%
2.	2013	3.158	274.611	1,149%
3.	2014	2.260	274.242	0,824%
4.	2015	685	283.753	0,241%
5.	2016	633	283.753	0,223%
6.	2017	39	283.753	0,013%

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018

Beberapa data dari Dinas Sosial di daerah lainnya, pada tahun 2016 di Kota Malang 0% (tidak ada) penelantaran anak.¹³⁵ Sedangkan di Kota Surabaya pada tahun 2016 terdapat 1.059 penelantaran anak, jumlah penduduk umur 6-18 tahun di Kota Surabaya pada tahun 2016 berjumlah 435.775 anak, maka diketahui bahwa terjadi 0,243% kasus penelantaran anak di Kota Surabaya.¹³⁶ Melihat dari data-data pembandingan antar daerah tersebut dapat kita ketahui, bahwa di daerah Bojonegoro rentan memiliki lebih banyak prosentase kasus penelantaran anak dan hingga saat ini belum semua terselesaikan.

¹³³Badan Pusat Statistik Bojonegoro.

¹³⁴Hasil Pra Survey dari data rekapitulasi PMKS Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 11 Desember 2017.

¹³⁵Badan Pusat Statistik Malang.

¹³⁶Badan Pusat Statistik Surabaya

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani permasalahan anak belum optimal, melihat masih ditemukan kasus penelantaran anak sehingga menjadi tidak dapat terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Dalam Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”¹³⁷ Berdasarkan Pasal 77B Undang-undang Perlindungan Anak, sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 76B yaitu sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹³⁸ Perlakuan penelantaran dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Perlindungan Anak yaitu misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.¹³⁹

Kemudian di dalam Pasal 5 Huruf (d) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur pula mengenai hal penelantaran, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”¹⁴⁰

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

¹³⁷Pasal 76B Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³⁸Pasal 77B Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³⁹Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴⁰Pasal 5 Huruf (d) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”¹⁴¹

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sanksi berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹⁴²

Pengkajian mengenai penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak menjadi sangat penting, sebab keterlantaran anak mendorong terjadinya perlakuan salah yakni berupa eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, perdagangan anak, dan lain-lain.¹⁴³ Seorang anak yang diterlantarkan, maka anak tersebut menjadi rawan akan mengalami hal-hal negatif diantaranya dieksploitasi secara ekonomi yaitu menjadi anak jalanan, dieksploitasi secara seksual yaitu diperdagangkan menjadi pekerja seks dibawah umur, mengalami tindak kekerasan, diskriminasi, dan hal-hal negatif lainnya yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak seperti yang telah diamanatkan oleh Negara.

Mengingat pentingnya pengkajian mengenai penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak, maka diperlukan upaya untuk menangani permasalahan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro?

¹⁴¹Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴²Pasal 49 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴³Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI, **Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan Social Work Reform**, makalah disajikan dalam Seminar Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan *Social Work Reform*, FISIP Universitas Indonesia, Depok, 27 September 2010, hlm 5.

2. Bagaimana upaya dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Bojonegoro?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Polres Bojonegoro

Polres Bojonegoro mengemban tugas diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada dalam wilayah kerjanya. Penelitian ini dilakukan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 46 Bojonegoro.

2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak

Penegakan Hukum dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu Faktor Hukum dan Faktor Non Hukum, yang mana keduanya saling memiliki keterkaitan. Faktor hukum merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri.

a. Faktor Hukum (Penegakan Hukum)

1) Substansi Hukum

Dalam penelitian ini, Substansi Hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak diatur oleh 2 (dua) peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak, yang sanksinya diatur dalam Pasal 77B Undang-undang Perlindungan Anak. Serta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak, yang sanksinya diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan.

Pada Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak yakni kelebihannya terletak pada penjelasan perlakuan penelantaran yang dijelaskan secara spesifik tertera pada penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf c Undang-undang Perlindungan Anak, yang berbunyi : “Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban

untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.” Kemudian kelemahan Pasal 76B yakni terletak pada Unsur *Subjective Relation*, yaitu kata “setiap orang” tidak dijelaskan mengenai hubungan pelaku dengan korban (anak), apakah yang dapat dikenakan pasal tersebut merupakan hubungan keturunan horizontal/ vertikal dengan korban (anak), atau hubungan perwalian dengan korban (anak), atau hubungan kerja dengan korban (anak). Karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut penulis penegak hukum merasa kesulitan untuk menerapkan unsur pasal “setiap orang” tersebut, sebab terlalu luas cakupannya dan kurang spesifiknya pengaturan mengenai penentuan hubungan antara pelaku dengan korban (anak).

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni memiliki kelebihan yang terletak pada pengaturan mengenai hubungan antara pelaku dengan korban (anak), yakni diatur pada Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi penulis menemukan terdapat pula kelemahan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni tidak dijelaskannya secara spesifik seperti apa saja bentuk perlakuan penelantaran tersebut.

Dikarenakan terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan khusus yang sama-sama mengatur mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak, maka mengakibatkan penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Bojonegoro menjadi kesulitan dalam menentukan pilihan pasal mana yang akan diterapkan pada kasus Penelantaran Anak, hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Aiptu

Kasdi selaku Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Bojonegoro.¹⁴⁴

2) Struktur Hukum

a) Kurangnya Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Perlindungan Anak

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro, bahwa pernah terdapat 2 kasus penelantaran rumah tangga pada tahun 2013 tetapi kedua kasus tersebut tidak dilanjutkan dan salah satu kasus diselesaikan dengan cara mediasi yang dilakukan oleh penyidik. Namun menurut penulis penyelesaian kasus melalui mediasi yang digunakan penyidik untuk perkara penelantaran anak adalah kurang tepat.

Secara parsial dan terbatas sifatnya, mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu :

- g) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- h) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

¹⁴⁴Hasil survey wawancara dengan Bapak Aiptu Kasdi selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro, pada tanggal 20 Februari 2018, diolah.

- i) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- j) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/ adat serta memenuhi asas keadilan.
- k) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- l) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.¹⁴⁵

Dari penjelasan Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri di atas, maka penulis menilai bahwa perkara penelantaran anak atau penelantaran rumah tangga ini tidak dapat semudah itu dapat diselesaikan melalui mediasi langsung oleh penyidik, karena terdapat langkah-langkah penanganan kasus jika ingin diselesaikan melalui mediasi. Mediasi juga harus mempertimbangkan keadilan atas kerugian yang dialami oleh anak karena kehilangan hak-haknya.

- b) Tidak adanya Koordinasi antara Polres Bojonegoro dengan Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro

Dari hasil penelitian penulis di Polres Bojonegoro yang tidak pernah menangani kasus penelantaran anak selama 3 (tiga) tahun terakhir, Polres Bojonegoro menangani kasus penelantaran anak yaitu terakhir pada tahun 2013 yang mana kasus tersebut keduanya diselesaikan melalui mediasi. Jika dibandingkan dengan

¹⁴⁵Lilik Mulyadi, **Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm 38.

data kasus penelantaran anak dari Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro yang pada setiap tahunnya selalu ada kasus masuk tentang penelantaran anak, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Polres Bojonegoro tidak pernah ada kerjasama dengan instansi-instansi lain di Bojonegoro untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Bojonegoro.¹⁴⁶

3) Budaya Hukum

a) Kurangnya Keaktifan Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kab. Bojonegoro

Polisi terbiasa dengan hanya menunggu laporan dan aduan masuk. Sebab di Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro pada setiap tahunnya ditemukan kasus penelantaran anak, sedangkan di Kepolisian Bojonegoro tidak ada kasus masuk. Jika kita melihat pula Pasal 76B Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah delik biasa bukan delik aduan. Maka Polisi dalam hal ini dituntut untuk aktif melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak, tidak sekedar menunggu laporan dan aduan masuk.

b) Rendahnya Kesadaran Hukum Orang Tua tentang Hukum Perlindungan Anak

Beberapa orang tua yang telah mendapat penyuluhan dari pihak Dinas Sosial, namun masih ditemukan orang tua yang tidak memperhatikan Hak-hak Anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua terhadap anak. Masih ditemukan anak yang sengaja disuruh orang tua untuk mencari uang menjadi pengamen, ada anak yang

¹⁴⁶ Hasil survey wawancara dengan Bapak Aiptu Kasdi selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro, pada tanggal 20 Februari 2018, diolah.

dibiarkan saja oleh orang tuanya meskipun orang tua melihat anak tersebut mengamen, kemudian ada banyak anak yang akhirnya putus sekolah, kesehatannya pun juga tidak terjaga, serta berbagai situasi dan kondisi buruk lainnya yang menyebabkan suatu bentuk penelantaran terhadap anak.

Hal yang menyebabkan orang tua tidak memperhatikan pemenuhan hal-hak anak ialah karena rendahnya kesadaran hukum orang tua tentang hukum perlindungan anak. Ada beberapa orang tua yang sebenarnya sudah paham hukum, namun kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku belum tumbuh dalam diri orang tua tersebut.¹⁴⁷

c) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Hukum Perlindungan Anak

Masyarakat Bojonegoro belum memiliki kepedulian mengenai masalah penelantaran anak. Masyarakat terkesan membiarkan masalah penelantaran anak ini terus berlanjut, karena kepekaan dan tak adanya kontribusi terhadap permasalahan penelantaran anak ini. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, ketika masyarakat melihat ada anak-anak yang mengamen di lampu merah dan tempat makan, mengemis di pinggir jalan, namun masyarakat membiarkannya. Padahal kondisi yang dialami anak tersebut dapat mengganggu perkembangan anak.

Hal demikian menunjukkan bahwa masyarakat tidak peduli terhadap kondisi anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengajak anak-anaknya mengamen hingga putus sekolah, namun masyarakat juga bersikap acuh. Ditambah lagi dengan keadaan penduduk di wilayah tempat tinggal anak tersebut ternyata sudah terbiasa dengan kondisi anak-anak di

¹⁴⁷Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Bapak Doni selaku pegawai Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

wilayah tersebut yang mengamen, mengemis, memulung, dan bentuk pekerjaan terburuk anak lainnya.¹⁴⁸

b. Faktor Non Hukum

1) Faktor Ekonomi

Para orang tua di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki status ekonomi rendah rentan mengakibatkan terjadinya kejahatan yaitu salah satunya melakukan penelantaran terhadap anak-anaknya.

2) Faktor Keluarga

Kondisi keluarga yang mengalami perceraian dan permasalahan keluarga lainnya, mendorong terjadinya penelantaran anak. Namun, hal tersebut sering tidak disadari.

3) Faktor Lingkungan

Di lingkungan tempat mereka tinggal tersebut sudah terbiasa menyuruh anak mereka untuk mencari uang guna membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Hal tersebut merupakan kondisi yang normal atau biasa terjadi di lingkungan tersebut, sehingga menjadi *conduct norms* masyarakat di lingkungan itu.

3. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak

a. Upaya Substansi Hukum

Ada 2 (dua) pilihan upaya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak terkait dengan substansi hukum, yaitu :

1) Pembaharuan Hukum

- a) Memperjelas rumusan pasal penelantaran anak mengenai pengaturan subyek hubungan antara pelaku dengan korban (anak)
- b) Memperjelas bentuk-bentuk perlakuan penelantaran anak

¹⁴⁸Hasil survey wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Hariningsih selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Bapak Doni selaku pegawai Sie Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, pada tanggal 12 Februari 2018, diolah.

- c) Menjadikan satu antara kedua pengaturan mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, supaya sanksi pidana tidak berbeda. Serta penegak hukum tidak akan mengalami kesulitan dalam memilih pasal Penelantaran Anak dikarenakan ada 2 (dua) Undang-undang khusus yang mengatur.
- d) Apabila pidana pokok dalam Undang-undang tersebut dirasa sulit diterapkan oleh aparat penegak hukum, dikarenakan penyidik memiliki pertimbangan jika orang tua dipenjara maka anak akan semakin tidak terpenuhi hak-haknya, mungkin dapat ditambahkan alternatif sanksi hukuman, seperti contohnya hukuman sosial (misal : melakukan aksi sosial sebagai hukuman sehingga orang tua tidak perlu sampai dipenjara, namun tetap merasakan hukuman).

2) Terdapat asas baru dalam perkembangan Hukum Pidana

Adanya 2 undang-undang khusus yang mengatur mengenai Penelantaran Anak sebagai *lex specialis*, yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentunya juga tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya dan akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh masing-masing undang-undang tersebut berbeda. Oleh karenanya dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah yuridis tersebut, yaitu asas *lex specialis sistematicis*.¹⁴⁹ Dalam hal ini adalah anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya mengakibatkan anak tersebut kehilangan hak-hak dasarnya. Perbuatan orang tua tersebut di satu sisi melanggar Undang-undang Perlindungan Anak, namun di sisi lain juga melanggar Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut yang harus digunakan adalah Undang-undang Penghapusan

¹⁴⁹Eddy O.S Hiariej, **Prinsip-prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 352.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena diatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus. Dengan demikian Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan *lex specialis sistematica*.

b. Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Perlindungan Anak

Penyidik Kepolisian harus meningkatkan pengetahuannya tentang Hukum Perlindungan Anak terkhusus yaitu tentang pengetahuan mengenai cara penanganan Tindak Pidana Penelantaran Anak. Apabila penyidik ingin memediasi pelaku tindak pidana penelantaran anak, maka penyidik harus mengetahui adanya Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Mediasi tidak dapat dengan mudahnya dilakukan langsung oleh penyidik sendiri, namun ada langkah-langkah penanganan untuk melakukan mediasi.

c. Meningkatkan Kerjasama antara Polres Bojonegoro, Dinas Sosial Bojonegoro, dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro

Kerja sama dapat dimulai dengan mengadakan pertemuan rutin setiap beberapa bulan sekali antara ketiga instansi, pertemuan yang diadakan tujuannya adalah untuk bertukar informasi mengenai data-data yang masing-masing instansi miliki. Apabila Dinas Sosial Bojonegoro, dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro merasa tidak sanggup lagi menangani kasus penelantaran anak yang terjadi, maka Polres Bojonegoro dapat membantu untuk menangani, sehingga tidak ada independensi antar instansi/ lembaga. Dengan hal itu maka Polres Bojonegoro pun juga dapat menjadi lebih aktif, tidak hanya sekedar menunggu laporan/ aduan masuk ke Polres.

Setelah pertemuan rutin tersebut telah berjalan, kemudian dapat dilanjutkan dengan membuat suatu perjanjian antara Polres Bojonegoro dengan instansi/lembaga terkait untuk bersama-sama memberantas kasus Penelantaran Anak tersebut. Sehingga diharapkan tidak akan ada tindakan Penelantaran Anak di wilayah Bojonegoro.

d. Meningkatkan Kesadaran Hukum Orang Tua dan Masyarakat tentang Hukum Perlindungan Anak

Mengadakan penerangan dan penyuluhan hukum mengenai hukum perlindungan anak di Bojonegoro. Penyuluhan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Polres Bojonegoro yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. Penyuluhan hukum dilakukan guna memberi pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini ialah orang tua, bahwa terdapat Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur dan terdapat ancaman hukuman apabila orang tua mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Serta sangat penting masyarakat dan orang tua untuk mengetahui hak-hak anak di Indonesia secara umum yang disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain penyuluhan hukum, dapat pula dilakukan penyuluhan tentang ilmu *parenting* yaitu ilmu yang mempelajari proses pengasuhan dan pendidikan anak yang dimulai dari kelahirannya hingga mencapai kedewasaan personal. Jadi *parenting* dimulai sejak anak baru dilahirkan, dan selesai pada saat anak sudah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai pribadi yang dewasa. Dewasa dalam fungsi *parenting* adalah dewasa secara mental atau psikologis. Penyuluhan ilmu *parenting* ini berguna supaya orang tua dapat memahami pola pengasuhan terhadap anak secara baik dan benar, hingga anak menjadi pribadi yang dewasa.

e. Meningkatkan Kualitas Ekonomi Orang Tua dan Masyarakat yang rendah

Meningkatkan perekonomian orang tua dan masyarakat dalam hal ini adalah yang mengalami kondisi ekonomi rendah. Usaha peningkatan ekonomi tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh Dinas Sosial, karena termasuk dalam program kerja Dinas Sosial, yang mana merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar anak-anak dapat terpenuhi hak-haknya. Program kerja Dinas Sosial tersebut ialah dengan memberikan Bantuan Sosial. Sasarannya ialah memberikan bantuan kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), yaitu Bantuan Ekonomi berupa Usaha Ekonomi Produktif. Contoh bantuan : Pemberian kambing, bantuan tunai untuk modal usaha.

Namun Bantuan Ekonomi yang diberikan oleh Dinas Sosial yaitu hanya sebatas Bantuan Stimulan (rangsangan). Dikarenakan hanya sebatas bantuan stimulan, maka Dinas Sosial harus rutin memantau mengenai perkembangan dari bantuan yang diberikan tersebut, apakah telah berjalan lancar dan sesuai bantuan tersebut atau mengalami permasalahan, jika ada permasalahan maka diharapkan Dinas Sosial dapat peduli terhadap permasalahan tersebut. Dinas Sosial perlu mengawasi hingga RTSM benar-benar dapat memiliki kondisi ekonomi yang lumayan baik.

Selain bantuan ekonomi, Dinas Sosial dapat pula memberikan bimbingan keterampilan usaha misalnya : organisasi dan manajemen, kewirausahaan, keterampilan otomotif, keterampilan memasak, keterampilan elektronika, dan keterampilan lainnya, yang dapat menjadi bekal orang tua untuk membuka wirausaha sesuai *passion* masing-masing.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak, terdapat beberapa kendala yang mana dilihat dari faktor hukum dan faktor non hukum. Dari faktor substansi hukum terdapat kelemahan pada kedua Undang-undang yang sama-sama mengatur

mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak, yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari faktor struktur hukum terdapat pula kendala yaitu kurangnya pengetahuan penyidik tentang hukum perlindungan anak dan tidak adanya koordinasi Polres Bojonegoro dengan Dinas Sosial Bojonegoro dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro. Dari faktor budaya hukum yaitu kendalanya ialah kurangnya keaktifan Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kab. Bojonegoro, rendahnya kesadaran hukum orang tua tentang hukum perlindungan anak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang hukum perlindungan anak. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala terhadap tindak pidana penelantaran anak adalah pembaharuan hukum, meningkatkan pengetahuan penyidik tentang hukum perlindungan anak, meningkatkan kerjasama antara Polres Bojonegoro, Dinas Sosial Bojonegoro, dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Bojonegoro, meningkatkan kesadaran hukum orang tua dan masyarakat tentang hukum perlindungan anak, meningkatkan kualitas ekonomi orang tua dan masyarakat yang rendah.

2. Saran

a. Bagi Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro

Adanya penelitian ini, diharapkan Polres Bojonegoro menjadi dapat lebih aktif dan tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di wilayah kabupaten Bojonegoro. Serta ke depannya dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi/ lembaga terkait khususnya Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan perlindungan terhadap anak korban penelantaran.

b. Bagi Masyarakat

Dengan diberikannya penyuluhan hukum sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak, diharapkan seluruh masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih

sehingga ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, terkhusus kepada orang tua diharapkan dapat lebih sadar dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana kewajiban orang tua.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Assiddiqie, Jimly, 2008, **Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi**, BIP, Jakarta.

Hiariej, O.S. Eddy, 2014, **Prinsip-prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 2015, **Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, PT. Alumni, Bandung.

Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI, **Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan *Social Work Reform***, makalah disajikan dalam Seminar Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan *Social Work Reform*, FISIP Universitas Indonesia, Depok, 27 September 2010, hlm 5.

Perundang-undangan

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.